



**PERAN CALO TENAGA KERJA  
DALAM PROSES PENYALURAN TKI/TKW KE LUAR  
NEGERI**

**(Studi Kasus: di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sosiologi dan Antropologi**

**Oleh  
Feri Kristiana Wati  
NIM. 3501406503**

**Jurusan Sosiologi Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Semarang  
2011**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Tri Marhaeni PA, M. Hum**  
NIP. 19650609 198901 2 001

**Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd**  
NIP. 19730131 199903 1 002



Mengetahui:  
Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi,

**Drs. MS. Mustofa, M. A**  
NIP.19630802 198803 1 001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama

**Drs. Adang Syamsudin Sulaha. M, Si**

NIP. 19531013 198403 1 001

Penguji I

Penguji II

**Prof. Dr. Tri Marhaeni PA, M. Hum  
M.Pd**

NIP. 19650609 198901 2 001

**Arif Purnomo, S.Pd., S.S.,**

NIP. 19730131 199903 1 002

PERPUSTAKAAN  
UNNES

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,

**Drs. Subagyo, M. Pd.**

NIP. 19510808 198003 1 003

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jadikan kegembiraan itu sebagai ungkapan syukur, kesedihan sebagai wujud kesabaran, diam sebagai bentuk tafakur, menyikapi sebuah permasalahan sebagai belajar, ucapan sebagai dzikir, hidup sebagai ketaatan, dan kematian sebagai cita-cita.

(Aidh Al

Qarni)

Jalani hidup ini dengan penuh semangat dan senyum karena hidup adalah anugrah, apapun yang terjadi.

(Penulis)

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Sujadi dan Ibu Sukarwati, terima kasih atas segala curahan kasih sayang, doa, dan dukungan yang diberikan selama ini.
2. Adik penulis, Deni Kurniawan, yang selalu memberikan motivasi.
3. Mohamad Afrizal yang terkasih, atas bantuan dan dukungannya.
4. Sahabat-sahabat terbaik sejak SMA (Watu, Depi, dan Ari), terima kasih atas segala bantuan dan kebersamaannya.
5. Teman-teman di “penjara kos”.
6. Teman-teman seperjuangan Sos-Ant '06 dan Almamater.

## PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *Peran Calo Tenaga kerja dalam Proses Penyaluran TKI/TKW ke Luar Negeri (Studi Kasus di desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan Sosiologi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M. Si., Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Drs. Subagyo, M. Pd., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M. A., Ketua Jurusan Sosiologi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian.

4. Prof. Dr. Tri Marhaeni Pudji Astuti, M. Hum, Dosen Pembimbing I, yang dengan kesabaran dan ketekunan telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Arif Purnomo, S. Pd., S. S., M. Pd, Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran dan ketekunan telah banyak memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Drs. Adang Syamsudin Sulaha, M. Si., Dosen Penguji skripsi yang dengan kesabaran dan ketekunan telah banyak memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Rumadi S. Pd, Kepala Desa Karangrowo yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga amal baik yang diberikan kepada penyusun mendapat imbalan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi semua pihak pada umumnya.

Semarang,

Penyusun

## SARI

**Wati, Feri Kristiana. 2010** *Peran Calo Tenaga kerja dalam Proses Penyaluran TKI/TKW ke Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*. Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Prof. Dr. Tri Marhaeni Pudji Astuti, M. Hum dan Arif Purnomo, S. Pd., S. S., M. Pd.

**Kata Kunci: Peran, Calo Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW).**

Di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia, kemiskinan umumnya terjadi di daerah pedesaan. Akibatnya, warga desa yang tergolong miskin harus mencari berbagai alternatif untuk dapat lepas dari kemiskinan. Salah satunya dengan melakukan migrasi ke luar negeri untuk bekerja menjadi TKI/TKW. Tak terkecuali bagi sebagian warga desa Karangrowo yang tergolong miskin. Namun, untuk dapat bekerja menjadi TKI/TKW di luar negeri tidaklah mudah. Oleh karena itu, warga desa Karangrowo menggunakan jasa calo tenaga kerja dalam prosesnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri?, (2) bagaimana dampak positif maupun negatif peran calo tenaga kerja bagi TKI/TKW asal Desa Karangrowo?. Dengan tujuan penelitian: (1) mengetahui peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW asal desa Karangrowo ke luar negeri, (2) mengetahui dampak positif maupun negatif peran calo tenaga kerja bagi TKI/TKW asal Desa Karangrowo.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian adalah TKI/TKW asal desa Karangrowo dan calo tenaga kerja, informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat desa Karangrowo, staf ketenagakerjaan Depnaker Kab. Kudus, dan keluarga TKI/TKW asal desa Karangrowo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW asal desa Karangrowo ke luar negeri adalah melakukan perekrutan dan memberi informasi kepada calon TKI/TKW, membantu mengurus dokumen yang diperlukan guna menjadi tenaga kerja di luar negeri, menawarkan calon TKI/TKW kepada pengguna jasa tenaga kerja, dan pendanaan awal bagi calon TKI/TKW ilegal. Peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW asal desa Karangrowo ke luar negeri di satu sisi berdampak positif, namun di sisi lain juga berdampak negatif. Dampak positif bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo adalah proses migrasi yang dijalani dapat berjalan lancar. Dampak negatif bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo adalah munculnya tindak pemerasan, tindak penipuan, kekerasan fisik dan eksploitasi.

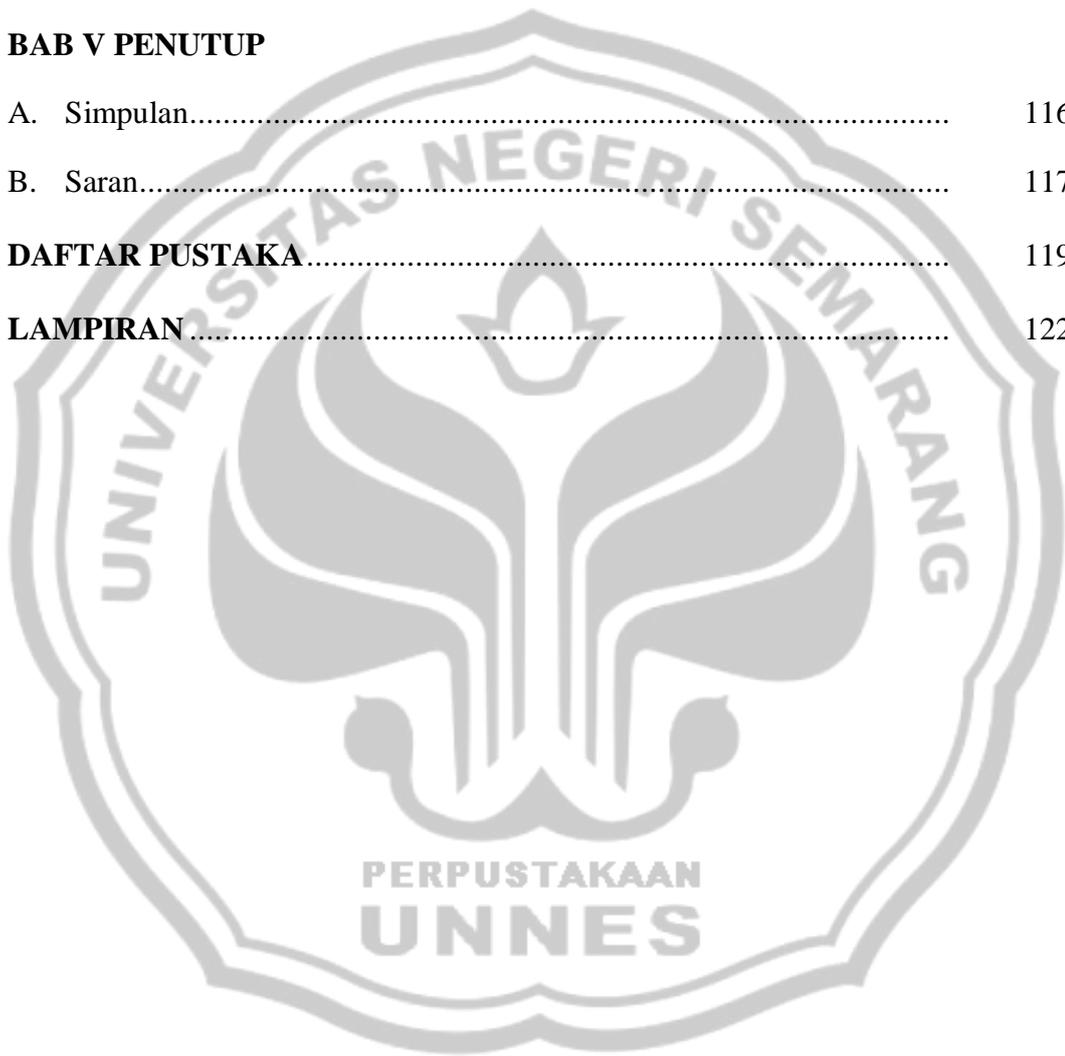
Saran yang diajukan dalam penelitian ini: 1) bagi calon TKI/TKW agar waspada terhadap calo tenaga kerja. 2) bagi mantan TKI/TKW agar memberikan informasi berupa saran yang positif untuk menjadi TKI di luar negeri 3) bagi pemerintah pusat/daerah (bidang penempatan dan pelaksanaan TKI), agar lebih perhatian pada warganya yang hendak bekerja ke luar negeri menjadi TKI/TKW.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>SARI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Batasan Istilah .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR</b>	
A. Kajian Pustaka .....	13
1. Calo Tenaga Kerja Indonesia .....	13
2. Tenaga Kerja Indonesia .....	16
3. Para Pihak dalam Penempatan Tenaga kerja ke Luar Negeri .....	17

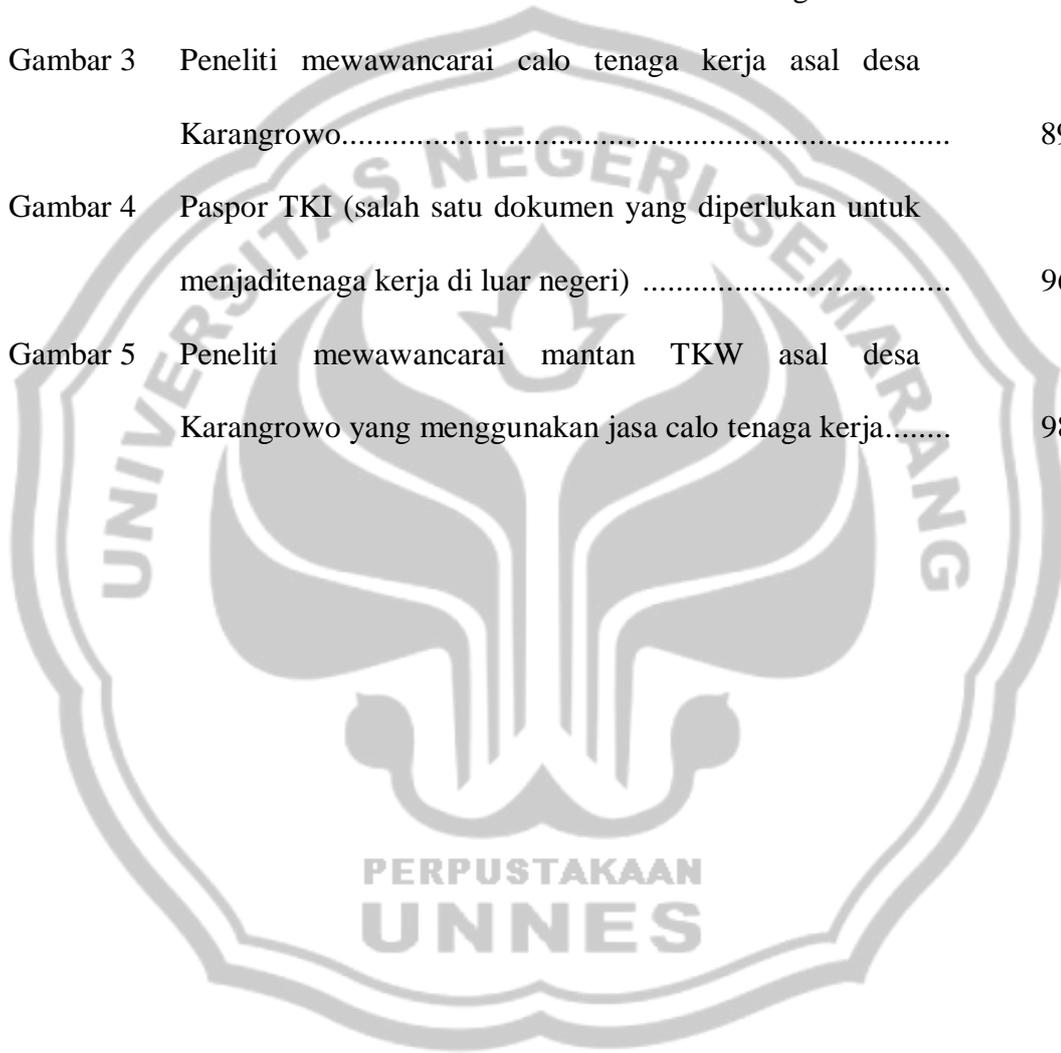
a. Pelaksanaan dan Prosedur Tenaga kerja ke Luar Negeri .....	17
b. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja .....	18
c. Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja.....	18
4. Persoalan yang Dialami TKI/TKW Sejak Proses Perekrutan Hingga Kepulauan Ke Tanah Air .....	20
5. Angkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri .....	23
6. Kemiskinan Masyarakat Desa.....	27
7. Teori Migrasi.....	30
8. Teori Peran.....	35
B. Kerangka Berpikir.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Dasar Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Fokus Penelitian.....	40
D. Subyek Penelitian.....	40
E. Sumber Data Penelitian.....	42
F. Teknik Pengumpulan data.....	44
G. Validitas Data .....	48
H. Teknik Analisis Data.....	51
I. Sistematika Penulisan Skripsi.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
B. Latar Belakang Sosial Ekonomi Warga Desa Karangrowo yang Memutuskan Menjadi TKI/TKW di Luar Negeri .....	68

C. Peran Calo Tenaga Kerja Dalam Proses Penyaluran TKI/TKW asal Desa	
Karangrowo Ke Luar Negeri.....	83
D. Dampak Positif Maupun Negatif Peran Calo Tenaga Kerja Bagi TKI/TKW	
Asal Desa Karangrowo.....	101
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	116
B. Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	119
<b>LAMPIRAN</b> .....	122



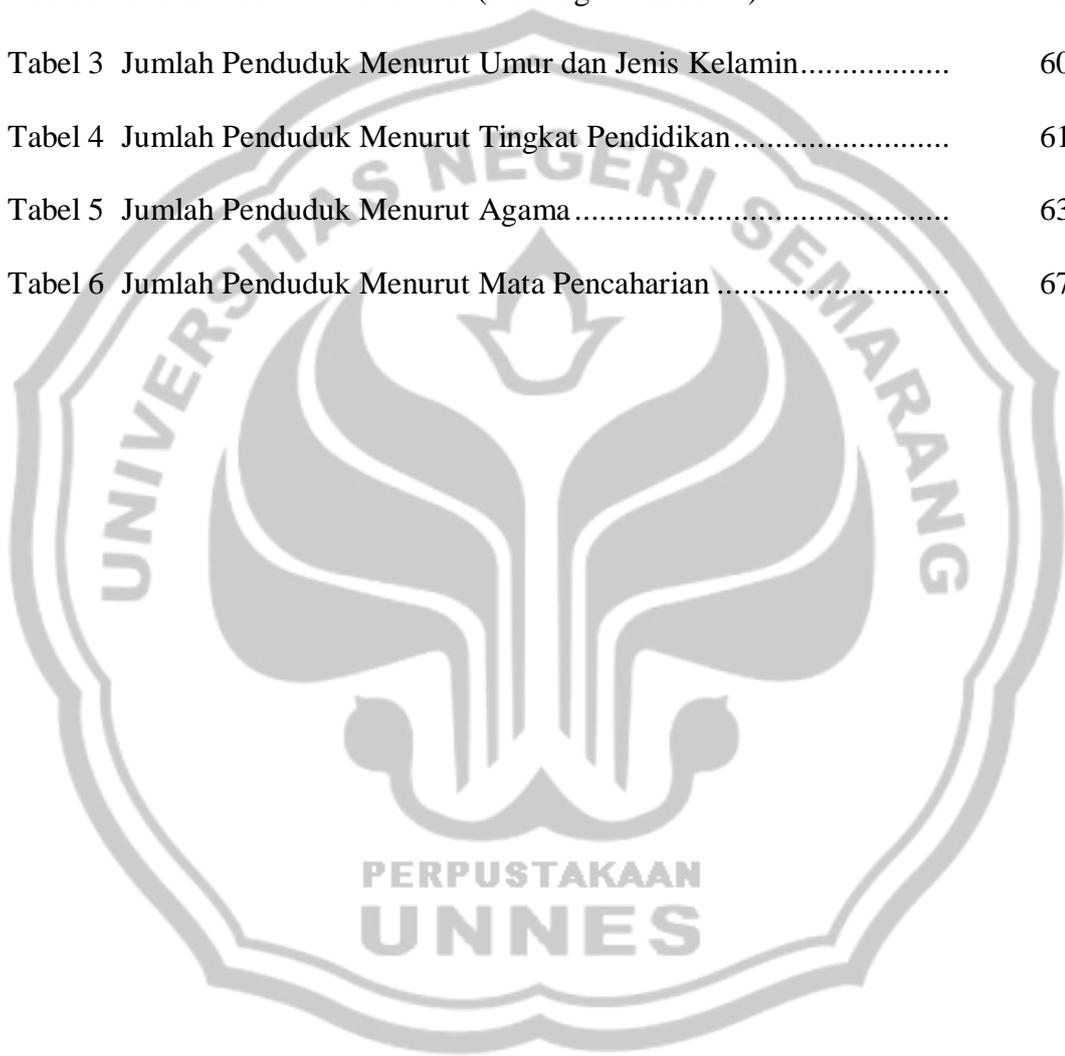
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Kerangka Berpikir Peran Calo Tenaga Kerja Dalam Proses Penyaluran TKI/TKW ke Luar Negeri .....	37
Gambar 2	Peneliti mewawancarai Kaur Kesra Desa Karangrowo.....	88
Gambar 3	Peneliti mewawancarai calo tenaga kerja asal desa Karangrowo.....	89
Gambar 4	Paspor TKI (salah satu dokumen yang diperlukan untuk menjaditenaga kerja di luar negeri) .....	96
Gambar 5	Peneliti mewawancarai mantan TKW asal desa Karangrowo yang menggunakan jasa calo tenaga kerja.....	98



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Subyek Penelitian (TKI/TKW).....	41
Tabel 2	Daftar Informan Penelitian (Keluarga TKI/TKW).....	42
Tabel 3	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	60
Tabel 4	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	61
Tabel 5	Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	63
Tabel 6	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	67



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Penelitian.....
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian .....
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian .....
Lampiran 4	Daftar Subyek Penelitian (TKW) .....
Lampiran 5	Daftar Subyek Penelitian (TKI) .....
Lampiran 6	Daftar Subyek Penelitian (Calo Tenaga Kerja) .....
Lampiran 7	Daftar Informan Penelitian (Tokoh Masyarakat Desa Karangrowo).....
Lampiran 8	Daftar Informan Penelitian (Keluarga TKI/TKW) .....
Lampiran 9	Formulir Pendaftaran TKI .....
Lampiran 10	Surat Ijin Orang Tua/Wali TKI.....

PERPUSTAKAAN  
UNNES

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Masalah distribusi pendapatan, kemiskinan dan pengangguran adalah masalah yang paling mudah disulut dan merebak pada permasalahan yang lain. Kemiskinan menjadi permasalahan yang dimiliki oleh manusia sejak lama dan implikasi akan permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, namun sering tidak disadari kehadirannya sebagai suatu masalah besar yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia kedepannya. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata adanya. Bagi mereka yang tergolong miskin, mereka sendiri merasakan dan menjalani kehidupan dalam kemiskinan tersebut. Kemiskinan itu akan lebih terasa lagi apabila mereka membandingkannya dengan kehidupan orang lain yang lebih tinggi tingkat kehidupannya. Selanjutnya kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan sebagai tempat berteduh (Ahmadi, 2003:326).

Untuk negara-negara tertentu seperti halnya Indonesia kemiskinan umumnya terjadi di daerah-daerah pedesaan, sementara orang-orang kota berebut menguasai sumber ekonomi, seperti status sosial, lapangan pekerjaan tertentu dan sebagainya (Abdulsyani, 2002:191). Ekonomi memegang peranan penting dalam suatu tatanan kehidupan dan mayoritas masyarakat pedesaan, penghidupan

ekonominya berpangkal pada kegiatan pertanian. Kepemilikan tanah (sawah dan ladang) yang sempit mengkondisikan masyarakat pedesaan hanya mencukupi kebutuhan pokok saja.

Desa Karangrowo adalah satu dari sekian desa di negeri ini yang tergolong miskin dengan kondisi sosial ekonomi warganya yang relatif rendah. Kehidupan ekonomi warga desa Karangrowo berpangkal pada kegiatan pertanian dan mayoritas warganya bekerja sebagai buruh tani. Kepemilikan lahan pertanian sangat berpengaruh bagi kehidupan ekonomi warga desa Karangrowo, bagi warganya yang memiliki lahan sempit/tidak memiliki lahan pertanian sama sekali memilih bekerja pada warga lain yang memiliki lahan pertanian luas sebagai buruh tani. Sedikitnya warga yang memiliki lahan pertanian dan banyaknya warga desa Karangrowo yang bekerja sebagai buruh tani, menjadikan ketimpangan tersendiri dan menciptakan kondisi miskin bagi kebanyakan warganya. Akibatnya warga harus mencari pekerjaan alternatif lain untuk dapat lepas dari kemiskinan dan mencukupi kebutuhan hidup yang semakin lama semakin kompleks. Karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada di desa dan upah kerja yang relatif rendah sebagai buruh tani, mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh warganya.

Salah satu alternatif yang dilakukan oleh sebagian warga Desa Karangrowo baik laki-laki maupun perempuan memilih jalan keluar dengan bekerja menjadi TKI/TKW ke luar negeri. Menjadi TKI/TKW dianggap sebagai jalan keluar terbaik bagi warga desa Karangrowo jika ingin lepas dari kemiskinan, karena pendapatan sebagai buruh tani saja tidak mampu mencukupi kebutuhan

pokok apalagi untuk mencukupi kebutuhan sampingan lainnya. Dengan keterbatasan akan modal, sempitnya lahan pertanian yang dimiliki, minimnya keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki warganya. Para buruh migran TKI/TKW biasanya mempunyai alasan-alasan tertentu yang menyebabkan mereka meninggalkan kampung halamannya dan seterusnya memilih tempat-tempat yang mereka anggap dapat memenuhi keinginan yang kurang atau tidak dapat terpenuhi kalau sekiranya tetap bertahan di tempat asal. Dengan alasan paling utama meninggalkan Indonesia adalah karena faktor ekonomi, serta wujudnya keinginan untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi (Abdurahman, 2006:114).

Keinginan untuk menjadi TKI/TKW oleh warga desa Karangrowo semakin kuat setelah mengetahui keberhasilan yang diraih oleh kerabat atau tetangga mereka yang sebelumnya pernah menjadi TKI/TKW di luar negeri. Kebanyakan warga desa Karangrowo yang sebelumnya menjadi TKI/TKW di luar negeri mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengubah kondisi sosial ekonomi menjadi lebih baik. Penghasilan yang didapatkan setelah bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri, terbukti mampu memenuhi baik kebutuhan hidup yang tidak hanya kebutuhan pokok saja melainkan juga kebutuhan lainnya, seperti: tanah, motor, tabungan, rumah yang layak huni dan sebagainya. Dengan harapan bernasib sama baiknya dengan keluarga atau tetangga yang meraih keberhasilan setelah menjadi TKI/TKW di luar negeri, warga desa Karangrowo lainnya akhirnya memutuskan bekerja ke luar negeri. Meskipun banyak kasus yang terjadi pada TKI/TKW Indonesia di luar negeri seperti tindak kekerasan, penipuan dan

sebagainya, tetap saja hal itu tidak menyurutkan langkah warga Desa Karangrowo lainnya yang hendak bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri.

Sebagai sebuah aktivitas yang tujuan utamanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga, pengambilan keputusan yang dilakukan sebagian warga desa Karangrowo untuk menjadi TKI/TKW di luar negeri sekaligus telah berfungsi sebagai salah satu strategi ke luar dari tekanan ekonomi. Kesulitan-kesulitan ekonomi yang dialami warga desa Karangrowo di daerah asal menjadi alasan penting bagi keluarga, baik secara individu maupun secara kolektif sebagai wujud dari jaringan sosial migrasi ke luar negeri.

Buruh migran TKI/TKW merupakan salah satu gambaran kemiskinan di Indonesia. Arah migrasi dari buruh migran Indonesia mengikuti pola yang sama, yaitu menuju negara-negara ekonomi kuat, seperti Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab di Timur Tengah (Asia Barat) dan Taiwan, Hongkong, Singapura, dan Malaysia di Asia Timur (Said, 2005:63). Negara-negara tersebut sudah biasa menjadi tujuan bagi para TKI/TKW Indonesia untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Ditambah lagi dengan adanya anggapan negara dengan kondisi ekonomi kuat dibandingkan di negara sendiri, maka menjadikan minat bagi buruh migran Indonesia untuk mengadu nasib di sana semakin tinggi.

Migrasi antar negara dilakukan secara terorganisasi oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam dua atau lebih negara, baik yang secara legal maupun ilegal, misalnya PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta), sponsor, maupun perusahaan-perusahaan yang menyalurkan dan yang

menampung tenaga kerja Indonesia yang berminat bekerja ke luar negeri sebagai TKI/TKW (Hidayana, 2004:91-92).

Untuk bekerja menjadi TKI/TKW di luar negeri tidaklah mudah. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu proses yang harus dilalui juga tidak semudah yang dibayangkan. Berdasarkan UU Republik Indonesia No.39 pasal 10 tahun 2004, bahwa penempatan TKI dilakukan oleh lembaga pelaksana yang terdiri dari PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penempatan TKI ke luar negeri.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk warganya yang hendak menjadi TKI/TKW di luar negeri. Baik berupa informasi dan prosedur menjadi TKI/TKW yang baik dan benar, bahkan perlindungan sekaligus. Melalui sosialisasi dan perhatian secara maksimal oleh Depnaker setempat. Namun, kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harapan masyarakat luas. Peran pemerintah melalui Depnaker setempat, lebih banyak diambil alih oleh PPTKIS (selaku pelaksana penempatan TKI swasta) melalui keterlibatan calo tenaga kerja dalam prosesnya. Bahkan ada yang diambil alih secara langsung dan diurus sepenuhnya oleh calo tenaga kerja, secara illegal.

Warga desa asal Karangrowo yang ingin menjadi TKI/TKW ke luar negeri, tidak lepas dari keterlibatan calo tenaga kerja dalam prosesnya. Moeliono (1994:147) mengartikan calo sebagai orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya berdasarkan upah; makelar; perantara. Ada berbagai macam jenis calo yang ada di masyarakat, salah satunya adalah calo tenaga kerja yang

terlibat dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri asal Desa Karangrowo ini.

Segala bentuk praktik percaloan pada dasarnya bersifat illegal karena merugikan pihak-pihak yang berkaitan, terlebih lagi jika menyangkut percaloan manusia yang dilakukan oleh calo tenaga kerja Indonesia karena calo tenaga kerja Indonesia sering tidak ikut bertanggung jawab atas persoalan yang dialami oleh TKI/TKW yang menggunakan jasanya. Secara langsung maupun tidak langsung praktek yang dilakukan calo tenaga kerja Indonesia ini ikut serta dalam menambah tingginya tingkat persoalan yang dialami oleh TKI/TKW. Akibatnya luas, tidak hanya dirasakan oleh TKI/TKW secara individu melainkan juga menjadi persoalan yang kemudian melibatkan hubungan antar negara. Padahal TKI/TKW merupakan pahlawan devisa Indonesia dan memiliki hak yang sama sebagai seorang warga negara. Oleh karena itu bagi pemerintahan RI (Republik Indonesia) keberadaan calo tenaga kerja Indonesia sesungguhnya masih menjadi permasalahan yang meresahkan dan belum mampu terselesaikan hingga kini. Hal ini berbanding terbalik dengan anggapan mereka yang hendak menjadi TKI/TKW, termasuk warga Desa Karangrowo.

Keberadaan calo tenaga kerja yang menurut pemerintah meresahkan, justru diharapkan mampu mempermudah jalannya proses menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri oleh calon TKI/TKW asal desa Karangrowo. Keinginan yang kuat untuk lepas dari kemiskinan dengan tawaran gaji tinggi di negara-negara tujuan tenaga kerja asal Indonesia membuat keberadaan calo tenaga kerja memiliki peran yang dibutuhkan oleh calon TKI/TKW asal desa Karangrowo

tanpa memperdulikan status calo tenaga kerja di mata hukum yang masih tergolong ilegal serta akibat yang dapat ditimbulkan nantinya. Tingkat pengetahuan dan pendidikan yang relatif rendah oleh kebanyakan calon TKI/TKW membuat posisi calo tenaga kerja semakin kuat sebagai pihak yang dianggap mampu membantu dalam mewujudkan keinginan warga desa Karangrowo yang hendak bekerja menjadi TKI/TKW di luar negeri. Dimana kebanyakan calon TKI/TKW asal desa Karangrowo ini tidak mengetahui prosedur yang benar untuk menjadi TKI/TKW di luar negeri. Calo tenaga kerja sebagai pihak yang lebih mengetahui prosedur untuk menjadi TKI/TKW di luar negeri dibandingkan calon TKI/TKW asal desa Karangrowo ini, memanfaatkan hal tersebut dan membuat calon TKI/TKW mempercayakan semua hal termasuk memberikan semua hal yang dibutuhkan guna kelancaran dalam proses menjadi TKI/TKW di luar negeri kepada calo tenaga kerja yang bersangkutan.

Keingintahuan mengenai peran calo tenaga kerja yang lebih jauh lagi dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri dengan melihat fenomena yang terjadi di desa Karangrowo mengenai keberadaan calo tenaga kerja, mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul: PERAN CALO TENAGA KERJA DALAM PROSES PENYALURAN TKI/TKW KE LUAR NEGERI (Studi Kasus di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW asal Desa Karangrowo ke luar negeri?
2. Bagaimana dampak positif maupun negatif peran calo tenaga kerja bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian bertujuan:

1. Mengetahui peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW asal Desa Karangrowo ke luar negeri.
2. Mengetahui dampak positif maupun negatif peran calo tenaga kerja bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoretis

Hasil penelitan ini akan memberikan penjelasan mengenai peran calo tenaga kerja dalam proses panyaluran TKI/TKW ke luar negeri dan hasil penelitian diharapkan memperkaya khasanah pengetahuan ilmu sosial khususnya Sosiologi dan Antropologi.

2. Secara praktis

a) Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang fenomena TKI/TKW di masyarakat kita, khususnya di Desa Karangrowo.

b) Bagi calon maupun mantan TKI/TKW

Agar berhati-hati terhadap perekrutan tenaga kerja melalui perantara seorang calo tenaga kerja. Karena dikhawatirkan terjadinya tindak penipuan yang dilakukan oleh calo ilegal yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya dapat merugikan pihak TKI/TKW sendiri nantinya. Meskipun, tidak dipungkiri bahwa terdapat calo yang benar-benar resmi menjadi perantara antara calon tenaga kerja dengan PPTKIS yang hendak menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

c) Bagi masyarakat

Dapat membuka wawasan masyarakat tentang fenomena yang terjadi pada TKI/TKW Indonesia.

d) Bagi instansi/LSM dan pemerintah

Dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah atau instansi terkait dan bagi LSM atau lembaga-lembaga lainnya untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap TKI/TKW dan permasalahan yang dialami. Serta diharapkan adanya sosialisasi sampai ke tingkat daerah oleh pihak PPTKIS secara langsung maupun pemerintah daerah untuk mencantumkan standar formal prosedur menjadi TKI/TKW yang legal. Dengan tujuan mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi kelak, selain itu agar para calon TKI/TKW tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi semata.

## **E. Batasan Istilah**

### **a. Peran**

Setiap individu mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan dan peran tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peran erat sekali kaitannya dengan kedudukan/status. Artinya apabila seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran.

Soekanto (2003:243-244) mengemukakan pengertian peran atau role mencakup tiga hal, sebagai berikut.

1. Peranan meliputi norma-norma dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, yaitu merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan individu yang meliputi perangkat hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Narwoko (2004:139) peran yang melekat pada diri seseorang dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Peran yang dikaitkan dengan posisi seseorang dalam pergaulannya dalam masyarakat.
2. Peran yang lebih banyak menunjuk pada fungsi seseorang.

Dalam penelitian mengenai peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri di desa Karangrowo, peran yang

dimaksudkan lebih cenderung kepada fungsinya sebagai perantara antara TKI/TKW dengan pengguna jasa tenaga kerja yakni PPTKIS/majikan di negara tujuan.

#### **b. Calo**

Moeliono (1994:147) mengartikan calo sebagai orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Sebagian orang menyebutnya dengan istilah lain: perantara atau sering pula disebut makelar. Calo dapat diartikan juga sebagai orang yang memiliki ketrampilan sebagai perantara yang menghubungkan antara pihak yang satu dengan pihak lain yang membutuhkan jasanya. Dalam penelitian ini, calo yang dimaksudkan adalah calo tenaga kerja yang berperan sebagai perantara dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri, yakni antara calon TKI/TKW dengan pengguna jasa TKI/TKW (penulis).

#### **c. Tenaga kerja Indonesia**

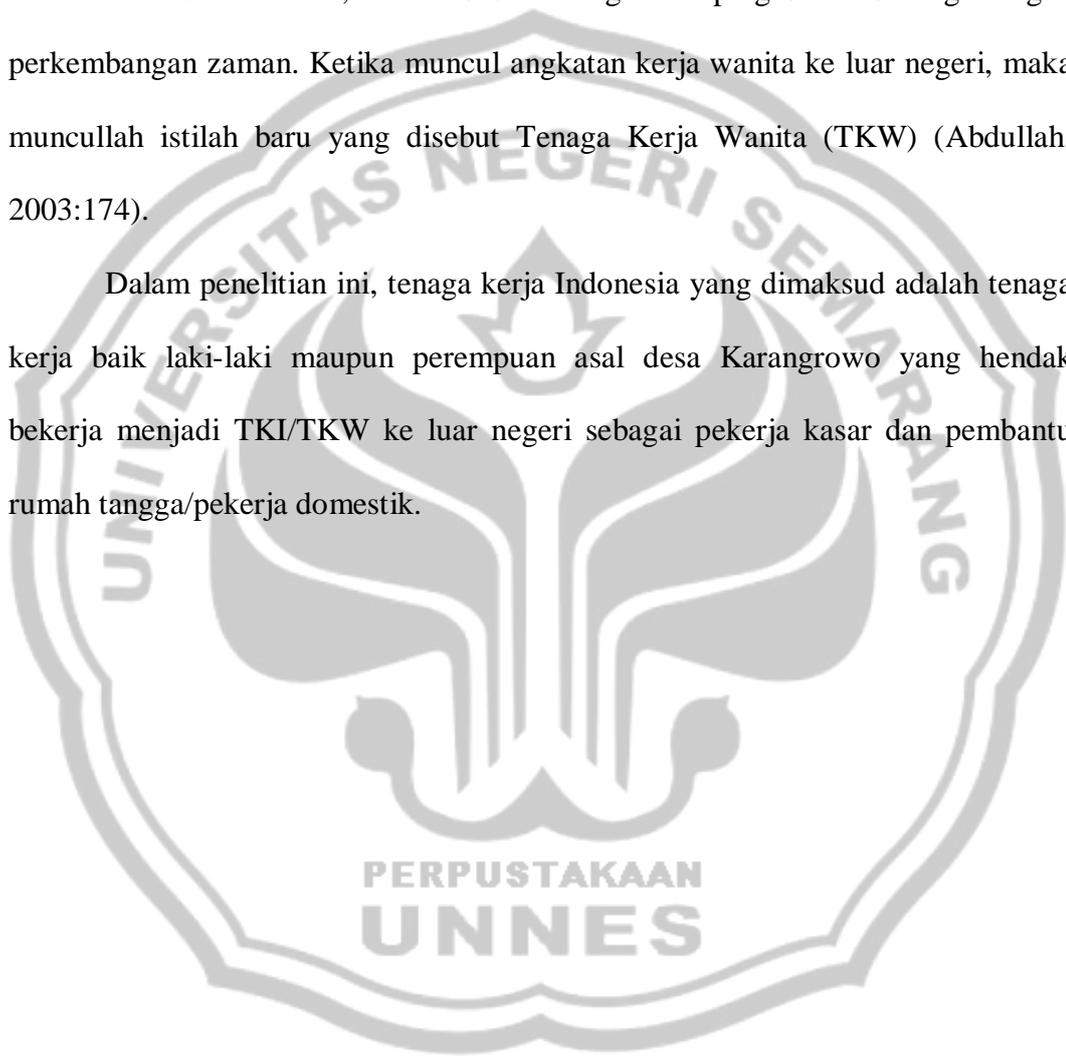
Tenaga kerja menurut jenis kelompok ada dua yaitu tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan. Tenaga kerja adalah tiap manusia yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa/barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

Haris (2003:13), mengemukakan tenaga kerja dalam konteks yang lebih luas dikaitkan dengan mobilitas (migrasi), didefinisikan sebagai suatu aktifitas perpindahan penduduk yang mencakup aspek perpindahan tempat tinggal dan biasanya melakukan migrasi formal. Migrasi ini kecuali dilakukan ke negara-

negara terdekat, banyak diantara TKI/TKW juga dikirim ke negara-negara Teluk atau negara-negara industri maju, baik Asia maupun Eropa.

Migrasi angkatan tenaga kerja ke luar negeri pada awalnya dikenal dengan sebutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), yang mendapat sebutan sebagai TKI adalah laki-laki. Namun, hal tersebut mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman. Ketika muncul angkatan kerja wanita ke luar negeri, maka muncullah istilah baru yang disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Abdullah, 2003:174).

Dalam penelitian ini, tenaga kerja Indonesia yang dimaksud adalah tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan asal desa Karangrowo yang hendak bekerja menjadi TKI/TKW ke luar negeri sebagai pekerja kasar dan pembantu rumah tangga/pekerja domestik.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. KAJIAN PUSTAKA**

##### **1. Calo Tenaga Kerja Indonesia**

Calo merupakan orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya berdasarkan upah; makelar; perantara (Moeliono,1988:147). Dalam perekonomian peran calo sangat penting dan dibutuhkan guna mempermudah transaksi guna tercapainya tujuan diantara kedua belah pihak yang bersangkutan. Namun, perlu disadari bahwa praktek calo merupakan ilegal karena calo seringkali meminta bayaran lebih, baik dari salah satu maupun kedua belah pihak.

Selain dilakukan oleh aparat instansi resmi pemerintah, penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk menjadi TKI maupun TKW juga melibatkan calo-calo tenaga kerja dalam proses di dalamnya. Baik calo tenaga kerja yang ditunjuk oleh PPTKIS resmi maupun calo tenaga kerja yang sifatnya ilegal. Beberapa PPTKIS membutuhkan jasa calo tenaga kerja untuk memenuhi tuntutan akan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu. Keterbatasan PPTKIS terutama dalam hal tenaga lapangan menyebabkan perusahaan yang bersangkutan harus tergantung pada jasa calo tenaga kerja yang berarti juga “menggadaikan” kreadibilitas perusahaannya. Jalan ini diambil karena jika dalam batas waktu yang telah ditentukan perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan akan calon tenaga kerja, maka resiko denda pun juga terpaksa harus dihadapi. Untuk itu, dalam berbagai proses perekrutan oleh calo-calo tenaga kerja yang bertindak sebagai petugas lapangan perusahaan tidak bertanggung jawab atas

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan karena dianggap sebagai resiko calon tenaga kerja migran (Haris, 2005:69-70).

Secara umum ketergantungan perusahaan pengerah jasa terhadap calo tenaga kerja sesungguhnya disebabkan oleh dua hal, yaitu tingkat persaingan yang tinggi antar perusahaan pengerah jasa dan kecenderungan orientasi bisnis yang besar dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi (Haris, 2005:67).

Depnaker (Departemen Tenaga Kerja) merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai penyalur informasi kesempatan kerja yang ada di dalam dan di luar negeri. Lembaga ini juga menyiapkan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja yang akan disalurkan. Pelatihan semacam itu juga diberikan oleh lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja swasta yang bernaung di bawah Depnaker dan atas pengawasan Depnaker. Lembaga-lembaga swasta ini pada dasarnya membantu calon tenaga kerja memperoleh pekerjaan dengan mengambil sedikit keuntungan dari biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh para calon tenaga kerja (Abdullah, 2003:180).

Depnaker seringkali lebih lambat menangani proses pengiriman tenaga kerja dibandingkan lembaga-lembaga penyalur swasta. Akibatnya banyak lembaga-lembaga swasta penyalur tenaga kerja bersaing satu sama lain untuk mendapatkan penghasilan maksimal dengan merekrut sebanyak mungkin tenaga kerja untuk di ekspor ke luar negeri sebagai komoditi non migas yang sangat menguntungkan. Namun, pekerjaan merekrut orang sebanyak mungkin tidaklah mudah. Dalam upaya merekrut tenaga kerja, lembaga-lembaga swasta penyalur

tenaga kerja pada umumnya membutuhkan peran calo tenaga kerja di dalamnya untuk memudahkan transaksi.

Peran penting calo tenaga kerja terutama terlihat dalam tiga hal. Pertama, pada saat perekrutan calon migran; kedua, pendanaan awal bagi migran yang tidak memiliki biaya dengan memberikan pinjaman dan ketiga, peran calo tenaga kerja sebagai calo yang menawarkan jasa tenaga kerja diberbagai daerah atau negara tujuan. Calo tenaga kerja pada umumnya menarik simpati calon migran dari kelompok masyarakat ekonomi bawah dan menarik mereka kedalam jaringan yang sangat sulit untuk dihindari. Calo tenaga kerja Indonesia menciptakan suatu keadaan akan adanya ketergantungan oleh calon migran. Hal itu menyebabkan calon migran tidak mampu menghindar (Abdurahman, 2006:120).

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, bahwa prosedur pelayanan program migran yang dilakukan oleh beberapa migran tenaga kerja melalui pihak pemerintah dirasakan masih terlalu birokratis (berbelit-belit), tidak efisien karena menghabiskan biaya dan waktu yang tidak sedikit dengan waktu tunggu pemberangkatan yang sangat lama, bahkan cenderung tidak pasti, serta menyulitkan calon migran sebagai pengguna program. Sehingga menyebabkan calon migran potensial menggunakan jasa calo tenaga kerja dengan harapan proses bekerja di luar negeri dapat berjalan lebih mudah dan cepat, serta biaya pertama yang dikeluarkan lebih murah. Migran yang menggunakan jalur resmi, dalam kenyataannya selama proses perekrutan, tidak lepas dari jeratan eksploitasi mekanisme calo tenaga kerja terselubung yang dikemas melalui sistem perekrutan sponsor secara resmi yakni PPTKIS (Mantra, 2003:217).

## 2. Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga kerja adalah setiap manusia yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat dalam bentuk pikiran maupun tenaga (UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara [Indonesia](#) baik laki-laki maupun perempuan, yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima [upah](#).

Haris (2003:13), mengemukakan tenaga kerja dalam konteks yang lebih luas dikaitkan dengan mobilitas (migrasi), didefinisikan sebagai suatu aktifitas perpindahan penduduk dalam hal ini penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang mencakup aspek perpindahan tempat tinggal dan biasanya melakukan migrasi formal. Mobilitas ini kecuali dilakukan ke negara-negara terdekat, banyak di antara TKI/TKW Indonesia juga dikirim ke negara-negara Teluk atau negara-negara industri maju, baik Asia maupun Eropa.

Migrasi angkatan tenaga kerja ke luar negeri pada awalnya dikenal dengan sebutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), yang mendapat sebutan sebagai TKI adalah laki-laki. Namun, hal tersebut mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman. Ketika muncul angkatan kerja wanita ke luar negeri, maka muncullah istilah baru yang disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Abdullah, 2003:174)

Dalam penelitian ini, tenaga kerja Indonesia yang dimaksud adalah tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan asal Desa Karangrowo yang pernah

bekerja menjadi TKI/TKW ke luar negeri sebagai pekerja kasar dan pembantu rumah tangga atau pekerja domestik.

### **3. Para Pihak dalam Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri**

Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri terdiri dari calon tenaga kerja yang hendak bekerja ke luar negeri, PPTKIS (Pelaksanaan Penempatan TKI Swasta) yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) dan memiliki izin dari menteri tenaga kerja, mitra usaha, dan pengguna jasa TKI. Calon tenaga kerja Indonesia atau TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pelaksanaan penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna (Abdurrahman, 2006:32).

#### **a. Pelaksanaan dan Prosedur Penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri**

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dilakukan dengan persyaratan yang ketat baik menyangkut badan pelaksana, persyaratannya, dan tahapan penyelenggaraannya. Hal ini dimaksudkan agar penempatan tenaga kerja berjalan dengan baik, untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri harus dilakukan secara selektif dan tidak menyulitkan tenaga kerja berjalan dengan baik, untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri harus dilakukan secara selektif dan tidak menyulitkan tenaga kerja untuk menghindari kecenderungan proses secara ilegal, yang sangat merugikan pencari kerja sendiri maupun nama baik negara. Hal itu

telah diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri mengenai pelaksanaan penempatan TKI.

b. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan (Abdurahman, 2006:34). Berdasarkan UU Republik Indonesia No.39 pasal 10 tahun 2004, bahwa penempatan TKI dilakukan oleh lembaga pelaksana yang terdiri dari PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penempatan TKI ke luar negeri.

c. Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja

Untuk menjadi TKI/TKW di luar negeri seseorang individu harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh negara. Ketentuan ini untuk menghindari perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI seperti obyek perdagangan manusia, kekerasan, perbudakan, kerja paksa, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang tidak manusiawi. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor Kep- 104 A/MEN/2002 (Abdurahman, 2006:36).

Kegiatan penempatan TKI ke luar negeri meliputi:

1. Pengurusan surat ijin pengerahan
2. Perekrutan dan seleksi
3. Pendidikan dan pelatihan kerja

4. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi
5. Pengurusan dokumen
6. Uji kompetensi
7. Pembekalan akhir pemberangkatan
8. Pemberangkatan

Dalam hal perekrutan dan seleksi didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-kurangnya tentang tata cara perekrutan, dokumen yang diperlukan, hak dan kewajiban calon TKI, situasi dan kondisi dan resiko di negara tujuan, dan perlindungan bagi TKI. Perekrutan calon TKI dilakukan terhadap calon TKI yang memenuhi syarat antara lain berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan pendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat. Persyaratan ini penting untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti perlakuan yang tidak manusiawi seperti penyalahgunaan, penipuan dan sebagainya yang selama ini sering menimpa TKI di luar negeri.

Pencari kerja di luar negeri harus terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Ketentuan ini perlu disosialisasikan lebih lanjut karena selama ini calon TKI dapat mendaftarkan diri pada petugas lapangan dari pelaksana penempatan TKI atau dengan kata lain tidak harus mendaftarkan diri pada kantor Tenaga Kerja setempat.

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi KTP, ijazah pendidikan, sertifikat kompetensi kerja, akte kelahiran, surat keterangan status perkawinan, surat keterangan suami atau isteri,

izin orang tua atau wali, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan TKI, perjanjian kerja, surat keterangan sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (Abdurahman, 2006:38).

#### **4. Persoalan yang Dialami oleh TKI/TKW Sejak Perekrutan Hingga**

##### **Kepulangan ke Tanah Air**

Indonesia merupakan salah satu pengirim tenaga kerja Internasional khususnya pekerja kasar dan pembantu rumah tangga (PRT) atau pekerja domestik terbesar khususnya di kawasan Asia Tenggara. Fenomena migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri, sesungguhnya bukan lagi menjadi persoalan luar biasa. Sejarah mencatat bahwa migrasi penduduk antarnegara di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara telah berlangsung berabad-abad. Dari tahun ke tahun, arus migrasi tenaga kerja ke luar negeri semakin meningkat termasuk tenaga kerja asal Indonesia sendiri (Haris, 2005:29).

Peningkatan akan arus migrasi oleh buruh migran di sertai pula dengan semakin meningkatnya kasus yang di alami oleh buruh migran dari tahun ke tahun. Berbagai kasus menarik segera muncul, setelah kasus-kasus yang dialami pekerja Indonesia mencuat ke permukaan sebagai delik aduan tindak kejahatan atas nama pekerja yang terjadi di negara tujuan. Akan tetapi ironisnya, kasus-kasus tersebut seringkali lenyap oleh alasan kekerabatan antar negara-negara terkait. Ini berarti bahwa kasus-kasus yang menimpa pekerja kita belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah (Haris, 2005:26).

Munculnya berbagai kasus yang menimpa pekerja di luar negeri sesungguhnya tidak terlepas dari lemahnya sistem manajemen dan kontrol yang dilakukan terhadap kekayaan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Ketiadaan manajemen standar dan lemahnya kontrol terhadap aktivitas PPTKIS di berbagai wilayah Indonesia telah menciptakan peluang bagi terjadinya resiko eksploitasi buruh migran kelemahan tersebut terutama terlihat pada dua hal. Pertama, lemahnya perhatian lembaga-lembaga terkait terhadap surat perjanjian kontrak kerja. Kedua, kurang jelasnya mekanisme perlindungan hukum terhadap buruh migran menyebabkan terjadinya misinterpretasi yang cenderung menempatkan pemerintah dan buruh migran pada posisi yang paradoks dan merugikan. Kebanyakan buruh migran asal Indonesia yang hendak menjadi TKI/TKW berpendidikan relatif rendah, hal ini berpengaruh pada tingkat pengetahuan buruh migran terhadap surat perjanjian kontrak kerja. Sementara surat perjanjian kontrak sendiri merupakan hal terpenting yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses migrasi. Karena seringkali ketidaktahuan buruh migran mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan dokumen penting yang dibutuhkan dalam proses migrasi inilah, justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu guna memperbesar keuntungan pribadi, sehingga posisi buruh migran rentan terhadap tindak penipuan (Haris, 2005:29-30)

Sistem *backing* (mafia percaloan tenaga kerja) yang dilakukan oleh PPTKIS juga ikut berperan penting dalam kasus tindak kejahatan yang dialami buruh migran. Adalah suatu kenyataan bahwa tidak satupun PPTKIS yang terbebas dari sistem *backing* tersebut. Bahkan hampir menjadi tradisi yang tidak

dapat dilepaskan dari seluruh prosedur pengiriman jasa tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai dilema yang seringkali rumit untuk dipecahkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berbagai kasus yang terjadi pada buruh migran sesungguhnya sudah berkembang sejak proses tersebut mulai dilakukan, yakni sejak proses perekrutan tenaga kerja.

Munculnya berbagai kejanggalan dalam prosedur pendaftaran hingga proses pengiriman dilaksanakan misalnya, merupakan salah satu persoalan yang buruh migran tidak rasakan. Akan tetapi, hal tersebut akan segera menjadi besar ketika pekerja mengalami masalah serius di negara tujuan. Pada kenyataannya, sistem backing ini akan menciptakan peluang-peluang diskriminasi dan eksploitasi buruh migran lebih besar dibandingkan kemungkinan serupa yang terjadi melalui jalur formal (Haris, 2005:27).

Menurut Hidayana (2004:88), data-data yang dilaporkan oleh solidaritas perempuan selama tahun 2001 terdapat 101 pengaduan dengan 121 kasus pelanggaran. Dari jumlah tersebut, 89,7% diantaranya adalah kasus pelanggaran terhadap buruh migran perempuan (TKW) dan 6,8% adalah kasus yang dialami oleh buruh migran laki-laki. Pada tahap sebelum pemberangkatan kasus yang paling banyak terjadi adalah pemalsuan identitas dan pemerasan, sedangkan pada tahap kedatangan migran di tempat kerja, persoalan yang kemudian dialami adalah penahanan gaji oleh majikan bahkan ada yang tidak dibayar, penganiayaan, kekerasan hingga kasus percobaan pemerkosaan.

Haris (2005:60-64) menyatakan bahwa negara-negara Arab merupakan kawasan yang mengandung resiko sosial paling besar bagi pekerja migran

Indonesia, khususnya lagi bagi migran perempuan. Seperti kekerasan fisik, eksploitasi jam kerja dan penahanan gaji yang disebabkan oleh tindak penganiayaan pengguna jasa. Di samping itu, ditemukan juga bahwa ancaman kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia khususnya perempuan juga berasal dari pihak-pihak pengerah jasa, calo tenaga kerja maupun oknum-oknum disepanjang jalur migrasi yang dilalui.

Berdasarkan data Kemenakertrans tahun 2009, tingkat permasalahan yang dialami oleh TKI masih relatif tinggi. Seperti PHK sepihak sebanyak 19.429 orang, sakit bawaan sebanyak 9.378 orang, sakit akibat kerja sebanyak 5.510 orang, gaji tidak dibayarkan sebanyak 3.550 orang, dan kasus penganiayaan sebanyak 2.952 orang. Lebih ironisnya lagi, kebanyakan dialami oleh pihak wanita karena sebanyak 80 persen TKI adalah wanita. Sistem ketenagakerjaan yang sekarang dilaksanakan dinilai tidak maksimal sehingga cenderung merugikan TKI. Dimana TKI/TKW di luar negeri rentan terhadap tindak kejahatan karena kurangnya perlindungan dari pemerintah (Jawa Pos, 2010).

### **5. Angkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri**

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah nasional yang berkepanjangan dari pelita ke pelita. Dalam pengalaman pelaksanaan pembangunan selama ini, terlihat nyata bahwa pertumbuhan angkatan tenaga kerja cukup pesat kurang dapat diimbangi oleh kemampuan penciptaan kesempatan kerja sehingga terjadi pengangguran terbuka yang terakumulasi setiap tahunnya.

Pada tahun 1990 jumlah angkatan tenaga kerja di Indonesia sebesar 73,9 juta orang, pada tahun 1995 dan 2000 diperkirakan meningkat masing-masing

86,1 juta dan 98,9 juta orang. Jadi dari tahun ke tahun jumlah angkatan tenaga kerja di Indonesia meningkat terus, dan menurut proyeksi dari Ananta (1994), pada tahun 2010 jumlah angkatan tenaga kerja diperkirakan menjadi 123,6 juta orang (Mantra, 2003:213).

Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan ini ialah dengan mendorong pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Untuk mengimplementasikan kebijakan ini dibentuklah lembaga Antar Kerja Antar Negara (AKAN) oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penyaluran angkatan tenaga kerja ke luar negeri. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini, AKAN bekerja sama dengan PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang tergabung dalam Indonesia Manpower Supplier association (IMSA).

Ada dua faktor yang mendorong pemerintah mengambil kebijakan ini. Pertama, makin kompleksnya masalah kependudukan yang terjadi di dalam negeri dengan berbagai implikasi sosial ekonomi, seperti masalah kemiskinan akibat pengangguran. Kedua, terbukanya kesempatan kerja yang cukup luas di negara-negara yang relatif kaya dan baru berkembang yang dapat menyerap tenaga kerja Indonesia dalam jumlah yang cukup besar, terutama negara-negara yang kaya akan minyak seperti halnya Timur Tengah dan juga Malaysia, Singapura serta negara-negara ASEAN lainnya. Kesempatan-kesempatan kerja tersebut selain dapat menyerap tenaga kerja Indonesia dalam jumlah yang besar, juga menawarkan tingkat penghasilan dan fasilitas yang lebih menarik dibandingkan

dengan kesempatan kerja di dalam negeri. Tingkat penghasilan yang lebih baik itulah yang pada dasarnya mendorong pesatnya arus migrasi internasional (Mantra, 2003:214). Hal ini didukung oleh pernyataan Nasution (1999:108-110) bahwa bekerja di luar negeri dapat meningkatkan penghasilan bila dibandingkan dengan teman sejawatnya yang bekerja di tanah air. Dengan tingkat penghasilan yang lebih menarik tersebut dapat meningkatkan taraf hidup keluarga pekerja. Oleh karena itu pengiriman tenaga kerja menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah ketenagakerjaan di samping faktor pemasukan devisa negara dari kegiatan migrasi ke luar negeri.

Migrasi internasional di Indonesia dapat dibedakan atas dua pola. Pertama, yang terdokumentasikan pada lembaga AKAN yang secara legal tercatat di Departemen Tenaga Kerja, salah satu contohnya adalah pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah. Kedua, tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri tidak terdokumentasikan (secara ilegal) melalui calo, misalnya kebanyakan tenaga kerja Indonesia yang pergi ke Malaysia. Mereka ini tidak tercatat di departemen Tenaga Kerja maupun di kantor imigrasi Indonesia maupun Malaysia (Mantra, 2003:214). Hal ini disebabkan karena berdasarkan fakta yang ada di lapangan, jalur resmi (legal) yang dilakukan oleh beberapa migran tenaga kerja, terlalu berbelit-belit, menghabiskan biaya dan waktu yang tidak sedikit sehingga menyebabkan calon migran potensial memilih jalur tidak resmi yang jauh lebih mudah, lebih cepat, dan biaya pertama yang dikeluarkan lebih murah (Mantra, 2003:217).

Dari pelita satu ke pelita berikutnya, jumlah angkatan tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri semakin meningkat. Timur Tengah khususnya Arab

Saudi merupakan negara dengan peringkat pertama tujuan dari pada migran asal Indonesia selain Kuwait, Qatar. Peringkat kedua adalah negara Malaysia di teruskan oleh Singapura, Brunei Darussalam. Jadi dapat disimpulkan bahwa Timur Tengah khususnya Arab Saudi merupakan negara tujuan utama dan Malaysia serta Singapura merupakan negara tujuan kedua bagi Tenaga Kerja Indonesia yang menuju ke luar negeri (Hugo dalam Mantra, 2003:215).

Jika dahulu migrasi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKI di dominasi oleh pihak laki-laki, namun sekarang perempuan pun banyak yang melakukannya. Perempuan pelaku migrasi antar negara ini disebut dengan istilah TKW. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tekanan ekonomi. Kedua, lingkungan keluarga yang sangat mendukung dalam bekerja. Ketiga, tidak ada peluang kerja lain yang sesuai dengan keterampilannya (Abdullah, 2003:226).

Haris (2003:37) mengatakan bahwa salah satu faktor penting yang menjadi landasan para tenaga kerja Indonesia mengambil keputusan menjadi TKI/TKW adalah adanya keinginan untuk memperoleh pendapatan yang berupa uang. Diharapkan dengan itu, dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan tambahan yang selama ini belum bisa terpenuhi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga layaknya keluarga-keluarga lain yang berada dalam kondisi lebih beruntung.

Ada tiga kelompok besar mobilitas angkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri menurut Abdullah (2003:191) yaitu angkatan yang memburu ringgit, kelompok pemburu real, dan kelompok pemburu dolar. Biasanya angka mobilitas

tenaga kerja yang tinggi ini terutama terjadi di daerah yang secara ekonomi terbelakang dan berkaitan dengan rendahnya income di daerah asal sementara itu beban keluarga semakin tinggi. Secara umum migrasi ke luar tenaga kerja ke luar negeri berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Pada saat perekonomian negara masih tergolong terbelakang dan tingkat pertumbuhan penduduk masih tinggi, kelebihan tenaga kerja umumnya tidak dapat diserap oleh kegiatan ekonomi di dalam negara. Sehingga memaksa warganya untuk mencari pekerjaan hingga ke negeri orang.

#### **6. Kemiskinan pada Masyarakat Desa**

Kemiskinan terjadi bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam aktifitas maupun usaha menjadi sangat terbatas (Mafrufah, 2009:1). Kemiskinan terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia, diantaranya aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial yang dimaksud adalah adanya ketidaksamaan sosial di antara sesama warga masyarakat yang bersangkutan yang bersumber pada perbedaan dalam hal asal daerah dan asal suku bangsa, ras, jenis kelamin dan usia; yang bersumber pada corak dari sistem pelapisan sosial dan sistem pendistribusian kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut serta adanya pengharapan-pengharapan sosial yang berbeda-beda di antara warga masyarakatnya. Sedangkan yang dimaksud aspek ekonomi adalah adanya ketidaksamaan diantara sesama warga masyarakat dalam hak dan kewajiban yang

berkenaan dengan pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi (Mustofa, 2005:43).

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan cara hidup berkelompok masyarakat yang bersangkutan; kemiskinan struktural sendiri terjadi apabila hubungan-hubungan kerja/usaha antar kelompok masyarakat dalam sistem sosial yang lebih luas melahirkan pola ketidakmerataan dalam mendapatkan sumber-sumber ekonomi dan ketidakadilan dalam pembagian pendapatan (Mustofa, 2005:45).

Kemiskinan struktural biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup miskin dengan mereka yang hidup kaya. Meskipun golongan miskin adalah pihak mayoritas, dalam realita mereka tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sementara pihak kaya yang lebih minoritas biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol segala aspek kehidupan terutama aspek ekonomi yang ada pada masyarakat yang bersangkutan. golongan yang menderita kemiskinan struktural itu salah satunya adalah para petani yang tidak memiliki tanah sendiri (buruh tani), disamping golongan lainnya seperti kaum migran di kota yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak menentu, kaum buruh, pedagang kaki lima dan lain-lain (Suyanto dan Narwoko, 2004:159).

Untuk negara-negara tertentu seperti halnya Indonesia kemiskinan umumnya terjadi di daerah-daerah pedesaan, sementara orang-orang kota berebut menguasai sumber ekonomi, seperti status sosial, lapangan pekerjaan tertentu dan

sebagainya (Abdulsyani, 2002:191). Ekonomi memegang peranan penting dalam suatu tatanan kehidupan dan mayoritas masyarakat pedesaan, penghidupan ekonominya berpangkal pada kegiatan pertanian. Kepemilikan tanah (sawah dan ladang) yang sempit mengkondisikan masyarakat pedesaan hanya mencukupi kebutuhan pokok saja. Terlebih lagi bagi kaum buruh tani yang tugasnya bekerja menggarap sawah pertanian namun tidak memiliki lahan pertanian sendiri, upah yang mereka terima tidak mampu menutupi kebutuhan hidup yang semakin lama semakin kompleks. Sebagaimana dikemukakan oleh Wijaksana (2005:101), kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aspek penguasaan tanah dan kemampuan memobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian. Sehingga tingkat pendapatan rumah tangga petani ditentukan oleh luas tanah pertanian yang secara nyata dikuasai.

Sebagian masyarakat pedesaan di Indonesia dalam kondisi sosial yang rendah. Ciri kemiskinan desa adalah tidak memiliki lahan pertanian, pekerjaan upahan, penjual tenaga, petani gurem, penghuni rumah yang tidak layak huni dan komunitas yang tergolong minoritas-terasing. Karakter kelompok penduduk miskin menurut Emil Salim (1976) ada lima, yaitu.

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri
2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri
3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah
4. Banyak diantara mereka yang tidak memiliki fasilitas hidup yang memadai

5. Diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan serta pendidikan yang memadai (Supriatna, 1997:82).

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Teori Migrasi**

Teori merupakan unsur penelitian yang penting peranannya dalam menjelaskan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat penelitian. Teori yang relevan sebagai dasar penelitian mengenai peran calo dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri di Desa Karangrowo adalah teori migrasi.

Lee (2000:5-6) mengatakan bahwa migrasi adalah gerak penduduk dari satu tempat ke tempat lain, baik secara permanen maupun secara semi permanen. Menurut Ahmadi (2003:38) bahwa migrasi adalah gejala gerak horizontal untuk pindah tempat tinggal dan pindahannya tidak terlalu dekat, melainkan melintasi batas administrasi, pindah ke unit administrasi lain, misalnya migrasi antar negara. Dengan kata lain, migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu unit geografis lainnya. Unit geografis dapat berarti suatu daerah administratif.

Faktor yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi menurut Lee (2000:6), terutama *push-pull factors* yaitu migrasi yang disebabkan oleh faktor-faktor pendorong di negara asal seperti faktor kemiskinan, keterbatasan lahan dan faktor-faktor penarik di negara tujuan (khususnya peluang-peluang ekonomi yang lebih baik). Selain faktor lainnya seperti rintangan-rintangan yang menghambat dalam migrasi serta faktor-faktor pribadi.

Ravenstein dalam Lee (2000:2-3) menyatakan tujuh butir hukum migrasi yang selama ini telah tahan uji dan tetap menjadi tolak untuk penelitian teori

migrasi dan studi-studi migrasi. Ketujuh butir hukum migrasi dari Ravenstein adalah sebagai berikut.

1. Migrasi dan jarak

Migran cenderung menempuh jarak dekat, dan apabila daerah tujuan semakin jauh, frekuensi migran menuju ke daerah tersebut semakin kecil.

Migran yang menempuh jarak jauh umumnya menuju pusat-pusat perdagangan dan industri yang penting.

2. Migrasi bertahap

Pada umumnya arus migrasi menuju ke pusat-pusat industri dan perdagangan yang dapat menyerap para migran itu.

Penduduk pedesaan yang berbatasan dengan kota (yang tumbuh dengan cepat dan maju) berbondong-bondong menuju ke kota tersebut. Hal ini juga berlaku bagi negara tujuan migran internasional, diman negara-negara maju menjadi tujuan migran dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dapat terpenuhi di daerah asal.

Proses penyebaran adalah kebalikan dari daya penyerapan (makin tinggi daya serap suatu tempat, makin sedikit arus migrasi keluar dari tempat itu).

3. Arus dan arus balik

Setiap arus migrasi menimbulkan arus balik sebagai penggantinya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan migran yang tidak dapat terpenuhi di daerah asal dapat terpenuhi di daerah tujuan migran tersebut. Seperti pengalaman, keterampilan baru dan kekayaan.

4. Ada perbedaan antara penduduk perkotaan dan pedesaan dalam minat bermigrasi

Penduduk perkotaan kurang berminat bermigrasi jika dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Hal ini disebabkan kebutuhan-kebutuhan penduduknya penduduknya sebagian besar dapat dipenuhi di perkotaan.

5. Kebanyakan perempuan lebih suka melakukan migrasi ke daerah-daerah yang dekat

Perempuan yang melakukan migrasi ke daerah yang dekat rupa-rupanya lebih besar jumlahnya daripada laki-laki. (Tugas perempuan di samping mengurus rumah tangga juga mengasuh anak, menjaga hubungan baik dengan tetangga sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan migrasi jarak jauh).

6. Teknologi dan migrasi

Ravenstein menyatakan bahwa peningkatan sarana perhubungan, perkembangan industri dan perdagangan menyebabkan frekuensi migrasi meningkat.

7. Motif ekonomi merupakan dorongan utama

Sampai saat ini, motif ekonomi merupakan dorongan utama secara rasional mengapa seseorang melakukan migrasi. Meskipun faktor lain juga tidak dapat diabaikan seperti lingkungan masyarakat yang tidak menyenangkan, undang-undang yang menindas di suatu negara, dan iklim yang tidak menarik.

Proses migrasi itu terjadi apabila seseorang mengalami tekanan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikolog di tempat ia berada. Tiap-tiap individu

mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga suatu wilayah oleh seseorang dinyatakan sebagai wilayah yang dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan orang lain mengatakan tidak. Selain itu, Terjadi perbedaan nilai kefaedahan wilayah antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Apabila tempat yang satu dengan tempat yang lain tidak ada perbedaan nilai kefaedahan wilayah, tidak akan terjadi proses migrasi (Munir, 1981:178-180).

Secara teoritis motivasi melakukan migrasi setiap orang berbeda-beda. Secara umum dapat dijelaskan dari perspektif individual dan struktural (Stalker dalam Nasution, 1999:43). Dari perspektif individual, migrasi dipandang sebagai keputusan rasional. Setiap individu mempunyai berbagai macam pengetahuan dan pilihan dalam upaya mencapai dan memperbaiki kesejahteraan. Menurut perspektif struktural, migrasi dipandang sebagai keputusan yang berkaitan dengan adanya tekanan kondisi eksternal yang dihadapi para migran. Struktur sosial, ekonomi dan politik dapat menekan kehidupan pekerja di negara asal. Tekanan keterbatasan peluang kerja dan kebutuhan ekonomi keluarga (kemiskinan) barangkali dapat mendorong para pekerja untuk pergi ke negara tujuan. Keputusan migran dapat terjadi sebagai akibat kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup para migran (Nasution, 1999:44).

Menurut Kertonegoro (1994:3), migrasi Internasional bisa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis tertentu sebagai berikut :

1. Migran tetap (penetap): termasuk para pekerja pendatang dan keluarga yang kemudian menyusulnya.

2. Pekerja kontrak sementara: umumnya tidak atau semi terdidik atau terlatih yang tinggal di negara penerima dalam jangka waktu tertentu, biasanya 2 tahun.
3. Para profesional dengan ijin tinggal sementara: tenaga terdidik atau terlatih yang pindah dari satu negara ke negara lain, biasanya sebagai tenaga ahli, staf atau karyawan dari organisasi Internasional atau perusahaan multi-nasional.
4. Migran ilegal: para migran yang masuk dan tinggal di negara penerima tanpa didukung dokumen serta ijin yang berwenang.

Migran biasanya memiliki alasan tertentu yang menyebabkan buruh migran meninggalkan kampung halamannya dan kemudian memilih tempat-tempat yang dianggap dapat memenuhi keinginan yang kurang atau tidak terpenuhi kalau sekiranya tetap bertahan ditempat asal. Alasan utama migran meninggalkan negara asal adalah faktor ekonomi, terutama disebabkan sukarnya mendapat pekerjaan serta mewujudkan keinginan untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi (Nasution, 1999:77).

Secara teoritis volume migrasi (internal/eksternal) paling sedikit ditentukan oleh tiga faktor. Pertama, faktor politik yang meliputi birokrasi dan berbagai prosedur yang dilalui migran. Kedua, faktor ekonomi yang meliputi latar belakang ekonomi migran, biaya migrasi dan upah. Ketiga, aspek aksesibilitas termasuk aksesibilitas transportasi dan jarak migrasi. Diantara ketiga aspek tersebut, aspek ekonomi merupakan aspek yang paling menonjol pengaruhnya

terhadap volume migrasi keluar. Tekanan ekonomi di daerah asal menyebabkan migran mencari solusi alternatif untuk tetap *survive* (Haris, 2005:90).

## 2. Teori Peran

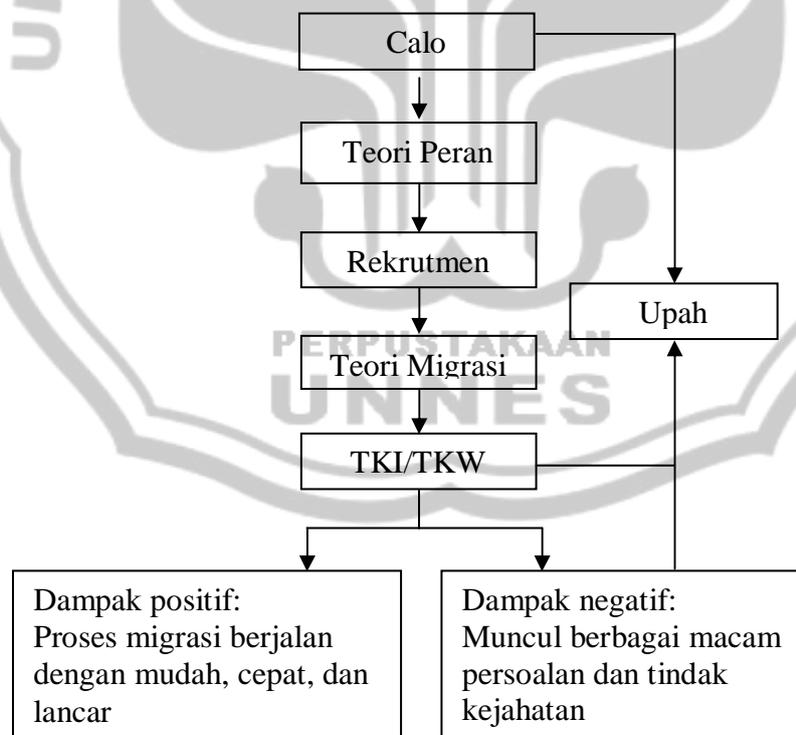
Dahrendorf dalam Poloma menegaskan bahwa peranan merupakan konsep kunci dalam memahami manusia secara sosiologis. Hal ini karena setiap manusia menduduki sekian posisi sosial dan posisi tersebut harus diperankannya (Danrendorf dalam Poloma, 1994:140). Role atau peranan merupakan kewajiban atau bisa disebut juga status subyektif. Sedangkan menurut Abdulsyani (2002:94) peranan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan individu dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status. Menurut Levinson dalam Abdulsyani (2002) peranan mencakup tiga hal yaitu: pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisis atau tempat individu dalam masyarakat. Kedua, peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam kehidupan modern yang diferensiasi strukturalnya sangat tinggi, setiap individu mempunyai peran dan tugas masing-masing. Sistem sosial akan berjalan lancar jika setiap individu melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing dengan baik. Dengan kata lain, stabilitas sosial akan terjaga hanya jika semua peran sosial yang saling bergantung satu sama lain tersebut dilaksanakan. Jika individu tidak melakukan peran dan tugasnya dengan baik maka individu tersebut menyimpang dari harapan masyarakat. Bery mendefinisikan peran

sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Bery menjelaskan bahwa terdapat dua macam harapan dari masyarakat, yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, serta harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap individu-individu yang berhubungan dengannya dan menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya (Bery, 2003:105).

### C. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir memaparkan dimensi, kajian-kajian utama, faktor-faktor kunci, variabel dan hubungan antara dimensi dalam bentuk narasi atau grafis. Dalam penelitian ini kerangka berpikir peran calo dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri, adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Bagan kerangka berpikir peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri

Berdasarkan bagan kerangka berpikir tersebut dapat dijelaskan bahwa calo merupakan perantara tenaga kerja antara calon TKI/TKW dengan pengguna tenaga kerja (PPTKIS/majikan di negara tujuan). Calo tersebut adalah orang yang membantu calon TKI/TKW dalam memperlancar prosesnya menjadi tenaga kerja di luar negeri. Diantaranya adalah merekrut calon TKI dan memberi informasi mengenai peluang kerja di luar negeri pada calon TKI/TKW serta membantu calon TKI/TKW dalam mengurus administrasi yang dibutuhkan sebagai persyaratan menjadi tenaga kerja di luar negeri. Dari hasil kerja tersebut, calo mendapat imbalan berupa uang dari pengguna jasa tenaga kerja yang bersangkutan, terkadang juga mendapatkan tambahan upah dari calon TKI/TKW. Peran calo tenaga kerja yang terlibat dalam proses penyaluran tenaga kerja ke luar negeri bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo berdampak positif dan negatif. Dampak positif yang dialami TKI/TKW asal desa Karangrowo adalah proses untuk bekerja menjadi tenaga kerja di luar negeri dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Sedangkan, dampak negatifnya adalah muncul berbagai persoalan sejak perekrutan hingga kepulangan ke tanah air (tindak penipuan, pemerasan, kekerasan fisik dan eksploitasi).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Dasar Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4), metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu-individu atau perilaku yang diamatinya.

Penelitian kualitatif selalu bersifat deskriptif, artinya data yang dianalisis berbentuk deskriptif fenomena, tidak berupa angka-angka. Data yang terkumpul selalu berbentuk kata-kata tulisan yang mencakup catatan, laporan dan foto.

Pemilihan metode kualitatif yaitu supaya dapat mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus dalam suatu masyarakat secara natural, apa adanya, dan tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Selain itu, juga akan dapat menggambarkan fenomena yang diperoleh dan menganalisisnya dalam bentuk kata-kata guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan metode ini akan dapat mendeskripsikan secara lebih teliti mengenai peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri dan dampak positif maupun negatif peran calo tenaga kerja bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Hal ini dikarenakan untuk menjadi TKI/TKW di luar negeri, warga asal desa Karangrowo melalui calo tenaga kerja dalam prosesnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil lokasi tersebut untuk meneliti mengenai peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri dan dampak positif maupun negatif peran calo tenaga kerja bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah peran calo dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri. Dimana penelitian ini difokuskan pada:

1. Peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW asal desa Karangrowo ke luar negeri?
2. Dampak positif maupun negatif peran calo tenaga kerja bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo?
- 3.

## **D. Subyek Penelitian dan Informan Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. TKI/TKW asal desa Karangrowo yang menggunakan jasa calo tenaga kerja.
- b. Calo tenaga kerja yang menyalurkan TKI/TKW asal desa Karangrowo.

Alasan pemilihan TKI/TKW asal Desa Karangrowo dan calo tenaga kerja sebagai subyek penelitian, karena pihak yang bersangkutan mengetahui secara mendalam tentang peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri dan dampak positif maupun negatif peran calo tenaga kerja bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo.

Tabel 1  
Daftar Subyek Penelitian (TKI/TKW)

No	Nama	Umur	Masa Kerja	Jenis Kelamin (P/L)	Status Kerja (Legal/Illegal)
1	Suprihatin	45 tahun	6 tahun	P	Legal
2	Rita Sugiharti	20 tahun	4 tahun	P	Legal
3	Suratmi	30 tahun	6 tahun	P	Legal
4	Warsiti	40 tahun	2 tahun	P	Illegal
5	Sri Atun	30 tahun	4 tahun	P	Legal
6	Kurniati	37 tahun	6 tahun	P	Legal
7	Kahono	47 tahun	6 tahun	L	Legal
8	Subandi	40 tahun	4 tahun	L	Illegal
9	Slamet Riyadi	33 tahun	2 tahun	L	Illegal
10	Nor Syafaat	31 tahun	4 tahun	L	Illegal
11	Supriyanto	27 tahun	4 tahun	L	Illegal

Dalam penelitian ini, selain subyek penelitian juga terdapat informan penelitian guna menambah kelengkapan data yang dibutuhkan. Informan penelitian tersebut terdiri dari:

- a. Tokoh masyarakat setempat yaitu Kepala Desa Karangrowo dan Kaur Kesra Desa Karangrowo.
- b. Staf ketenagakerjaan Disnakertrans Kabupaten Kudus.
- c. Keluarga TKI/TKW asal desa Karangrowo yang menggunakan jasa calo tenaga kerja.

Tabel 2  
Daftar Informan Penelitian (Keluarga TKI/TKW)

No	Nama	Pekerjaan	Hubungan dengan Subyek Penelitian
1	Suyadi	Petani	Suami Suratmi
2	Kusno	Petani	Suami Kurniati
3	Narlin	Buruh pabrik	Adik Subandi
4	Sutar	Petani	Paman Sri Atun
5	Surinah	Petani	Kakak Rita Sugiharti

### E. Sumber Data Penelitian

Data yang tersedia dan yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Sugiyono (2008:51) menyatakan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk menggali keterangan dari masyarakat Desa Karangrowo. Data yang hendak peneliti peroleh dari hasil wawancara yaitu:

- a. Informasi peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW asal desa Karangrowo ke luar negeri.
- b. Informasi mengenai dampak positif maupun negatif peran calo tenaga kerja bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo.

Selain memperoleh data dari wawancara, data juga peneliti peroleh dari pengamatan atau observasi. Data yang peneliti peroleh dari hasil observasi yaitu:

- a. Mengenai kondisi geografis dan keadaan alam desa Karangrowo.

- b. Mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya desa Karangrowo.
- c. Profil TKI/TKW asal desa Karangrowo
- d. Kehidupan sosial ekonomi keluarga TKI/TKW asal desa Karangrowo.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang berupa informasi untuk melengkapi data primer. Dalam hal ini dokumen atau arsip dari lembaga masyarakat dan pemerintahan, foto-foto yang berkaitan dengan fokus penelitian di desa Karangrowo, serta data-data pelengkap lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini yang terkait dengan peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri. Data sekunder yang peneliti peroleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

- a. Dokumen atau arsip dari lembaga pemerintahan Desa Karangrowo berupa data monografi desa tahun 2009 dan dokumen lain untuk menunjang data penelitian.
- b. Beberapa literatur yang relevan dengan fokus penelitian.
- c. Data sekunder lain yaitu berupa foto-foto yang peneliti hasilkan sendiri dengan kamera digital untuk menunjang data penelitian.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Agar hasil yang dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan harapan yang tertuang dalam tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini harus sinkron untuk keabsahan data penelitian. Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut.

### 1. Pengamatan Langsung (Observasi)

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Nawawi, 2005:100). Observasi langsung bertujuan agar data yang diperoleh dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Mengamati fokus kajian (objek) secara langsung.
2. Mencari data yang akurat, dimaksudkan agar data yang diperoleh benar-benar objektif.
3. Mencatat semua data sesuai dengan data yang diperlukan, agar data yang diperoleh tidak menimbulkan pengertian yang kabur.

Dalam penelitian ini peneliti langsung ke lokasi untuk melakukan pengamatan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan tentang keabsahan data dan mencari sebuah kebenaran yang terjadi di lapangan. Observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian langsung yaitu dengan mengunjungi rumah informan yang akan diteliti secara langsung.

Beberapa hal yang diobservasi dalam penelitian ini antara lain, mengenai kondisi geografis dan keadaan alam desa Karangrowo, mengenai kondisi sosial-ekonomi dan sosial-budaya desa Karangrowo, kehidupan sosial ekonomi keluarga TKI/TKW, serta profil TKI/TKW asal desa Karangrowo.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tertentu dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:186). Maksud mengadakan wawancara adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.

Terdapat dua teknik wawancara, yaitu:

a. Wawancara terbuka

Wawancara terbuka dilakukan secara terbuka, akrab, dan penuh kekeluargaan. Dalam pelaksanaan wawancara ini peneliti menemui langsung informan sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah disepakati. Untuk memperoleh data sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan, maka dalam wawancara digunakan pedoman pertanyaan agar memperoleh informasi yang bersifat umum.

b. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam, yaitu dalam wawancara terjadi percakapan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dalam suasana santai, kurang formal dan tidak disediakan jawaban oleh pewawancara. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang sifatnya mendalam terhadap masalah-masalah yang diajukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam.

Dalam pelaksanaannya, peneliti berinteraksi dengan informan menanyakan secara langsung pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data lapangan.

Dengan wawancara mendalam diharapkan dapat mengungkap sesuatu yang lebih detail dari informan, sehingga punya referensi mengaitkan hal-hal yang

sekecil apapun. Wawancara ini merupakan salah satu alat pengumpulan data, sehingga dapat diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ditinjau dari pelaksanaannya penelitian ini lebih memilih menggunakan wawancara mendalam (*In-dept interview*) yang dipadukan dengan wawancara dengan kerangka pembicaraan informal. Dengan tujuan, peneliti bebas memberikan pertanyaan yang mendalam kepada informan dengan tidak disadari bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga diantara peneliti dan informan bersikap akrab dan bebas, yang pada gilirannya dijawab oleh informan secara luas dan berkembang dengan alami, tetapi tetap mengedepankan batasan penelitian atau data yang diperlukan.

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data tentang peran calo dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri di desa Karangrowo, peneliti melakukan wawancara dengan subyek penelitian dan beberapa informan. Penelitian dilakukan sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai 10 September 2010.

Subyek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari, sebagai berikut.

- 1) Calo tenaga kerja yang ikut terlibat dalam proses penyaluran TKI/TKW asal desa Karangrowo ke luar negeri, yaitu Bapak Fadli dan Bapak Supalal. Hasil wawancara mengenai perannya sebagai calo tenaga kerja.
- 2) TKI asal desa Karangrowo yang menggunakan jasa calo tenaga kerja, terdiri dari Subandi, Nor Syafaat, Slamet Riyadi, Supriyanto, dan Kahono. Hasil wawancara yaitu mengenai peran calo tenaga kerja yang terlibat dalam proses menjadi TKI di luar negeri, dampak yang dialami dengan menggunakan jasa

calo tenaga kerja, alasan menggunakan jasa calo tenaga kerja, dan latar belakang sosial-ekonomi sebelum memutuskan menjadi TKI di luar negeri.

- 3) TKW asal desa Karangrowo yang menggunakan jasa calo tenaga kerja, terdiri dari Suratmi, Rita Sugiharti, Suprihatin, Warsiti, Kurniati, dan Sri Atun. Hasil wawancara yaitu mengenai peran calo tenaga kerja yang terlibat dalam proses menjadi TKI di luar negeri, dampak yang dialami dengan menggunakan jasa calo tenaga kerja, alasan menggunakan jasa calo tenaga kerja, dan latar belakang sosial-ekonomi sebelum memutuskan menjadi TKW di luar negeri.

Sedangkan informan dalam penelitian ini terdiri dari, sebagai berikut.

- 1) Kepala Desa, yaitu Bapak Rumadi, S.pd. dan Kaur Kesra Desa Karangrowo yaitu Bapak Nor Hadi. Hasil wawancara yaitu tentang kondisi umum desa Karangrowo, mengetahui warga desa Karangrowo yang menjadi TKI/TKW di luar negeri, dan keberadaan calo tenaga kerja di Desa Karangrowo .
- 2) Staf Disnakertrans bagian ketenagakerjaan Kabupaten Kudus yaitu Ibu Heny Setyowati, guna memperoleh data pelengkap yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian. Seperti, data mengenai jalur yang dapat dipilih untuk menjadi TKI.
- 3) Keluarga TKI/TKW yang berada di desa Karangrowo, yang menggunakan jasa calo tenaga kerja. Seperti Kusno, Narlin, Surinah, Suyadi, dan Sutar.

Hasil dari wawancara didapatkan informasi latar belakang sosial-ekonomi keluarga sehingga memutuskan bekerja di luar negeri dan jalur yang di tempuh oleh anggota keluarga yang menjadi TKI/TKW di luar negeri.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk mengungkap masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini adalah dokumen yang diperlukan seperti monografi desa Karangrowo serta foto-foto maupun dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai penunjang data penelitian nantinya.

#### **G. Validitas Data**

Validitas data merupakan faktor yang penting dalam sebuah penelitian karena sebelum data dianalisis terlebih dahulu harus mengalami pemeriksaan. Validitas membuktikan hasil yang diamati sesuai dengan kenyataan dan memang sesuai dengan yang sebenarnya ada atau kejadiannya (Nasution, 2003:105).

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji validitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2008:117).

Aspek validitas data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data untuk menguji keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Moelong

(2007:178) bahwa teknik triangulasi dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu.

1. Triangulasi sumber, yang membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain.
2. Triangulasi metode, yang membandingkan suatu sumber dengan metode yang berbeda atau beberapa sumber dengan metode yang sama.
3. Triangulasi penyidik, yaitu membandingkan hasil penelitian dari berbagai pengamat yang berbeda.
4. Triangulasi teori, yang membandingkan derajat kepercayaan dengan berbagai macam teori yang ada.

Untuk menguji obyektifitas data di sini dilakukan dengan mengecek silang atau mencocokkan antara data lapangan apakah sudah ada relevansi antara teori dengan kenyataan di lapangan atau yang terjadi justru sebaliknya. Diharapkan dengan menggunakan triangulasi tersebut di atas, maka data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena dibandingkan dari berbagai segi.

Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi data dengan sumber. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara

Penulis dalam tahap ini membandingkan data hasil wawancara dengan subyek maupun informan mengenai peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri di Desa Karangrowo, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dengan hasil observasi berupa kondisi umum desa Karangrowo dan latar belakang sosial-ekonomi warga desa Karangrowo yang

memutuskan bekerja ke luar negeri sebagai TKI/TKW. Adapun data hasil observasi dan data hasil wawancara dibandingkan untuk mengetahui apakah data hasil observasi telah sesuai dengan data hasil wawancara.

Langkah ini dilakukan agar penulis mengetahui perbandingan dari data yang didapat dari perkataan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, karena banyak subyek dan informan yang tidak memberikan data yang sesuai dengan kenyataan dikarenakan pertimbangan aspek sosial tertentu.

- b. Membandingkan keadaan perspektif informan dengan berbagai pendapat dan pandangan informan lainnya.

Penulis menemukan pendapat yang berbeda antara informan satu dengan informan lainnya, meskipun pertanyaan yang diajukan sama, seperti pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Desa Karangrowo dan Kaur Desa Karangrowo mengenai keberadaan calo TKI di desa Karangrowo. Kepala Desa Karangrowo memanggil calo TKI dengan sebutan perantara karena sebutan calo pada umumnya bermakna tidak baik. Sedangkan Kaur Desa Karangrowo memanggil calo TKI yang di desa Karangrowo tetap dengan sebutan calo. Selain itu, Kaur Desa Karangrowo dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terkait fokus penelitian lebih mau terbuka dibandingkan dengan Kepala Desa Karangrowo sendiri.

## H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode analisa data dengan model interaktif. Dalam model analisis interatif tersebut ada 4 komponen di dalamnya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keempat data komponen dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul maka ketiga komponen tersebut berinteraksi. Jadi keempat jenis kegiatan analisis data dan pengumpulan data itu sendiri merupakan siklus dan interaktif.

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Dari hasil observasi didapatkan data berupa gambaran umum desa Karangrowo, kehidupan sosial ekonomi warga desa Karangrowo yang memutuskan bekerja ke luar negeri menjadi TKI/TKW, serta profil TKI/TKW asal desa Karangrowo. Sedangkan data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah peran calo dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri dan dampak positif maupun negatif peran calo tenaga kerja bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo. Sedangkan dari studi dokumentasi, peneliti memperoleh data monografi desa Karangrowo dan foto-foto terkait dengan fokus penelitian.

## 2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan dalam pola-pola. Reduksi data dimaksudkan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan membuang bagian yang tidak penting agar data dapat ditarik kesimpulan.

Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan, observasi dan studi dokumentasi di lapangan, data yang peneliti peroleh masih luas dan banyak. Kemudian peneliti menggolongkan dan mengarahkan sesuai dengan fokus penelitian yaitu mengenai gambaran umum desa Karangrowo, latar belakang sosial-ekonomi warga desa Karangrowo yang memutuskan bekerja ke luar negeri sebagai TKI/TKW, peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri dan dampak positif maupun negatif peran calo tenaga kerja bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo.

## 3. Penyajian data

Menyajikan data yang terwujud dalam sekumpulan informasi yang tersusun dengan baik melalui ringkasan atau rangkuman berdasarkan data yang telah diseleksi atau direduksi. Informasi atau data ini disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu tulisan yang rapi dan tersusun dengan baik. Dengan demikian dalam ringkasan atau rangkuman itu didalamnya termuat rumusan hubungan antara unsur dalam unit kajian

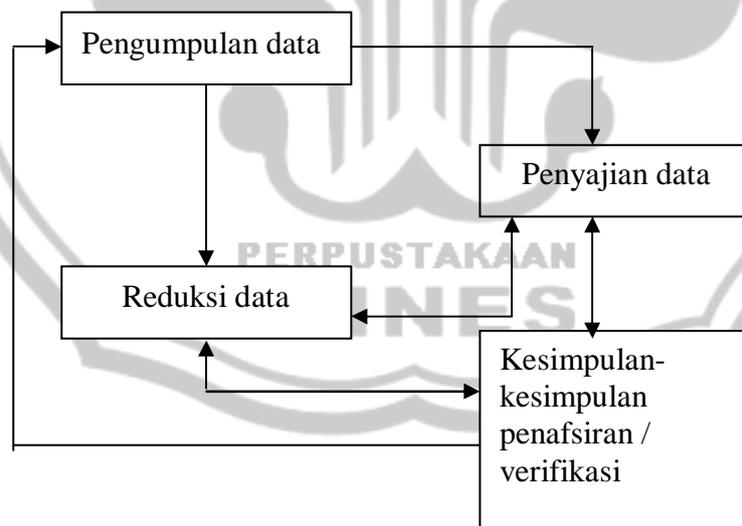
penelitian sehingga dapat memungkinkan untuk memudahkan menarik simpulan.

Dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi di lapangan, data yang peneliti peroleh masih luas dan banyak. Kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif naratif yang berisi tentang uraian seluruh masalah yang dikaji sesuai dengan fokus penelitian yaitu mengenai gambaran umum desa Karangrowo, latar belakang sosial-ekonomi warga desa Karangrowo yang memutuskan bekerja ke luar negeri sebagai TKI/TKW, peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri dan dampak positif maupun negatif peran calo tenaga kerja bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo. Selain itu data juga disajikan dalam bentuk gambar dan tabel.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh dimana kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisisan selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus di uji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya, yang merupakan validitasnya (Miles,1992:19).

Penarikan kesimpulan dilaksanakan untuk mencari kejelasan dan pemahaman terhadap gejala-gejala yang terjadi di lapangan terkait dengan fokus penelitian yaitu peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW di desa Karangrowo dan dampak yang dialami oleh TKI/TKW asal desa Karangrowo dengan adanya peran calo tenaga kerja. Langkah-langkah analisis setelah pengumpulan data selesai, maka peneliti mulai melakukan penyajian dengan melalui reduksi data terlebih dahulu. Setelah itu mengambil kesimpulan awal, apabila dianggap kurang mantap oleh peneliti karena ada kekurangan atau ada persoalan baru, maka akan melakukan reduksi atau melihat hasil reduksi lagi dan melihat hasil penyajian data. Setelah selesai dilanjutkan dengan mengambil data baru, begitu seterusnya hingga penelitian selesai dengan menarik kesimpulan akhir.



Gambar Model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (1992:20)

## I. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi, maka secara singkat penulis menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut.

a) Bagian awal skripsi, yang berisi: Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan Kelulusan, Sari, Halaman Motto dan Persembahan, Prakata, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel, serta Daftar Lampiran.

b) Bagian isi skripsi, terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN, merupakan gambaran menyeluruh dari skripsi yang meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini berisi mengenai calo tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia, para pihak dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri, persoalan yang di alami TKI/TKW sejak perekrutan hingga kepulangan ke tanah air, angkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, kemiskinan pada masyarakat desa, teori migrasi, teori peran, serta kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN, bab ini mencakup Dasar Penelitian, Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan Skripsi..

Bab IV: HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN, dalam bab ini disajikan hasil penelitian berupa gambaran umum desa Karangrowo, latar belakang

sosial-ekonomi warga desa Karangrowo yang memutuskan menjadi TKI/TKW ke luar negeri, peran calo dalam proses penyaluran TKI/TKW asal desa Karangrowo ke luar negeri, dan dampak positif maupun negatif peran calo tenaga kerja bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo.

BAB V: KESIMPULAN dan SARAN, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai permasalahan yang diteliti.

- c) Bagian akhir skripsi, dalam bagian ini berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun skripsi.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **a. Keadaan Geografis dan Lingkungan Alam**

Desa Karangrowo adalah salah satu desa di kecamatan Undaan kabupaten Kudus yang berbatasan langsung dengan kabupaten Pati. Jarak desa Karangrowo dari pusat kota Kudus sendiri adalah 20 km dan 14 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Undaan. Sementara jarak dengan wilayah ibukota provinsi Jawa Tengah, Semarang, 60 km.

Gambaran umum mengenai fisik desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dapat dijelaskan dengan melihat beberapa aspek, keadaan geografis, aspek sosial, ekonomi dan aspek budaya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

Desa Karangrowo ini terdiri dari 3 dukuh yaitu dukuh Kaliyoso, dukuh Ngelo, dan dukuh Krajan. Untuk dukuh Ngelo sendiri, oleh masyarakat setempat dan sekitarnya mendapatkan dua julukan secara kewilayahan non administratif yakni Ngelo dan Ngelo Ngeseng. Meskipun secara administratif pemerintahan hanya dikenal dukuh Ngelo. Duku Krajan merupakan bagian wilayah desa Karangrowo bagian utara, dinamakannya Krajan karena semula wilayah (kantor) administrasi Desa Karangrowo berada di wilayah Krajan, sebuah nama yang diidentikan dengan kata kerajaan (wilayah penguasa). Namun sekarang, kedudukan pusat pemerintahan desa (balai Desa) berada di dukuh Ngelo Ngeseng. Jarak antara dukuh satu dengan dukuh lain mencapai 1 hingga 1,5 km.

Secara administratif desa Karangrowo termasuk dalam wilayah pembagian kecamatan Undaan kabupaten Kudus, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Panyaman, Kec. Undaan, Kab. Kudus

Sebelah Timur : Desa Wotan, Kec. Sukolilo, Kab. Pati

Sebelah Selatan : Desa Wotan, Kec. Sukolilo, Kab. Pati

Sebelah Barat : Desa Wates, Kec. Undaan, Kab. Kudus

Desa Karangrowo merupakan daerah dataran rendah dengan luas desa 130.876 Ha. Di mana 370,00 Ha adalah pemukiman dan sisanya merupakan sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, tegal/ladang, kas desa, lapangan dan lainnya (Data Monografi Desa Karangrowo, 2009).

Wilayah desa Karangrowo dan perudukannya terkenal sebagai desa penghasil padi yang produktif yang membentang di areal seluas 781,58 Ha dengan tiga kali musim tanam, dua kali musim tanam padi dan ketiga kalinya menghasilkan buah semangka jenis biji yang dipasok ke seluruh wilayah Kudus dan Kabupaten sekitarnya. Wilayah pertanian seluas itu dikelola oleh 1.602 petani pemilik, 1.874 petani buruh/penggarap.

Pada tahun 90-an, desa Karangrowo masuk program Inpres Desa Tertinggal (IDT) karena dikategorikan sebagai desa tertinggal. Hal ini dibuktikan dengan fasilitas sarana-prasarana umum yang masih sangat minim sekali. Seperti tidak adanya fasilitas umum dibidang kesehatan berupa puskesmas, tenaga medis, dan apotik. Hingga kini, dalam bidang kesehatan masyarakat setempat memanfaatkan puskesmas keliling atau jika mendesak maka masyarakat setempat pergi ke desa tetangga terdekat yang terdapat fasilitas kesehatannya. Di bidang ekonomi juga

ditunjukkan dengan tidak adanya pasar umum. Sehingga masyarakat desa setempat harus pergi ke luar desa atau ke kota untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dapat terpenuhi di desa, misalnya perabotan rumah tangga. (Hasil wawancara dengan Bapak Rumadi selaku Kepala Desa Karangrowo pada tanggal 10 Agustus 2010).

#### b. Penduduk

Jumlah total penduduk desa Karangrowo adalah 7.064 jiwa yaitu 3.567 jiwa penduduk laki-laki dan 3.497 jiwa penduduk perempuan. Di mana penduduk laki-laki dan perempuan ini tergabung dari 1.879 Kepala Keluarga yang ada di desa Karangrowo. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3  
Jumlah Penduduk Desa Karangrowo  
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2009

No	Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	0-4	346	305	651
2	5-9	430	394	824
3	10-14	432	397	829
4	15-19	453	379	832
5	20-24	430	431	861
6	25-29	345	442	787
7	30-39	462	406	865
8	40-49	291	310	601
9	50-59	214	237	451
10	60 +	171	200	371
	Jumlah	3.567	3.497	7.064

Sumber: Monografi Desa Karangrowo 2009

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp. Nor Hadi yang menjabat sebagai Kaur Kesra Desa Karangrowo menyatakan, bahwa sekitar 15% dari jumlah penduduk desa Karangrowo berprofesi sebagai TKI/TKW di luar negeri, dengan usia rata-rata berkisar 18-35 tahun dan didominasi oleh kaum perempuan.

Sehingga, dari seluruh penduduk desa Karangrowo yang berjumlah 7.064 orang, terdapat 1.060 penduduknya yang bekerja menjadi TKI/TKW di luar negeri (penulis).

### c. Pendidikan

Ditinjau dari tingkat pendidikan, masyarakat desa Karangrowo pada umumnya sudah banyak yang mengenyam pendidikan meskipun angka yang paling banyak ditunjukkan pada jenjang pendidikan dasar yaitu lulusan SD dan tidak tamat SD yang menduduki peringkat utama dengan jumlah yang paling banyak, yakni 3.989 orang. Diikuti warga yang belum tamat SD dan tidak sekolah sebanyak 967 orang. Kemudian disusul oleh warganya yang tamat SLTP sebanyak 805 orang, tamat SLTA sebanyak 625 orang dan tamat perguruan tinggi sebanyak 50 orang.

Tabel 4  
Jumlah Penduduk Desa Karangrowo  
Menurut Tingkat Pendidikan Pada Tahun 2009

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat akademi/perguruan tinggi	50 orang
2	Tamat SLTA	625 orang
3	Tamat SLTP	805 orang
4	Tamat SD	3.754 orang
5	Tidak tamat SD	235 orang
6	Belum tamat SD	855 orang
7	Tidak sekolah	112 orang
8	Belum sekolah	628 orang
	Jumlah	7.064 orang

Sumber: Monografi Desa Karangrowo 2009.

Dengan tingkat pendidikan masyarakat desa Karangrowo yang rata-rata masih rendah, berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah pula. Hal ini dapat dilihat dari orientasi pemanfaatan uang, orientasi masa depan dan pola hidup warga desa Karangrowo yang masih sederhana. Tingkat

pendidikan TKI maupun TKW asal desa Karangrowo baik yang sedang bekerja di luar negeri maupun yang pernah menjadi TKI/TKW, dari observasi yang didapatkan bahwa pendidikan mereka umumnya masih tergolong rendah yakni rata-rata lulusan SD dan tidak tamat SD. Hanya sebagian kecil saja TKI/TKW dengan pendidikannya sampai pada jenjang SLTP dan SLTA.

#### **d. Agama**

Dalam bidang keagamaan, masyarakat Desa Karangrowo mayoritas beragama Islam dengan sarana peribadatan yang tersedia di desa berupa 4 buah masjid (milik desa) yang masing-masing secara letak lokasi terdapat di dukuh Krajan 2, dukuh Ngelo 1, dan dukuh Kaliyoso 1. Selain masjid, terdapat tempat peribadatan pemeluk agama Islam yang lain yaitu 16 buah mushola yang wilayahnya tersebar di Desa Karangrowo dan merupakan milik desa/warga setempat.

Sarana peribadatan yang lain adalah dari pemeluk agama Kristen yang menempati posisi kedua dengan jumlah pemeluk agama terbanyak setelah pemeluk agama Islam. Dengan sarana peribadatan berupa satu buah gereja yang berlokasi di dukuh Ngelo dan merupakan milik para pemeluk agama Kristen.

Organisasi sosial keagamaan pada kalangan orang tua (bapak-bapak atau ibu-ibu) terutama yang beragama Islam biasanya disebut dengan majlis ta'lim. Kegiatan keagamaan tersebut dilaksanakan seminggu sekali secara rutin, tempatnya bergiliran dari rumah satu warga ke rumah warga lainnya. Dalam kegiatan majlis ta'lim tersebut kegiatannya adalah pembacaan doa, shalawat, dan yasinan. Sementara sosial keagamaan pada kalangan umat Kristen Desa

karangrowo sendiri adalah melakukan kegiatan ibadah rutin setiap hari minggu di gereja.

Tabel 5  
Jumlah Penduduk Desa Karangrowo  
Menurut Agama yang Dianut Pada Tahun 2009

No	Agama	Jumlah
1	Islam	6.674
2	Kristen	390
3	Katholik	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
	Total	7.064

*Sumber: Monografi Desa Karangrowo 2009.*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemeluk agama Islam merupakan pemeluk agama yang jumlahnya paling banyak diantara pemeluk agama lainnya, yang jumlah pemeluk agamanya mencapai 6.674 orang. Sementara urutan kedua dengan jumlah pemeluk agama yang terbanyak setelah pemeluk agama Islam adalah pemeluk agama Kristen, dengan jumlah pemeluk agama sebanyak 390 orang.

#### **e. Aspek Kehidupan Masyarakat**

##### **1. Kondisi Sosial Budaya**

Desa Karangrowo kecamatan Undaan kabupaten Kudus dikepalai oleh seorang Kepala Desa, Kepala Desa ini bertindak sebagai kepala pemerintahan yang bertugas mengatur dan mengawasi roda pemerintahan desa Karangrowo. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk tanpa melalui perantara dan tekanan dari siapapun. Dalam menjalankan tugas pemerintahan Kepala desa dibantu oleh stafnya yang terdiri dari Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Kaur Kesejahteraan Rakyat dan beberapa ketua RT dan RW. Setiap

dukuh dikepalai oleh Kepala Duku, dibawah duku terdapat RW yang dikepalai oleh Ketua RW dan dibawah RW terdapat RT yang dikepalai oleh ketua RT.

Warga desa Karangrowo dalam kehidupan bermasyarakatnya masih kental dengan adat dan istiadat asli Jawa, misalnya dalam upacara selamat sesuai dengan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan manusia sehari-hari, yaitu selamat dalam rangka lingkaran hidup seseorang, meliputi kehamilan dan kelahiran, khitanan, perkawinan, kematian, serta saat-saat setelah kematian, hari besar Islam, bongkar/mendirikan rumah, menggali sumur, dan hari jadi desa. Selain itu juga terdapat budaya ziarah kubur dan budaya menjenguk (silaturahmi dan bezuk).

Menurut bapak Sutar, salah seorang penduduk asli desa Karangrowo menyatakan bahwa adat istiadat perkawinan masyarakat desa Karangrowo memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan desa sekitarnya. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan hewan kerbau sebagai pelengkap dalam mas kawin yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dinikahinya. Selain mas kawin pada umumnya seperti perhiasan, motor dan seperangkat alat sholat, khususnya bagi keluarga yang mampu. Penggunaan hewan kerbau sebagai pelengkap mas kawin dalam adat perkawinan masyarakat desa Karangrowo menunjukkan simbol yang memiliki arti tertentu yakni kedudukan sosial. Dimana semakin banyak kerbau jumlah kerbau yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan maka kedudukan sosial keluarga semakin tinggi pula dalam pandangan masyarakat setempat sebagai keluarga yang mampu, kaya, atau berkecukupan. Umumnya jumlah kerbau yang

diberikan bagi keluarga memelihara laki-laki yang mampu sejumlah dua ekor, namun bagi keluarga yang tidak mampu hanya seekor. (Hasil wawancara dengan Bapak Sutar pada tanggal 12 Agustus 2010).

Kegiatan masyarakat yang sifatnya sosial juga masih terasa diantara masyarakatnya. Hal ini tampak pada acara gotong royong membongkar atau membangun rumah, membangun fasilitas umum, mendirikan sarana atau prasarana dalam hajatan pernikahan atau khitanan dan merawat mayat. Budaya gotong royong pada masyarakat desa Karangrowo ini, biasa disebut dengan istilah *sambatan*. Dimana pada acara hajatan semua turut membantu atau lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah *rewang*.

Beberapa warga dari seluruh jumlah penduduk yang ada di desa Karangrowo adalah keturunan dan pengikut Samin atau dengan istilah lain disebut "*sedulur sikep*" Komunitas Samin yang ada di desa Karangrowo dan menjadi bagian dari masyarakat desa setempat merupakan kelompok minoritas, karena jumlah mereka yang sedikit yakni sejumlah 168 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 90 orang dan jumlah perempuan sebanyak 78 orang, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 51 KK. Sebagai suatu komunitas, mereka memiliki norma dan ajaran tertentu yang digunakan sebagai pedoman hidup dan kontrol sosial oleh anggotanya. Meskipun komunitas Samin yang menetap dan menjadi bagian dari masyarakat desa Karangrowo ini memiliki norma dan ajaran tertentu, namun mereka tetap patuh dan taat pada peraturan desa yang tidak bertentangan dengan norma dan ajaran yang mereka anut. Selain itu, komunitas Samin juga

berinteraksi baik dengan warga setempat. (Hasil wawancara dengan bapak Nor Hadi selaku Kaur Kesra pada tanggal 12 Agustus 2010).

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi

Mayoritas penduduk Desa Karangrowo bermata pencaharian sebagai petani sendiri (petani pemilik sawah) dan buruh tani. Disamping mata pencaharian lain seperti buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pegawai negeri, pengangkutan, dan pengusaha. Hal ini dikarenakan letak geografis desa Karangrowo yang berada diantara lahan pertanian berupa sawah yang luas dan membentang. Selain itu karena pada umumnya warga masyarakat desa Karangrowo rata-rata memiliki lahan pertanian sendiri, namun untuk petani yang benar-benar menguasai modal berupa lahan pertanian yang luas hanya sebagian kecil saja. Sehingga tidak mengherankan jika sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, khususnya lagi buruh tani. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6  
Jumlah Penduduk Desa Karangrowo  
Menurut Mata Pencaharian Pada Tahun 2009

<b>Jenis pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1. Petani	1.602
2. Buruh Tani	1.874
3. Pengusaha	8
4. Buruh Industri	919
5. Buruh Bangunan	545
6. Pedagang	157
7. Pengangkutan	87
8. Pegawai negeri	36
9. Pensiunan	4
10. Lain-lain	1.832
<b>Jumlah total</b>	<b>7.064</b>

*Sumber: Monografi Desa Karangrowo Tahun 2009*

Petani (pemilik sawah) yang memiliki lahan pertanian luas rata-rata sebagai petani gurem. Kebanyakan buruh tani bekerja menjual jasa (berupa tenaga), kepada mereka (petani pemilik sawah) yang memiliki lahan pertanian luas. Pekerjaan yang biasanya dilakukan sebagai buruh tani misalnya *ngedos* (proses perontokan padi dari batangnya dan biasa dilakukan di sawah), *ngaret* (proses pemotongan atau pembabatan padi), *ulur* (menanam biji pada sebuah tanah yang sudah di siapkan) dan *matun* (upaya membersihkan tanah dari tanaman rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman padi atau lainnya). Penghasilan yang didapatkan oleh buruh tani laki-laki umumnya dua puluh lima ribu rupiah hingga tiga puluh ribu rupiah, sementara untuk buruh tani perempuan penghasilan yang didapatkan sebesar lima belas ribu rupiah, hal ini dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani perempuan lebih ringan dibandingkan dengan buruh tani laki-laki. Lama waktu bekerja buruh tani adalah setengah hari, karena jika petani (pemilik lahan pertanian) menggunakan jasa mereka selama satu hari penuh maka pekerjaan tidak berjalan maksimal karena tenaga mereka sudah berkurang. (hasil wawancara dengan bapak Nor Hadi selaku Kaur Kesra desa Karangrow pada tanggal 12 Agustus 2010).

Dari hasil observasi dan wawancara, sebagian besar TKI/TKW asal desa Karangrowo bermata pencaharian sebagai buruh tani. Penghasilan yang di dapatkan sebagai seorang petani (buruh tani), relatif rendah dan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Akibatnya, sebagian warga desa Karangrowo yang tergolong miskin mengambil keputusan menjadi TKI/TKW sebagai pekerja kasar dan pembantu rumah tangga/pekerja domestik di luar

negeri. Karena penghasilan yang ditawarkan di luar negeri jauh lebih tinggi, dengan tujuan utama untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

### **B. Latar Belakang Kehidupan Sosial-Ekonomi Keluarga TKI/TKW Sebelum Memutuskan Bekerja Di Luar Negeri**

Kemiskinan terjadi bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam aktifitas maupun usaha menjadi sangat terbatas (Masrufah, 2009:1). Dari hasil penelitian (observasi dan wawancara) di Desa Karangrowo, kondisi sosial-ekonomi keluarga warga yang memutuskan bekerja ke luar negeri sebagai buruh migran sebagian besar dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin. Artinya dalam upaya pemenuhan kebutuhan primer, seperti kebutuhan makanan, pakaian, rumah yang sehat dan ideal, pendidikan, dan kesehatan masih dirasa berat belum lagi ditambah dengan tuntutan keluarga akan pemenuhan kebutuhan sekunder, seperti membeli alat transportasi sepeda motor, membeli peralatan rumah tangga (meja, kursi, lemari, tempat tidur, kulkas dan lain-lain), membeli peralatan hiburan keluarga (TV, radio, dan VCD), membeli alat komunikasi seperti HP dan untuk memperbaiki kondisi rumah agar layak huni (sehat dan ideal).

Berdasarkan pada pengamatan warga desa Karangrowo yang tergolong miskin dan memutuskan menjadi TKI/TKW di luar negeri awalnya ditunjukkan dengan kondisi rumah yang masih berada di bawah standart kemakmuran. Seperti

lantai yang berupa tanah, dinding dari kayu atau batu bata tanpa dilapisi semen, tidak adanya fasilitas hiburan di rumah (TV, radio, dan lainnya), sarana prasarana transportasi berupa sepeda, dan tingkat pendidikan yang rendah (SD/tidak tamat SD/bahkan tidak sekolah karena ketiadaan biaya). Hal ini di berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan ibu Suprihatin di rumahnya. Ibu Suprihatin merupakan mantan TKW asal Desa Karangrowo dan pernah bekerja di Arab Saudi, sebagai berikut.

*“Ndek iko mulo apik ngene omahku nduk, wis sak onone ngono iku. Durung kramikan, durong ndue sepeda motor, tembok yo ijeh abangan. Saiki yo alhamdulillah paringono Gusti kecukupan bar kerjo soko Arab iso tuku motor, ndandani omah, tuku sawah karo liyaliyane. Lah opo iso apik ngene omahku nek aku ora mangkat kerjo neng Arab, trus tuku sawah kanggo digarap.”*

Artinya: “Dulu rumahku tidak sebegus ini *nduk* (panggilan ibu Suprihati kepada peneliti), seadanya saja. Belum pasang lantai keramik, belum mempunyai sepeda motor, dinding rumah masih batu bata biasa. Sekarang alhamdulillah di berikan oleh Tuhan rejeki yang cukup, setelah kerja di Arab bisa membeli motor, memperbaiki rumah, beli sawah dan lainnya. Apa bisa sebegus ini rumahku, kalau saya tidak pergi kerja ke Arab dan membeli sawah untuk dikerjakan.” (Hasil wawancara dengan Ibu Suprihatin pada tanggal 13 Agustus 2010).

Faktor yang melatarbelakangi kondisi keluarga yang miskin antara lain, yaitu disebabkan karena lemahnya penguasaan atas aset kepemilikan atas lahan pertanian. Lahan pertanian bagi masyarakat desa Karangrowo merupakan sumber produksi atau mata pencaharian utama bagi warganya, sebaliknya bagi pemilik lahan yang luas merupakan modal yang penting untuk mempertahankan kedudukan sosial di dalam kehidupan masyarakat setempat sebagai tuan tanah dan lebih disegani bila dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki penguasaan atas lahan pertanian.

Sebagai resiko dari kondisi tersebut, keluarga yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri harus bekerja pada tuan tanah (orang yang memiliki modal berupa lahan pertanian luas) untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keberadaan pemilik modal lahan pertanian luas, dalam kehidupannya akan semakin ditunjang oleh keterlibatan keluarga yang miskin yang bekerja dilahanya, artinya kelonggaran yang berhubungan dengan berapa jumlah upah yang akan diberikan pada orang yang bekerja ditentukan oleh pemilik lahan yang bersangkutan.

Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Suyanto dan Narwoko (2004:159), bahwa kemiskinan struktural biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup miskin dengan mereka yang hidup kaya. Meskipun golongan miskin (buruh tani) adalah pihak mayoritas, dalam realita mereka tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya, karena posisi buruh tani bergantung pada pemilik sawah atas jumlah upah yang diterima. Sementara pihak kaya (pemilik sawah), yang lebih minoritas biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol segala aspek kehidupan terutama aspek ekonomi yang ada pada masyarakat yang bersangkutan khususnya dalam hal upah kerja. Kemiskinan struktural sendiri terjadi disaat hubungan-hubungan kerja/usaha antar kelompok masyarakat dalam sistem sosial yang lebih luas melahirkan pola ketidakmerataan dalam mendapatkan sumber-sumber ekonomi dan ketidakadilan dalam pembagian pendapatan (Mustofa, 2005:45). Seperti kemiskinan yang dialami oleh kebanyakan warga desa Karangrowo.

Untuk negara-negara tertentu seperti halnya Indonesia kemiskinan umumnya terjadi di daerah-daerah pedesaan, sementara orang-orang kota berebut menguasai sumber ekonomi, seperti status sosial, lapangan pekerjaan tertentu dan sebagainya (Abdulsyani, 2002:191). Ekonomi memegang peranan penting dalam suatu tatanan kehidupan dan mayoritas masyarakat pedesaan, penghidupan ekonominya berpangkal pada kegiatan pertanian. Kepemilikan tanah (sawah dan ladang) yang sempit mengkondisikan masyarakat pedesaan hanya mencukupi kebutuhan pokok saja. Terlebih lagi bagi kaum buruh tani yang tugasnya bekerja menggarap sawah pertanian namun tidak memiliki lahan pertanian sendiri, upah yang mereka terima relatif rendah dan tidak mampu menutupi kebutuhan hidup yang semakin lama semakin kompleks. Sebagaimana dikemukakan oleh Wijaksana (2005:101), kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aspek penguasaan tanah dan kemampuan memobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian. Sehingga tingkat pendapatan rumah tangga petani ditentukan oleh luas tanah pertanian yang secara nyata dikuasai.

Sawah sebagai sumber penghidupan keluarga oleh mayoritas warga desa Karangrowo yang bermata pencaharian sebagai petani dan memiliki arti penting karena dari sawah petani beserta keluarganya dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, diungkapkan oleh salah seorang informan sebagai berikut.

*“Wong kene ki umume kerjo dadi tani. Nek gak ndue sawah dewe yo kerjo neng wong liyo seng ndue sawah okeh, dadi buruh. Akeh kok seng koyo ngono iku. Lah wis meh piye neh, nek ora kerjo dadi tani yo meh kerjo opo maneh wong sing di isoni cuman iku tok. Yo ancen rekoso, kerjone abot bayarane yo pas-pasan. Paleng yo cukup kanggo butoh mangan, ora cukup nek kanggo nyukupi butoh sing liyan-liyane. Po maneh nek ndue*

*sawah mung sitek trus ketambahan anak okeh, wis lah sawah entek di bagi-bagi. Paling enak yo ancen sing sawahe okeh, makmur. Ndue garapan sawah okeh, hasile yo podo wae okeh.”*

Artinya:“Orang sini pada umumnya bekerja sebagai petani. Kalau tidak punya sawah ya kerja pada orang yang punya tanah banyak, jadi buruh tani. Banyak yang seperti itu. Mau bagaimana lagi, kalau tidak kerja jadi tani ya mau kerja apa lagi kalau yang bisa dikerjakan cuma itu saja. Memang berat pekerjaannya, bayarannya juga sedikit. Paling juga cukup buat makan, tidak cukup untuk kebutuhan lain-lainnya. Apalagi kalau punya sawah hanya sedikit lalu anaknya banyak, ya sudah habis sawahnya dibagi rata. Paling enak ya yang punya banyak sawah, hidupnya makmur. Punya garapan sawah banyak, hasile juga banyak.”(Hasil wawancara dengan Bapak Sutar pada tanggal 13 Agustus 2010).

Kepemilikan sawah (tanah/lahan) pertanian yang sedikit, secara tidak langsung telah mengkondisikan masyarakat desa Karangrowo sebagian hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan keluarga yang sifatnya pokok saja (makan, pakaian, dan tempat tinggal yang sangat sederhana). Meskipun ada warga Desa Karangrowo yang memiliki lahan pertanian yang luas, sehingga mampu dalam memenuhi segala kebutuhan keluarga secara ideal. Namun jumlahnya hanya sebagian kecil saja. Semakin bertambahnya jumlah anggota keluarga, juga mengakibatkan penguasaan atas lahan dari masing-masing keluarga buruh tani di desa Karangrowo menjadi semakin sempit. Bahkan ada yang tidak memiliki lahan pertanian sama sekali. Sebab kemampuan warga masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah untuk membeli dan memiliki lahan pertanian sangat terbatas, karena harga lahan pertanian yang sangat mahal.

Kemiskinan yang dialami oleh sebagian warga desa Karangrowo tidak hanya disebabkan oleh sempit atau tidak memilikinya lahan pertanian sebagai aset produksi sendiri, melainkan juga dikarenakan oleh tingkat pendidikan warganya yang relatif rendah. Emil Salim dalam Supriatna (1997:82) menyatakan bahwa

karakter kelompok miskin diantaranya tidak memiliki aset produksi sendiri dan tingkat ketrampilan juga pendidikan yang relatif rendah/tidak memadai.

Rendahnya tingkat pendidikan warga atau seseorang merupakan salah satu penyebab dari kondisi keluarga yang miskin. Sebab bagaimanapun juga pendidikan memiliki peran penting bagi seseorang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depannya. Semakin rendah pendidikan seseorang maka semakin sedikit pula akses kehidupan yang dapat di capai, di berbagai macam bidang kehidupan misal menyempitnya peluang kerja/usaha (wilayah pekerjaan biasanya terbatas pada sektor informal dengan penghasilan rendah dan pekerjaan berat seperti pekerja kasar atau pembantu rumah tangga) kemudian mengakibatkan kesehatan rendah, investasi untuk masa depan rendah, dan kesejahteraan keluarga yang rendah pula.

Demikian pula dengan kondisi sebagian warga desa Karangrowo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagian besar warganya berpendidikan relatif rendah dengan didominasi oleh tamatan SD. Pendidikan merupakan faktor yang seringkali memiliki peran penting dalam memahami proses migrasi. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depannya. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan seseorang migran, bahwa penduduk yang meninggalkan daerah asalnya umumnya adalah yang berpendidikan relatif tinggi sementara yang tidak bisa menulis dan membaca suka tinggal di kampung asal (Connell dan Khan dalam Nasution, 2001:41).

Pernyataan yang menyatakan bahwa umumnya penduduk yang melakukan migran adalah mereka yang berpendidikan tinggi, sedangkan yang berpendidikan rendah lebih suka tinggal di kampung asalnya ternyata tidak sepenuhnya benar dan sesuai dengan realitas yang ada di desa Karangrowo. Menurut bapak Nor Hadi selaku kaur kesra desa Karangrowo menyatakan bahwa umumnya warga desa Karangrowo yang memiliki motivasi untuk melakukan migrasi ke luar negeri sebagai TKI/TKW adalah mereka yang memiliki pendidikan relatif rendah (SD atau tidak tamat SD) bahkan beberapa TKI/TKW asal desa Karangrowo mengaku tidak bersekolah sama sekali. (Hasil wawancara dengan Bapak Nor Hadi pada tanggal 15 Agustus 2010).

Fakta bahwa umumnya pendidikan TKI yang ke luar negeri relatif rendah di perkuat berdasarkan hasil wawancara dengan warga desa Karangrowo yang pernah menjadi TKW sebanyak 3 kali di Arab Saudi bernama Ibu Kurniati. Sebagai berikut.

*“Sekolah ku mbiyen cuma tamat SD tok mbak. Tapi yo alhamdulillah ijeh iso melu kerjo neng Arab. Soale krungu-krungu kan nek kerjo neng luar negeri kan rak entok tamatan SD, kudune minimale jare lulusan SMP. Seng tau mangkat kerjo neng Arab sak rombongan mbek aku yo roto-roto sekolahe tamat SD, malah kadang ono seng rak tamat SD kok. Halah rak perduli, penting bayar trus iso mangkat. Lah nek tetep neg kene yo kere aku, rak iso tuku sawah trus sekolah yo cuman tamatan SD ki yo ameh kerjo opo neng kene nek ora tani. Lah tani nek ndue sawah, nek gak ndue ameh lapo. Lah saiki kerjo mbatil neng pabrik wae kudune tamat SMA kok. Lah tau kerjo dadi pembantu neng omahe wong, bayarane yo sitik. Podo-podo dadi pembantu, yow is enak kerjo neg Arab ra bayarane luwih okeh.”*

Artinya: “Pendidikan saya dulu hanya tamat SD saja mbak. Tapi alhamdulillah saya bisa kerja di luar negeri, merasa untung sekali saya. Padahal katanya dengar-dengar kalau kerja di luar negeri kan tidak boleh SD, seharusnya lulusan SLTP. Yang pernah berangkat bareng saya (rombongan) rata-rata pendidikannya juga ya sama, biasanya SD. Rak

perduli aku, penting bayar trus bisa berangkat. Lah kalau tetap di sini (di desa) ya bisa miskin saya, tidak bisa beli sawah, sekolah juga tamat SD saja mau kerja apa kalau tidak tani. Tapi tani kalau tidak punya sawah ya yang dikerjakan apa. Buruh tani terus, ya berat kerjanya selain itu upahnya juga sedikit. Kalau kerja yang lainnya seperti buruh pabrik sekarang saja minimal SMA. Kerja jadi pembantu dirumah orang juga saya pernah, tapi kalau sama-sama jadi pembantu tapi bayarannya di Arab lebih banyak ya saya milih ke Arab saja.”(Hasil wawancara dengan Ibu Kurniati pada tanggal 15 Agustus 2010).

Oleh warga desa Karangrowo dengan tingkat pendidikan yang rendah, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghasilan tinggi dirasakan sangat sulit. Dengan pendidikan rendah di tambah tidak dimilikinya ketrampilan yang memadai, pekerjaan yang mampu dikerjakan di desa hanya terbatas pada bidang pertanian. Sementara kebutuhan hidup semakin lama semakin bertambah dan penghasilan sebagai seorang buruh tani relatif rendah, sehingga kebutuhan keluarga tidak mampu terpenuhi apabila hanya dengan mengandalkan penghasilan dari sektor pertanian sebagai buruh tani terlebih lagi sifatnya musiman. Hanya mampu mencukupi sebagian kecil kebutuhan keluarga (kebutuhan primer). Beberapa warga lainnya berusaha mencari tambahan di luar pekerjaan tani seperti menjadi buruh industri dan buruh bangunan di kota. Namun tetap saja, seberapa besar dan banyaknya upaya yang dilakukan oleh warga desa Karangrowo dalam mencari tambahan penghasilan baik di desa maupun di kota-kota besar dalam negeri, penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan mereka dirasa masih belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Berbeda halnya jika mereka bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri. Meskipun pendidikan mereka relatif rendah dan tanpa ketrampilan yang memadai, namun penghasilan yang dijanjikan jauh lebih tinggi daripada di daerah asal.

Salah seorang warga desa Karangrowo yang pernah bekerja sebagai TKW di Arab yakni Ibu Kurniati, mengungkapkan bahwa gaji yang diterima jika bekerja di luar negeri sekitar 2 hingga 2,5 juta per bulan untuk pembantu rumah tangga (TKW)/2 hingga 4 juta per bulan untuk bekerja di ladang (TKI). Sedangkan upah yang diterima sebagai buruh tani hanya sebesar lima belas hingga dua puluh lima ribu dalam sehari. Itupun tidak berlangsung setahun penuh karena tergantung pada musim tani juga. (Hasil wawancara dengan Ibu Kurniati pada tanggal 1 September 2010).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Karangrowo yang lemah (miskin) dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, penguasaan atas lahan/tanah pertanian yang sempit, dan upah yang rendah sebagai buruh tani. Pada akhirnya memaksa bagi sebagian warganya baik laki maupun perempuan untuk melakukan migrasi ke luar negeri. Tujuan warga desa Karangrowo melakukan migrasi ke luar negeri tidak lain adalah bekerja sebagai TKI/TKW dengan harapan gaji yang tinggi.

Lee (2000:5-6) mengatakan bahwa migrasi adalah gerak penduduk dari satu tempat ke tempat lain, baik secara permanen maupun secara semi permanen. Menurut Ahmadi (2003:38) bahwa migrasi adalah gejala gerak horizontal untuk pindah tempat tinggal dan pindahannya tidak terlalu dekat, melainkan melintasi batas administrasi, pindah ke unit administrasi lain, misalnya migrasi antar negara.

Faktor yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi menurut Lee (2000:6), terutama *push-pull factors* yaitu migrasi yang disebabkan oleh faktor-faktor pendorong di negara asal seperti faktor kemiskinan,

keterbatasan lahan dan faktor-faktor penarik di negara tujuan (khususnya peluang-peluang ekonomi yang lebih baik). Selain faktor lainnya seperti rintangan-rintangan yang menghambat dalam migrasi serta faktor-faktor pribadi.

Proses migrasi itu terjadi apabila seseorang mengalami tekanan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikolog di tempat ia berada. Tiap-tiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga suatu wilayah oleh seseorang dinyatakan sebagai wilayah yang dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan orang lain mengatakan tidak. Selain itu, Terjadi perbedaan nilai kefaedahan wilayah antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Apabila tempat yang satu dengan tempat yang lain tidak ada perbedaan nilai kefaedahan wilayah, tidak akan terjadi proses migrasi (Munir, 1981:178-180).

Secara teoritis volume migrasi (internal/eksternal) paling sedikit ditentukan oleh tiga faktor. Pertama, faktor politik yang meliputi birokrasi dan berbagai prosedur yang dilalui migran. Kedua, faktor ekonomi yang meliputi latar belakang ekonomi migran, biaya migrasi dan upah. Ketiga, aspek aksesibilitas termasuk aksesibilitas transportasi dan jarak migrasi. Diantara ketiga aspek tersebut, aspek ekonomi merupakan aspek yang paling menonjol pengaruhnya terhadap volume migrasi keluar. Tekanan ekonomi di daerah asal menyebabkan migran mencari solusi alternatif untuk tetap bertahan (Haris, 2005:90).

Tekanan ekonomi berupa kemiskinan akibat sempitnya penguasaan lahan pertanian yang dimiliki, upah yang rendah sebagai buruh tani, sempitnya lapangan kerja di desa dan sekaligus faktor kesempatan kerja yang terbatas. Di mana tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuan warga

desa Karangrowo dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, selain bekerja di sektor pertanian sebagai buruh tani. Merupakan faktor utama pendorong migrasi oleh sebagian warga desa Karangrowo ke luar negeri, untuk menjadi TKI/TKW.

Selain itu juga, ada faktor pendorong lainnya yang membuat volume buruh migran asal desa Karangrowo semakin lama semakin meningkat. Meskipun berbagai persoalan telah banyak dialami oleh TKI di luar negeri seperti yang banyak diberitakan di televisi, koran, maupun media lainnya, namun hal itu tidak mengurangi minat warga desa Karangrowo untuk bekerja di luar negeri. Faktor samping lainnya tersebut, antara lain; peran jaringan migrasi (bujukan calo tenaga kerja), dukungan keluarga, serta lingkungan sekitar tempat tinggal berupa cerita, ajakan, dan keberhasilan tetangga yang pernah menjadi TKI/TKW.

Faktor penarik bagi sebagian warga desa Karangrowo yang memutuskan bekerja ke luar negeri adalah adanya peluang kerja dengan gaji yang tinggi di negara tujuan migrasi dibandingkan dengan gaji yang diperoleh sebagai buruh tani di desa, seperti apa yang telah diungkapkan oleh Ibu Kurniati sebelumnya bahwa upah yang diterima di desa sebagai buruh tani jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan upah yang diterima di luar negeri sebagai TKI/TKW.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa negara tujuan TKI/TKW asal desa Karangrowo antara lain Timur Tengah (Qatar, Kuwait, dan Arab Saudi), Malaysia, Hongkong, dan Taiwan. Negara Malaysia menjadi negara tujuan utama dan mendominasi oleh TKI asal desa Karangrowo ini, sedangkan bagi TKW negara tujuan utama yang mendominasi di antara negara lainnya adalah Arab Saudi.

Alasan para TKI asal desa Karangrowo memilih negara Malaysia sebagai negara tujuan diantaranya karena jarak yang lebih dekat, budaya dan agama yang hampir sama. Sedangkan faktor utamanya karena untuk masuk dan bekerja ke negara tersebut lebih mudah dibandingkan dengan dengan negara-negara tujuan TKI yang lainnya. Hal ini terutama di rasakan oleh mereka yang memilih menjadi TKI secara ilegal. Selain itu karena kebutuhan akan tenaga kerja kasar (laki-laki) oleh negara Malaysia cukup besar sehingga mudah mendapatkan pekerjaan di tambah gaji yang dijanjikan cukup tinggi.

Sementara yang menjadi alasan TKW asal Desa Karangrowo memilih kawasan Timur Tengah khususnya negara Arab Saudi diantaranya karena gaji yang tinggi dan adanya peluang kerja sebagai pembantu rumah tangga di negara tersebut yang tinggi. Jika dibandingkan di Malaysia, kebanyakan TKW bekerja di pabrik dan pekerjaan lebih berat dengan gaji yang lebih rendah dibandingkan menjadi pembantu rumah tangga seperti di Arab Saudi.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan salah seorang mantan TKI asal Desa Karangrowo yang pernah bekerja di Malaysia yakni Bapak Kahono, sebagai berikut.

*“Akeh-akehe cah lanang soko deso kene ki kerja neng Malaysia mbak, soale luwih cerak dibanding koyo Arab. Liyane kuwi yo bahasane podo wae karo negoro dewe, nek koyo Arab, Taiwan, trus liyan-liyane leren sinau bahasane disek ra nek gak sinau ora mudeng ngomong opo. Nek kanggo cah lanang ki gampang golek kerjo neng Malaysia, okeh trus bayarane yo lumayan gedhe. Biasane kerjo dadi buruh perkebunan, buruh bangunan, buruh pabrikan, nek sopir ono tapi sitik. Nek cah wadon, akehe neng Arab Saudi. Soale neng Arab kui akeh dibutuhno pembantu rumah tangga ketimbang neng malaysia. Trus nek cah wadon kerjo neng Malaysia ki rekoso, akehe kerjo neng pabrik. Wis kerjone abot, bayarane yo luwih akeh nek kerjo neng Arab.”*

Artinya :“Kebanyakan laki-laki dari desa sini bekerja di Malaysia, karena jaraknya lebih dekat dibandingkan seperti Arab. Selain itu juga bahasanya tidak jauh berbeda dengan bahasa di Negara sendiri, berbeda kalau seperti Arab, Taiwan, dan lain-lainnya perlu belajar bahasanya dulu kalau tidak belajar tidak tau mau bicara apa. Kalau buat laki-laki mudah untuk mendapatkan pekerjaan di Malaysia banyak macamnya dan gajinya juga lumayan besar. Biasanya kerja menjadi buruh perkebunan, buruh bangunan, buruh pabrikan, kalau sopir ada tetapi sedikit. Kalau perempuan, kebanyakan ke Arab Saudi. Soalnya disana banyak dibutuhkan pembantu rumah tangga. Kalau perempuan kerja di Malaysia itu berat, kebanyakan bekerja di pabrik. Sudah kerjanya berat, gajinya juga lebih besar jika bekerja di Arab sebagai pembantu rumah tangga.”(Hasil wawancara dengan Bapak Kahono tanggal 20 Agustus 2010).

Gaji yang tinggi dan banyaknya peluang kerja yang sesuai dengan kemampuan warga desa Karangrowo di negara tujuan seperti Malaysia dan Arab Saudi, hingga saat ini tetap menjadi faktor penarik utama bagi buruh migran asal desa Karangrowo untuk melakukan migrasi. Selain faktor penarik lainnya seperti latar belakang budaya yang memiliki beberapa kesamaan (bahasa dan agama). Meskipun Negara Malaysia dan Arab Saudi menjadi negara tujuan yang mendominasi buruh migran asal desa Karangrowo, namun beberapa warga desa Karangrowo yang menjadi TKI/TKW juga ada yang bekerja di Hongkong atau Taiwan. Namun jumlahnya tidak sebanyak yang bekerja ke Malaysia dan Arab Saudi, hal ini dikarenakan untuk menjadi TKI/TKW seperti di Hongkong atau Taiwan umumnya lulusan SMA. Sementara kebanyakan warga desa Karangrowo yang berminat bekerja ke luar negeri adalah mereka yang pendidikannya relatif rendah seperti SMP ke bawah.

Secara teoritis motivasi melakukan migrasi setiap orang berbeda-beda. Secara umum dapat dijelaskan dari perspektif individual dan struktural (Stalker dalam Nasution, 1999:43). Dari perspektif individual, migrasi dipandang sebagai

keputusan rasional. Setiap individu mempunyai berbagai macam pengetahuan dan pilihan dalam upaya mencapai dan memperbaiki kesejahteraan. Menurut perspektif struktural, migrasi dipandang sebagai keputusan yang berkaitan dengan adanya tekanan kondisi eksternal yang dihadapi para migran. Struktur sosial, ekonomi dan politik dapat menekan kehidupan pekerja di negara asal. Tekanan keterbatasan peluang kerja dan kebutuhan ekonomi keluarga (kemiskinan) barangkali dapat mendorong para pekerja untuk pergi ke negara tujuan. Keputusan migran dapat terjadi sebagai akibat kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup para migran (Nasution, 1999:44).

Migran biasanya memiliki alasan tertentu yang menyebabkan buruh migran meninggalkan kampung halamannya dan kemudian memilih tempat-tempat yang dianggap dapat memenuhi keinginan yang kurang atau tidak terpenuhi kalau sekiranya tetap bertahan ditempat asal. Alasan utama migran meninggalkan negara asal adalah faktor ekonomi, terutama disebabkan sukarnya mendapat pekerjaan serta mewujudkan keinginan untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi (Nasution, 1999:77).

Melakukan migrasi ke luar negeri oleh warga asal Desa Karangrowo menuju negara-negara maju yang lebih baik secara ekonomi seperti Malaysia dan Arab Saudi untuk menjadi TKI maupun TKW pada gilirannya menjadi alternatif paling rasional untuk keluar dari tekanan ekonomi. Sekaligus sebagai jawaban terhadap adanya sejumlah perbedaan tempat yang begitu mencolok, terlebih faktor ekonomi berupa adanya kesenjangan upah yang tinggi antara daerah asal (desa Karangrowo) dengan negara tujuan migrasi. Sebagian warga asal desa

Karangrowo yang memilih bekerja sebagai TKI/TKW berharap dengan bekerja di luar negeri mendapatkan penghasilan lebih besar dari penghasilan sebelumnya yang didapatkan di daerah asal. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

### **C. Peran Calo Tenaga Kerja dalam Proses Penyaluran TKI/TKW Asal Desa Karangrowo ke Luar Negeri**

Migrasi angkatan tenaga kerja ke luar negeri pada awalnya dikenal dengan sebutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), yang mendapat sebutan sebagai TKI adalah laki-laki. Namun, hal tersebut mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman. Ketika muncul angkatan kerja wanita ke luar negeri, maka muncullah istilah baru yang disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Abdullah, 2003:174).

Untuk bekerja sebagai TKI/TKW ke luar negeri tidaklah mudah. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi, selain itu proses yang harus dilalui juga tidak semudah yang dibayangkan. Berdasarkan UU Republik Indonesia No.39 pasal 10 tahun 2004, bahwa penempatan TKI dilakukan oleh lembaga pelaksana yang terdiri dari PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penempatan TKI ke luar negeri.

Selain dilakukan oleh aparat instansi resmi pemerintah, penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk menjadi TKI maupun TKW juga melibatkan calo-calo tenaga kerja dalam proses di dalamnya. Baik calo tenaga kerja yang ditunjuk oleh PPTKIS resmi maupun calo tenaga kerja yang sifatnya ilegal.

Beberapa PPTKIS membutuhkan jasa calo tenaga kerja untuk memenuhi tuntutan akan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu. Keterbatasan PPTKIS terutama dalam hal tenaga lapangan menyebabkan perusahaan yang bersangkutan harus tergantung pada jasa calo tenaga kerja yang berarti juga “menggadaikan” kreadibilitas perusahaannya. Jalan ini diambil karena jika dalam batas waktu yang telah ditentukan perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan akan calon tenaga kerja, maka resiko denda pun juga terpaksa harus dihadapi. Untuk itu, dalam berbagai proses perekrutan oleh calo-calo tenaga kerja yang bertindak sebagai petugas lapangan perusahaan tidak bertanggung jawab atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan karena dianggap sebagai resiko calon tenaga kerja migran (Haris, 2005:69-70).

Moeliono (1994:147) mengartikan calo sebagai orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya berdasarkan upah. Ada berbagai macam jenis calo yang ada di masyarakat, salah satunya adalah calo tenaga kerja yang ikut terlibat dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri asal Desa Karangrowo ini.

Berdasarkan hasil penelitian, warga desa Karangrowo yang pernah menjadi TKI/TKW di luar negeri, dalam prosesnya dibantu oleh calo tenaga kerja. Baik yang memilih jalur illegal maupun jalur legal melalui PPTKIS sekalipun, tidak lepas daripada keterlibatan calo tenaga kerja.

Keberadaan calo tenaga kerja yang menurut pemerintah meresahkan, justru diharapkan mampu mempermudah jalannya proses menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri oleh calon TKI/TKW asal desa Karangrowo. Keinginan

yang kuat untuk lepas dari kemiskinan dengan tawaran gaji tinggi di negara-negara tujuan tenaga kerja asal Indonesia membuat keberadaan calo tenaga kerja memiliki peran yang dibutuhkan oleh calon TKI/TKW asal desa Karangrowo tanpa memperdulikan status calo tenaga kerja di mata hukum yang masih tergolong illegal serta akibat yang dapat ditimbulkan nantinya. Tingkat pengetahuan dan pendidikan yang relatif rendah oleh kebanyakan calon TKI/TKW membuat posisi calo tenaga kerja semakin kuat sebagai pihak yang dianggap mampu membantu dalam mewujudkan keinginan warga asal desa Karangrowo yang hendak menjadi TKI/TKW di luar negeri. Dimana kebanyakan calon TKI/TKW asal desa Karangrowo ini tidak mengetahui prosedur dan dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi TKI/TKW di luar negeri. Sehingga segala urusan dari pembiayaan dan pengurusan dokumen yang dibutuhkan serta persyaratan lainnya, dipercayakan oleh calon TKI/TKW kepada calo tenaga kerja. Karena calo dianggap lebih mengetahui prosedur untuk menjadi TKI/TKW di luar negeri oleh warga desa Karangrowo yang ingin bekerja ke luar negeri. Seperti yang diungkapkan oleh Rita (salah seorang TKW asal desa Karangrowo yang pernah bekerja ke Arab Saudi), sebagai berikut.

*“Aku neng Arab diewangi pak Supalal. Ngerti nek pak Supalal iso ngewangi mbantu kerjo neng luar negeri yo soko cah kene sing tau kerjo neng luar negeri trus podo wae diewangi pak Supalal kui. Soale aku rak reti carane piye, daftare neng ndi. Sekolahku yo mbek tamat SMP, wedi meh ngurus-ngurus dewe. gak mudeng opo-opo. Yo wis mumpung ono sing ngejak trus iso ngewangi, tak serahno kabeh urusane mbek Pak Supalal kui. Sisan wonge yo apik, cah kene sing diewangi yo rak pernah ono keno masalah mbek pak kui. Kabeh urusan yo lancar sampe kerjo neng luar negeri. Kan kadang ono si seng warga kene dewe ngakune iso ngewangi kerjo neng luar negeri, wis mbayar nanging gak mangkat-mangkat.”*

Artinya:“Saya bekerja ke Arab dibantu Pak Supalal. Tau kalau Pak Supalal bisa membantu untuk bekerja di luar negeri ya dari warga sini yang juga pernah kerja ke luar negeri dan dibantu juga dengan Pak Supalal itu. Karena saya tidak tau caranya gimana, daftarnya juga dimana. Ya sudah, kebetulan ada yang ngajak dan bisa bantu, saya serahkan semua urusannya pada Pak Supalal. Sekalian orangnya juga baik, warga sini yang pernah bekerja ke luar negeri lewat Pak supalal juga tidak pernah ada yang punya masalah dengannya. Semua urusan juga lancar samapi kerja ke luar negeri. soalnya terkadang ada juga warga sini yang mengaku bisa membantu untuk kerja ke luar negeri, sudah bayar tapi tidak juga berangkat-berangkat.” (Hasil wawancara dengan Rita pada tanggal 29 Agustus 2010).

Sesuai pernyataan Rita diatas, bahwa ketidaktahuan mengenai prosedur menjadi TKI di luar negeri merupakan alasan utama bagi warga desa Karangrowo menggunakan jasa calo tenaga kerja dalam prosesnya. Selain itu, alasan lain yang tidak kalah pentingnya dalam mendorong warga desa Karangrowo menggunakan jasa calo tenaga kerja adalah pengalaman keluarga atau kerabat yang sudah pernah menjadi TKI/TKW di luar negeri dengan melalui jasa calo tenaga kerja yang bersangkutan dan kemudian sukses tanpa kendala apapun, serta kemudahan dalam mengurus segala sesuatu persyaratan yang diperlukan untuk menjadi TKI/TKW di luar negeri dibandingkan jika mengurus sendiri.

Peran penting calo tenaga kerja terutama terlihat dalam tiga hal. Pertama, pada saat perekrutan calon migran; kedua, peran calo tenaga kerja sebagai calo yang menawarkan jasa tenaga kerja kepada pengguna tenaga kerja dan ketiga, pendanaan awal bagi migran yang tidak memiliki biaya dengan memberikan pinjaman (Abdurahman, 2006:120).

Bery mendefinisikan peran sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Bery menjelaskan bahwa terdapat dua macam harapan dari masyarakat, yaitu harapan-

harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, serta harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap individu-individu yang berhubungan dengannya dan menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya (David Bery, 2003:105-107).

Peran dimaknai sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang diharapkan dan dipentaskan oleh individu selaku aktor yang berkedudukan di dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka kaitannya dengan calo tenaga kerja yang terlibat dalam proses penyaluran TKI/TKW asal desa Karangrowo ke luar negeri merupakan individu selaku aktor yang menjalankan suatu peran tertentu. Peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni, calo sebagai perantara antara calon TKI/TKW dengan pengguna jasa tenaga kerja (PPTKIS/majikan di negara tujuan). Harapan daripada calon TKI/TKW asal desa Karangrowo yang hendak bekerja ke luar negeri dengan menggunakan jasa calo tenaga kerja adalah agar proses bekerja ke luar negeri dapat tercapai dengan mudah dan sebagai imbalannya calo tenaga kerja yang bersangkutan mendapatkan upah. Peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri dapat dijelaskan, sebagai berikut.

### **1. Peran Calo Tenaga Kerja dalam Proses Perekrutan dan Penyebaran Informasi**

Calo tenaga kerja pada umumnya menarik simpati calon migran dari kelompok masyarakat ekonomi bawah dan menarik mereka kedalam jaringan yang sangat sulit untuk dihindari. Calo tenaga kerja Indonesia menciptakan suatu keadaan akan adanya ketergantungan oleh calon migran. Hal itu menyebabkan

calon migran tidak mampu menghindar (Abdurahman, 2006:120). Haris dalam Abdurahman (2006:102), menyatakan bahwa kelompok migran yang direkrut menjadi TKI di luar negeri adalah kelompok migran yang memiliki pekerjaan tetap disektor pertanian tetapi penghasilannya rendah dan kelompok migran yang tidak memiliki penghasilan tetap/tidak memiliki lahan garapan memadai/bahkan tidak memiliki lahan garapan sama sekali.



Gambar 2. Peneliti mewawancarai Kaur Kesra Desa Karangrowo (Bapak Nur Hadi)

(Sumber: dokumentasi pribadi, 30 Agustus 2010)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Hadi pada tanggal 30 Agustus 2010, menyatakan bahwa warga desa Karangrowo yang direkrut menjadi calon TKI/TKW adalah mereka baik laki-laki maupun perempuan dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Calon buruh migran asal desa Karangrowo yang direkrut biasanya adalah warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap (buruh serabutan), memiliki pekerjaan tetap di sektor pertanian tetapi penghasilan sedikit (buruh tani), warga yang baru saja lulus sekolah SMP dan sedang mencari

pekerjaan, serta pengangguran. Biasanya warga mudah tertarik terutama dengan iming-iming gaji tinggi dan kemudahan mendapatkan pekerjaan, serta kemudahan dalam mengurus segala proses untuk bekerja di luar negeri. Calo tenaga kerja yang menyalurkan warga desa Karangrowo menjadi TKI/TKW di luar negeri, dalam proses perekrutannya seringkali tanpa meminta ijin secara resmi kepada Kepala Desa Karangrowo terlebih dahulu. Sehingga kantor kelurahan Desa Karangrowo tidak mengetahui jumlah secara pasti warganya yang menjadi TKI/TKW di luar negeri karena tidak terdaftar secara resmi.



Gambar 3. Peneliti mewawancarai salah satu calo tenaga kerja (Bapak Fadlan), yang bekerja sama dengan PPTKIS (Sumber: dokumentasi pribadi, 27 Agustus 2010)

Menurut Bapak Fadlan (calo tenaga kerja yang bekerja sama dengan salah satu PPTKIS di Jakarta) mengungkapkan, bahwa dia lebih suka merekrut pihak perempuan yang hendak bekerja ke luar negeri dibandingkan merekrut pihak laki-laki. Karena pihak perempuan itu lebih mudah penanganannya dibandingkan dengan laki-laki, di mana laki-laki lebih suka melawan (berontak) baik kepada majikan atau kepada calo tenaga kerja jika pekerjaan dan gaji yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan. Pihak perempuan lebih mudah penanganannya

karena perempuan lebih menurut dan tidak berani melawan (berontak) jika terjadi permasalahan atau ketidaksesuaian dalam pekerjaan. Karena jika terjadi permasalahan seperti TKI/TKW yang kabur dari majikan, maka akan menjadi masalah juga bagi PPTKIS yang menyalurkan. Calo tenaga kerja yang membawa dari desa juga ikut terkena dampaknya (di marahi pihak PPTKIS). Selain karena jumlah perempuan di daerah lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki dan permintaan akan tenaga kerja perempuan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri yang tinggi. Bahkan terkadang PPTKIS sudah mendapatkan permintaan sejumlah tenaga kerja perempuan dari pihak luar negeri seperti Arab Saudi, untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. (Hasil wawancara dengan Pak Fadlan pada tanggal 27 Agustus 2010).

Perekrutan dan penyebaran informasi mengenai peluang kerja menjadi tenaga kerja di luar negeri di lakukan oleh calo tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, calo tenaga kerja melalui keluarga calon TKI/TKW. Pendekatan ini dilakukan oleh calo tenaga kerja dengan harapan bahwa pihak keluarga akan memberikan dorongan kepada calon TKI/TKW agar mau di berangkatkan ke negara tujuan. Kedua, dengan pendekatan secara langsung melalui calon TKI/TKW. Informasi yang diberikan antara lain mengenai kesempatan kerja dengan gaji tinggi di negara tujuan kerja (Abdurahman, 2006:120). Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Suprihatin mengenai proses perekrutan dan informasi yang diberikan pada calon buruh migran asal desa Karangrowo.

*“Pak Supalal kan omahe neng ndeso Kutuk, lah rene ki nek pendak tak kandani ono bocah kene seng ameh mangkat. Kan aku dikon ngewangi*

*golek wong seng gelem kerjo neng luar negeri. ben entuk wong siji aku dibayar limang atos ewu, dak lumayan ra. Trus Pak supalal jarene entuk soko PPTKIS ki sejuta limang atos. Biasane kadang yo rene dewe, nawani cah kene sopo seng gelem kerjo neng luar negeri mengko diewangi trus barang menahi informasi kerjo neng luar negeri piye, gajine, carane.”*

Artinya: “Pak Supalal rumahnya itu di desa Kutuk, kesini tiap saya kabari kalau ada warga sini yang pengen berangkat ke luar negeri. soalnya saya dimintai tolong bantu untuk nyari orang sini yang mau bekerja ke luar negeri. tiap satu orang, saya dibayar lima ratus ribu, lumayan besar. Kalau Pak Supalal sendiri, katanya mendapat satu juta lima ratus dari PPTKIS yang ada di Jakarta. Pak Supalal juga kadang kesini sendiri, nawari orang sini yang mau kerja di luar negeri. Ngasih informasi pada orang sini agar mau kerja ke luar negeri, nanti dibantu prosesnya.” (Hasil wawancara dengan Ibu Suprihatin pada tanggal 1 september 2010).

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Suprihatin bahwa proses

penyebaran informasi dan perekrutan calon TKI/TKW asal desa Karangrowo, calo tenaga kerja terkadang melakukan secara mandiri namun terkadang juga melalui bantuan seorang *pengepul*. Tugas daripada *pengepul* sendiri adalah mencari dan mengumpulkan orang-orang yang berminat bekerja ke luar negeri sebagai TKI/TKW. Sehingga kedudukan *pengepul* bagi calo tenaga kerja sangat strategis karena *pengepul* berasal dari desa setempat yang mengetahui warga desa yang potensial menjadi calon TKI/TKW. *Pengepul* akan mengumpulkan warga desa yang sekiranya mau diberangkatkan ke luar negeri untuk menjadi TKI/TKW dan memberikan informasi awal tentang peluang kerja di luar negeri. Setelah itu *pengepul* memberitahunya kepada calo tenaga kerja. Untuk satu orang calon TKI/TKW, *pengepul* akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 dari calo tenaga kerja yang bekerjasama dengannya dan calo tenaga kerja mendapatkan keuntungan Rp.1.500.000,00 dari PPTKIS (bagi calon TKI/TKW yang secara legal melalui PPTKIS). Setelah itu, *pengepul* menyerahkan segala urusan kepada calo tenaga kerja.

Informasi yang diberikan oleh calo tenaga kerja/pegepul kepada calon buruh migran yang direkrut, antara lain: berupa peluang kerja di luar negeri, gaji tinggi, biaya yang dibutuhkan untuk menjadi TKI, proses ke luar negeri yang mudah dan dokumen yang diperlukan sebagai syarat menjadi TKI di luar negeri. Warga desa Karangrowo yang direkrut menjadi TKI/TKW ke luar negeri adalah warga dari kelompok ekonomi menengah ke bawah dan didominasi oleh kaum perempuan, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Nor Hadi dan Bapak Fadlan.

## **2. Peran Calo Tenaga Kerja dalam Pengurusan Dokumen TKI dan Menawarkan Jasa Tenaga Kerja Pada Pengguna Jasa TKI/TKW**

Peran calo tidak hanya sebatas dalam perekrutan calon TKI/TKW dan pemberian informasi tentang peluang kerja di luar negeri kepada calon TKI/TKW asal desa Karangrowo, melainkan juga membantu calon TKI/TKW dalam mengurus kelengkapan dokumen yang dibutuhkan seperti surat keterangan izin orang tua atau wali bagi yang belum menikah/ijin suami atau istri bagi yang sudah menikah, dan foto terbaru. Hal ini sangat penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja, karena kelengkapan daripada dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan menjadi TKI/TKW haruslah lengkap sehingga sesampainya di PPTKIS yang bersangkutan, proses dapat berjalan lancar.

Setelah segala dokumen yang dibutuhkan lengkap, calo tenaga kerja mengurus waktu pemberangkatan dan transportasi yang akan digunakan untuk mengantar calon TKI/TKW ke PPTKIS. Sesampainya di PPTKIS, calo tenaga kerja mendaftarkan calon TKI/TKW di PPTKIS yang bersangkutan. Calo tenaga kerja baru akan meninggalkan calon TKI/TKW, setelah dinyatakan lulus tes

kesehatan atau medical check-up. Setelah itu peran calo dialihkan kepada PPTKIS, untuk kemudian calon tenaga kerja menjadi urusan PPTKIS yang bersangkutan. Jika tidak lulus kesehatan karena suatu hal, seperti sakit atau ternyata calon TKW hamil. Maka calon migran dipulangkan kembali ke daerah asal di temani calo. Ataupun ketika PPTKIS yang satu tidak menerima calon TKI/TKW yang ditawarkan oleh calo tenaga kerja karena suatu hal, maka calo tenaga kerja berusaha keras agar calon TKI/TKW dapat di terima dan diberangkatkan ke luar negeri. Cara yang dilakukan adalah dengan menawarkan calon TKI/TKW ke PPTKIS yang lainnya yang sekiranya mau menerima calon tenaga kerja yang direkrut tadi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Fadlan, sebagai berikut.

”Saya ini istilahnya cuma sekedar membantu memberikan informasi kepada orang sini yang mau bekerja di luar negeri. tidak hanya bantu ngasih informasi saja saya, kadang juga bantu ngurus surat yang diperlukan. Soalnya kalau di PPTKIS surat tidak lengkap, saya sendiri yang repot. Trus kalau sudah siap semuanya, saya berangkatkan ke PPTKIS di Jakarta. Bisa rombongan bisa juga nggak, tergantung berapa orang yang ikut. Sampai di PPTKIS, yang ikut dengan saya tak daftarkan disana. Kalau sudah di tes, dan ternyata fit atau sehat berarti PPTKIS menerima. Baru saya tinggal, tapai kalau nggak fit yang berarti nggak berhasil. Pulang lagi bersama saya. Kadang ya ada PPTKIS yang satu nggak mau nerima alasan kurang ini, trus saya antar ke PPTKIS yang laen sapa tau bisa.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fadlan pada tanggal 30 Agustus 2010).

Sehingga dalam hal ini peran calo tenaga kerja juga sebagai calo yang menawarkan jasa tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja seperti PPTKIS, bukan hanya sekedar merekrut dan memberikan informasi calon buruh migran, sesuai dengan pernyataan Abdurahman (2006:120) dimana peran calo tenaga kerja sebagai calo yang menawarkan jasa tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja seperti PPTKIS/ kepada majikan di negara tujuan.

Sementara untuk peran calo tenaga kerja yang mengurus TKI ilegal asal desa Karangrowo lebih besar dibandingkan dengan peran calo tenaga kerja yang bekerja sama dengan PPTKIS. Jika peran calo tenaga kerja yang bekerja sama dengan PPTKIS hanya sekedar merekrut; memberikan informasi; dan mendaftarkan calon TKI/TKW ke PPTKIS saja, namun peran calo tenaga kerja yang mengurus TKI ilegal asal desa Karangrowo adalah merekrut; membuatkan paspor; mengantarkan calon TKI/TKW hingga ke negara tujuan dan mendapatkan pekerjaan.

Secara ilegal, semua urusan sejak di desa akan di urus oleh calo tenaga kerja yang bersangkutan dari persyaratan berupa dokumen yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan, waktu pemberangkatan, dan transportasi. Hingga sampai tempat negara tujuan dan mendapatkan pekerjaan. Calon TKI/TKW asal desa Karangrowo yang menggunakan jalur ilegal, mereka tidak mengenal dengan baik calo tenaga kerja yang membantu mereka dalam proses menjadi tenaga kerja di luar negeri. Dari calon tenaga kerja biasanya hanya mengetahui nama dan alamatnya saja. Kedua pihak bekerjasama berdasarkan rasa saling percaya satu sama lain, karena keduanya saling membutuhkan. Di pihak calo tenaga kerja membutuhkan keuntungan berupa imbalan dari calon tenaga kerja yang hendak bekerja ke luar negeri, di pihak calon TKI/TKW sendiri membutuhkan bantuan untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri agar berjalan cepat dan lancar tanpa hambatan. Biaya yang dipungut berdasarkan kesepakatan bersama antara calo dengan TKI/TKW yang bersangkutan.

Berbeda dengan prosedur yang harus dilalui oleh warga desa Karangrowo yang lewat PPTKIS, ada proses yang harus di jalani (seleksi, pendidikan dan latihan setelah lulus baru diberangkatkan ke luar negeri, dokumen resmi menjadi TKI di luar negeri seperti paspor kerja), meskipun dalam prosesnya juga tidak lepas dari keterlibatan calo tenaga kerja. Beberapa buruh migran asal desa Karangrowo yang menjadi TKI/TKW di Malaysia secara ilegal, pergi ke negara tujuan tanpa melalui proses seleksi, pelatihan, dan pendidikan terlebih dahulu sebelum menjadi tenaga kerja di luar negeri. Paspor yang digunakan juga bukanlah paspor kerja dengan masa aktif 2 tahun, namun paspor yang digunakan adalah paspor pelancong dengan masa aktif 1 bulan. Jadi status calon TKI/TKW di negara tujuan (Malaysia) adalah wisatawan atau pelancong, dan seharusnya tidak memiliki hak untuk bekerja.



Gambar 4. Paspor TKI/TKW  
(Sumber: dokumentasi pribadi, 2 September 2010)

Gambar paspor diatas merupakan dokumen yang ikut dibantu pengurusannya oleh calo tenaga kerja, khususnya buruh migran ilegal. Tanpa paspor seseorang tidak diijinkan untuk singgah ataupun tinggal di negara lain, sekalipun migran ilegal seperti beberapa warga desa Karangrowo yang menjadi

TKI ilegal di Malaysia juga harus memiliki paspor. Selain itu, calon TKI/TKW ilegal ini tidak memiliki kontrak kerja, visa kerja, dan tanpa melalui pelatihan kerja sebagaimana mestinya yang diharuskan secara resmi oleh peraturan pemerintah. Kalaupun TKI/TKW yang bersangkutan ini ingin lebih lama tinggal dan bekerja di Malaysia, harus mengurus visa kerja/ijin kerja (permit). Biasanya calo tenaga kerja yang ada di Malaysia/majikanlah yang akan menguruskan ijin kerja ke pemerintah Malaysia. Biaya pengurusan ijin kerja tersebut ditanggung terlebih dahulu oleh si calo/majikan tersebut. Dengan resiko potong gaji dari penghasilan yang didapatkan selama bekerja.

Berikut proses yang dilalui oleh TKI/TKW asal desa Karangrowo selama perekrutan hingga pemberangkatan ke luar negeri secara ilegal dengan bantuan calo tenaga kerja yang diungkapkan oleh Subandi, yang pernah bekerja di Malaysia sebagai TKI ilegal.

Sejak dari desa, calon TKI/TKW bersama dengan calo tenaga kerja yang merekrutnya pergi ke Jakarta untuk naik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Batam (Riau). Di Riau ini, mereka mendarat di tempat persinggahan sebentar dan bertemu dengan calo tenaga kerja perbatasan dalam negeri. Tujuan melakukan persinggahan umumnya adalah transit. Selebihnya disebabkan karena arahan dari calo, seperti mengurus paspor bagi calon TKI yang belum punya paspor dari daerah asalnya, dan menunggu rombongan TKI/TKW lainnya yang akan ikut serta dengan memakan waktu minimal satu hari atau paling lama tiga hari. Selama itu, TKI/TKW berada di sebuah tempat penampungan sementara yang telah di siapkan oleh calo tenaga kerja. Kemudian proses penyaluran

TKI/TKW ke luar negeri (Malaysia) secara illegal ini dialihkan oleh calo pertama ke calo kedua yang ada diperbatasan antara Indonesia dan Malaysia (Riau), untuk diantar ke negara tujuan (Malaysia) dengan menggunakan kapal kecil (bot)/fery. Sesampainya di negara tujuan (Malaysia) tepatnya di Johor, calo kedua tadi mengalihkan tugasnya pada calo ketiga yang berada di perbatasan luar negeri yang sudah ada dan menunggu di tempat tujuan utama untuk kemudian disalurkan pada pengguna tenaga kerja (majikan) masing-masing. (Hasil wawancara dengan Bapak Subandi pada tanggal 2 September 2010).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Warsiti, salah seorang mantan TKW asal desa Karangrowo yang bekerja menjadi TKW ke Malaysia secara illegal melalui bantuan calo tenaga kerja, sebagai berikut.



Gambar 5. Peneliti mewawancarai mantan TKW, Ibu Kurniati (tengah) dan Ibu Warsiti (kiri)

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2 September 2010)

*“Aku pas neng Malaysia di ewangi calo, kabeh urusan trus duwit tak serahno mkek calo kuwi, termasuk paspor yo diurusno. Mbuh gareti piye carane ngurus paspor neng ndi, pas wis dadi paspore dikandani calo langsung mangkat soko kene terus neng Jakarta. Soko Jakarta numpak pesawat tekan Riau. Bar ning Riau, nginep disek neng kono sedino, jare calone ngenteni rombongan liyane. Asale aku dewe yo ora kenal mbek*

*calo sing nggowo aku soko kene, wong dikenalno mbek dulorku sing asale yo neng Malaysia diwangi mbek calo iku. Jarene dulorku si aman trus apik wonge. Yo wis, aku percoyo mbek dulorku. Lah mosok yo dulor meh ngapusi dulare dewe nek tak pikir. Lah pas nginep neng omahe calo seng neng Riau, gaweane yo mbek karaokenan terus joged-jogedan bareng seng liyane. Trus bar iku ono sing jemput meneh, diterno neng majikan.”*

Artinya:” Ketika saya ke Malaysia dibantu oleh calo, semua urusan diurus sama calo itu, termasuk paspor juga diuruskan. Tidak tahu caranya bagaimana, ketika sudah jadi paspornya diberitahu sama calo kemudian dari desa langsung ke Jakarta. Setelah di Jakarta naik pesawat menuju ke Riau. Sampai di riau, saya menginap dulu di rumah calo yang ada di sana selama 1 hari, untuk menunggu rombongan lainnya yang akan ikut serta. Ketika menginap di Riau, yang saya lakukan hanya bernyanyi dan berjoged bersama dengan teman-teman lainnya. Saya awalnya tidak kenal dengan calo tersebut, kemudian saya dikenalkan oleh saudara saya yang juga ke Malaysia dengan dibantu calo tersebut. Kata saudara saya si aman, makanya saya percaya saja. Kan tidak mungkin kalau saudara merugikan saudaranya sendiri. Kemudian ada yang menjemput saya lagi, dan diantarkan ke tempat majikan saya.” (Hasil wawancara dengan Ibu Warsiti pada tanggal 2 September 2010).

Pernyataan Ibu Warsiti dan Bapak Subandi di atas telah menunjukkan bahwa peran calo yang ikut terlibat dalam membantu Ibu Warsiti Dan Bapak Subandi serta warga desa Karangrowo lainnya yang bekerja secara illegal di luar negeri, sangat dominan karena hampir semua prosedur (perekrutan, pembuatan paspor, pemberangkatan ke luar negeri hingga calon TKI/TKW mendapatkan pekerjaan) di lakukan sendiri oleh calo yang bersangkutan dengan cara bekerja sama dengan calo lainnya sejak awal perekrutan hingga calon TKI sampai di negara tujuan dan mendapatkan pekerjaan. Sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Warsiti dan Bapak Subandi.

### **3. Peran Calo Tenaga Kerja dalam Pendanaan Awal Biaya Migrasi**

Dana yang diperlukan untuk menjadi TKI di luar negeri antara satu warga dengan warga lain asal desa Karangrowo yang menjadi TKI di luar negeri ternyata berbeda, tergantung pada negara tujuan tempat bekerja. Bukan hanya itu saja,

terkadang juga tergantung pada calo tenaga kerja yang ikut terlibat dalam prosesnya. Cara membayarnya juga berbeda, ada yang membayar di awal proses. Namun ada juga yang membayar dengan cara potong gaji setelah mendapatkan penghasilan selama bekerja, hal ini umumnya dilakukan oleh buruh migran illegal. Untuk calon TKI/TKW yang berangkat melalui PPTKIS resmi biasanya membayar di awal karena calo yang terlibat tidak mau meminjam dana bagi TKI/TKW yang tidak memiliki/kekurangan dana. Seperti yang diungkapkan Ibu Kurniati sebagai berikut.

*“Biayane lungo neng luar ki dewe-dewe, tergantung negarane. Mbuh gak reti pastine piro, Cuma pas aku takok tonggo-tonggo kok jebule jumlah bayare ki dewe-dewe. Ndek iko aku bayar ki telung juta, mbuh kanggo opo wae. Tak serahno mbek sing nggowo aku neng tempat penampungan TKI neng Jakarta kono. Seng nggowo aku rak gelem nyilehi nek duite kurang, nek duite lengkap lagi mangkat. Jare calone si kanggo bayar foto, paspor, karo liyan-liyane. Dewe nek kue neng Malaysia ogak lewat perusahaan resmi sing neng Jakarta, koyo Warsiti adiku kui. Lungo neng Malaysia diwangi wong, trus yo gelem nyilehi kekurangane nek danae kurang tapi yo kui ancen mengko di potong gajine, yopenak si awale nanging akhire kui ra potongane gaji jare lumayan akeh.”*

“Biaya untuk pergi ke luar itu berbeda-beda, tergantung negaranya. Nggak tau pastinya berapa. Cuma ketika saya tanya ke tetangga-tetangga yang juga kerja ke luar ternyata beda-beda. Kalau saya dulu bayar 3 juta, nggak tau buat apa saja. Saya menyerahkan semuanya pada orang yang bawa saya ke tempat penampungan resmi di Jakarta sana. Orang yang bawa saya itu tidak mau mbantu kalau dananya kurang, harus lengkap. Kata yang bawa saya si, dananya buat biaya paspor, foto dan lain-lainnya. Beda kalau kamu berangkat ke Malaysia ngak lewat perusahaan resmi yang ada di Jakarta. Seperti Warsiti adik saya itu, dananya dibantu sama orang yang bawa dia ke Malaysia. Ya tapi nanti ngelunasinya lewat potong gaji, memang enak di awalnya tapi akhirnya itu katanya potongan gajinya lumayan besar.” (Hasil wawancara dengan Ibu Kurniati pada tanggal 5 September 2010).

Hal yang diungkapkan oleh Ibu Kurniati di atas sesuai dengan yang dinyatakan oleh Abdurahman (2006:120), bahwa dalam keterlibatan seorang calo tenaga kerja dalam proses penyaluran ke luar negeri juga ikut berperan dalam dalam pendanaan awal bagi migran yang tidak memiliki biaya dengan

memberikan pinjaman. Umumnya warga desa Karangrowo yang mendapatkan bantuan dalam hal pendanaan awal adalah calon TKI asal desa Karangrowo yang bekerja ke luar negeri secara illegal ke Malaysia.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa calo tenaga kerja yang terlibat dalam proses penyaluran TKI/TKW asal desa Karangrowo ke luar negeri, berperan dalam hal:

1. Proses perekrutan dan pemberian informasi pada calon buruh migran mengenai peluang kerja di luar negeri dan prosedur menjadi TKI di luar negeri.
2. Membantu mengurus dokumen yang diperlukan guna menjadi tenaga kerja di luar negeri.
3. Menawarkan jasa tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja seperti PPTKIS/langsung kepada majikan di negara tujuan.
4. Pendanaan awal bagi migran yang tidak memiliki biaya dengan memberikan pinjaman, khususnya pada migran illegal.

#### **D. Dampak Positif maupun Negatif Peran Calo Tenaga Kerja Bagi TKI/TKW Asal Desa Karangrowo**

Indonesia merupakan salah satu pengirim tenaga kerja Internasional khususnya pekerja kasar dan pembantu rumah tangga (PRT) atau pekerja domestik terbesar khususnya di kawasan Asia Tenggara. Fenomena migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri, sesungguhnya bukan lagi menjadi persoalan luar biasa. Dari tahun ke tahun, arus migrasi tenaga kerja ke luar negeri semakin meningkat termasuk tenaga kerja asal Indonesia sendiri (Haris, 2005:29).

Peningkatan akan arus migrasi oleh buruh migran di sertai pula dengan semakin meningkatnya kasus yang di alami oleh buruh migran dari tahun ke tahun.

Berdasarkan UU Republik Indonesia No.39 pasal 10 tahun 2004, bahwa penempatan TKI dilakukan oleh lembaga pelaksana yang terdiri dari PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penempatan TKI ke luar negeri. Depnaker seringkali lebih lambat menangani proses pengiriman tenaga kerja dibandingkan lembaga-lembaga penyalur swasta. Akibatnya banyak lembaga-lembaga swasta penyalur tenaga kerja bersaing satu sama lain untuk mendapatkan penghasilan maksimal dengan merekrut sebanyak mungkin tenaga kerja untuk di ekspor ke luar negeri sebagai komoditi non migas yang sangat menguntungkan.

Namun, pekerjaan merekrut orang sebanyak mungkin tidaklah mudah. Dalam upaya merekrut tenaga kerja, lembaga-lembaga swasta penyalur tenaga kerja pada umumnya membutuhkan peran calo tenaga kerja di dalamnya untuk memudahkan transaksi. Di tambah lagi dengan tingginya minat buruh migran untuk bekerja menjadi TKI/TKW dan besarnya keuntungan dari kegiatan ekspor-impor tenaga kerja mengakibatkan adanya beberapa oknum masyarakat yang mengambil keuntungan dalam prosesnya. Sehingga mengakibatkan berkembangnya jalur-jalur alteratif informal (secara illegal) dengan menggunakan jasa calo tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, warga desa Karangrowo yang pernah bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri secara illegal maupun melalui PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta), tidak lepas dari adanya keterlibatan calo

tenaga kerja dalam prosesnya. Hal ini membawa dampak tersendiri bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo, baik dari segi positif maupun negatif.

**a. Dampak Positif**

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, bahwa prosedur pelayanan program migran yang dilakukan oleh beberapa migran tenaga kerja melalui pihak pemerintah dirasakan masih terlalu birokratis (berbelit-belit), tidak efisien karena menghabiskan biaya dan waktu yang tidak sedikit dengan waktu tunggu pemberangkatan yang sangat lama, bahkan cenderung tidak pasti, serta menyulitkan calon migran sebagai pengguna program. Sehingga menyebabkan calon migran potensial menggunakan jasa calo tenaga kerja dengan harapan prosedur yang dijalani untuk bekerja di luar negeri dapat berjalan lebih mudah dan cepat, serta biaya pertama yang dikeluarkan lebih murah. Migran yang menggunakan jalur resmi, dalam kenyataannya selama proses perekrutan, tidak lepas dari jeratan eksploitasi mekanisme calo tenaga kerja terselubung yang dikemas melalui sistem perekrutan sponsor secara resmi yakni PPTKIS (Mantra, 2003:217).

Beberapa hal positif yang rasakan oleh TKI/TKW asal desa Karangrowo dengan menggunakan jasa calo tenaga kerja diantaranya karena prosedur yang dijalani, terasa lebih mudah dibandingkan jika harus mengurus segala sesuatunya sendiri. Apalagi bila melalui pemerintah, yang di rasa memakan waktu lama dan terlalu birokratis (ada langkah-langkah yang merasa menyulitkan bagi calon migran dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang relatif rendah seperti calon migran asal desa Karangrowo). Hal ini berdasarkan hasil wawancara

bersama salah seorang TKI asal desa Karangrowo yang pernah ke Malaysia dengan menggunakan jasa calo tenaga kerja, sebagai berikut.

*“Aku neng Malaysia ki ora remi nanging lewat calo, soale nek resmi lewat pemerintah trutama, kesuen marai trus sembarange ngurus dewe. Padahal aku pengen ndang cepet tekan Malaysia trus entuk kerjo. Trus nek tekan Malaysia ki bebas ameh mileh kerjo opo, ogak terikat aturan. Dewe nek resmi, gak iso bebas mileh kerjo sing dipingini. Akeh cah kene sing kerjo neng Malaysia yo podo wae mbek aku, mileh mangkat lewat calo trus gak resmi.”*

Artinya:”Saya ke Malaysia itu tidak resmi tapi melalui calo, karena kalau resmi terutama lewat pemerintah, waktu yang dibutuhkan untuk mengurus lama dan semuanya harus mengurus sendiri. Padahal saya ingin cepat sampai di Malaysia dan segera mendapat pekerjaan. Selain itu kalau sudah sampai di Malaysia enak, bebas tidak terikat dengan aturan, mau milih kerja apa ya bebas. Berbeda kalau lewat resmi, tidak bisa bebas milih kerja yang diinginkan. Banyak warga sini yang pergi ke Malaysia dengan cara sama seperti saya, milih lewat calo, tidak resmi.”(Hasil wawancara dengan Supriyanto pada tanggal 23 Agustus 2010).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Suratmi, salah seorang mantan TKW asal desa Karangrowo berikut ini.

*“Aku pas kerjo neng Arab ki di ewangi Pak Supalal (calo).Pak Supalal iku apik wonge lan kabeh yo di urusno. Soale kadang kan ono yo calo sing gak apik, ngapusi tok. Meh ngurus dokumen opo liyan-liyane di ewangi kabeh mbek Pak Supalal, dadine yo lancar trus cepet. Nek ono kurange yo kabeh wis urusane Pak Supalal, soale aku wis bayar dadi yo pengene angger butohe langsung mangkat wae. Penting terimo resik kabeh lah. Soale nek ngurus dewe ki aku gak mudeng carane terus yo kesuen, amargo sembarange ngurus rono rene dewe. Jarene sing tau ngurus dewe yo ngono, kesuen trus syarate akeh. Dadine wegah aku.”*

Artinya:”Saya ketika bekerja ke Arab di bantu oleh Pak Supalal (calo). Pak Supalal itu baik orangnya, semua di uruskan. Soalnya, kadang ada calo yang tidak baik dan cuma membohongi saja. Seperti tetangga saya ada yang kena tipu sama calonya. Mau mengurus dokumen maupun lain-lainnya di bantu seluruhnya oleh Pak supalal, jadinya lancar dan cepat. Walaupun ada kekurangannya semua sudah menjadi urusan Pak Supalal, karena saya sudah bayar jadi yang penting buat saya tinggal berangkat dan terima bersih. Kalau segala sesuatunya mengurus sendiri, selain saya tidak tahu caranya juga waktu yang dibutuhkan untuk mengurus sendiri lebih lama karena kesana kesini sendiri. Katanya yang

pernah mengurus sendiri begitu, waktunya terlalu lama dan syaratnya banyak. Jadinya malas saya.” (Hasil wawancara dengan Suratmi pada tanggal 25 Agustus 2010).

Itulah setidaknya dampak positif yang dirasakan oleh TKI/TKW asal desa Karangrowo dengan menggunakan jasa calo tenaga kerja dimana proses yang dijalani sejak awal (di desa) hingga PPTKIS/pengguna jasa tenaga dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan cepat karena semua urusan diserahkan dan dipercayakan kepada calo tenaga kerja sepenuhnya.

#### **b. Dampak Negatif**

Peningkatan akan arus migrasi oleh buruh migran di sertai pula dengan semakin meningkatnya kasus yang di alami oleh buruh migran dari tahun ke tahun. Berbagai kasus menarik segera muncul, setelah kasus-kasus yang dialami pekerja Indonesia mencuat ke permukaan sebagai delik aduan tindak kejahatan atas nama pekerja yang terjadi di negara tujuan. Akan tetapi ironisnya, kasus-kasus tersebut seringkali lenyap oleh alasan kekerabatan antar negara-negara terkait. Ini berarti bahwa kasus-kasus yang menimpa pekerja kita belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah (Haris, 2005:26). Berikut di bawah ini diantaranya berbagai persoalan yang dihadapi oleh TKI/TKW dengan menggunakan jasa calo tenaga kerja dalam prosesnya.

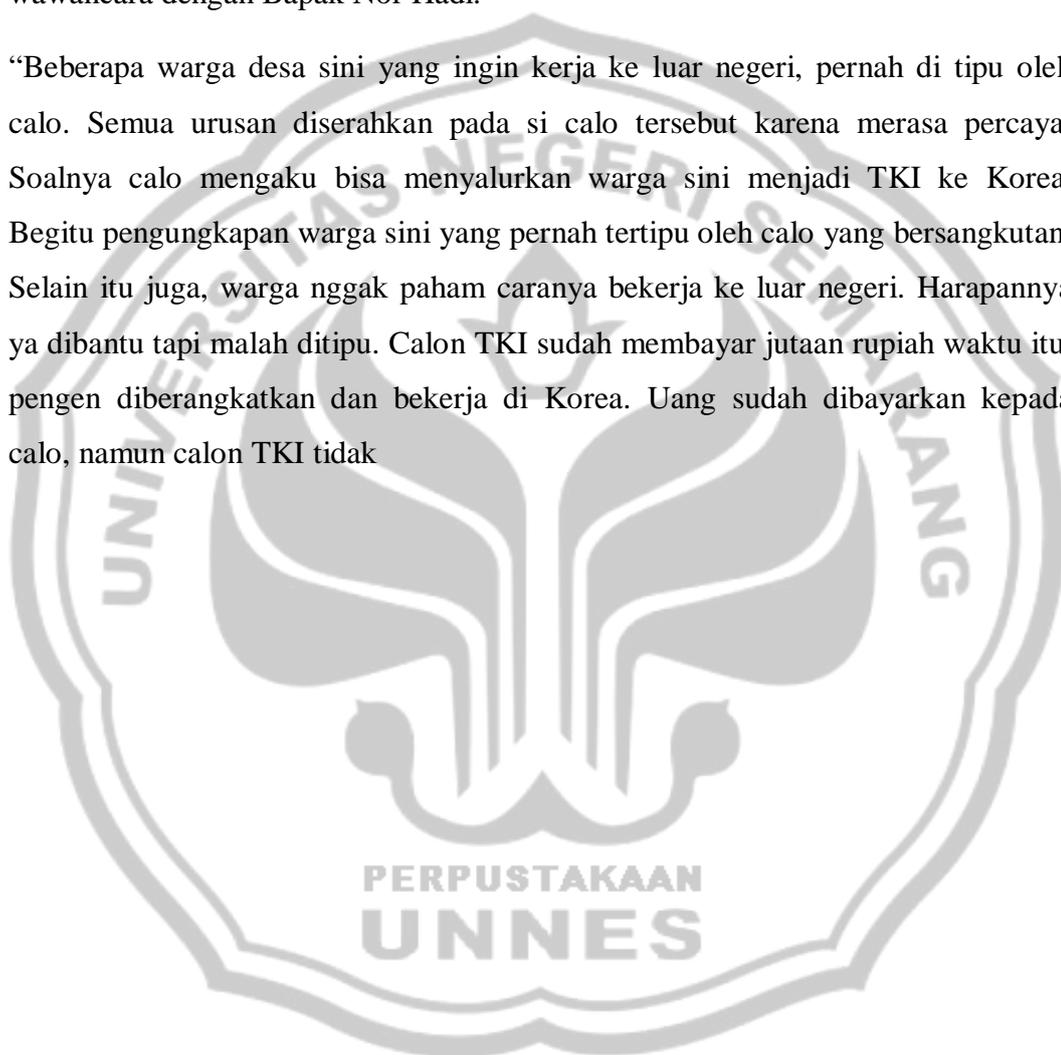
#### **1. Tindak Penipuan**

Ketidaktahuan buruh migran mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan dokumen penting yang dibutuhkan dan prosedur yang benar dalam proses migrasi, justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu guna memperbesar

keuntungan pribadi, sehingga posisi buruh migran rentan terhadap tindak penipuan (Haris, 2005:29-30).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Desa Karangrowo yakni Bapak Nor Hadi, beberapa warganya ada yang tertipu oleh calo tenaga kerja. Berikut wawancara dengan Bapak Nor Hadi.

“Beberapa warga desa sini yang ingin kerja ke luar negeri, pernah di tipu oleh calo. Semua urusan diserahkan pada si calo tersebut karena merasa percaya. Soalnya calo mengaku bisa menyalurkan warga sini menjadi TKI ke Korea. Begitu pengungkapan warga sini yang pernah tertipu oleh calo yang bersangkutan. Selain itu juga, warga nggak paham caranya bekerja ke luar negeri. Harapannya ya dibantu tapi malah ditipu. Calon TKI sudah membayar jutaan rupiah waktu itu, pengen diberangkatkan dan bekerja di Korea. Uang sudah dibayarkan kepada calo, namun calon TKI tidak



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW asal desa Karangrowo ke luar negeri, di dapatkan kesimpulan sebagai berikut.

- a) Peran calo dalam proses penyaluran TKI/TKW asal desa Karangrowo ke luar negeri sangatlah dominan dan penting. Di mana, sejak awal perekrutan di desa dan pengurusan dokumen yang menjadi syarat untuk bekerja di luar negeri menjadi tanggung jawab calo tenaga kerja sepenuhnya hingga calon TKI/TKW sampai kepada pengguna jasa tenaga kerja (PPTKIS/majikan di negara tujuan). Hubungan kekerabatan antara TKI/TKW dengan calo tenaga kerja di desa Karangrowo juga memperkuat peran calo tenaga kerja sebagai orang yang terlibat langsung dalam jaringan migrasi. Karena pada umumnya calo yang terlibat dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri masih tinggal dalam satu desa dan memiliki hubungan keluarga, serta dikenal baik oleh calon TKI/TKW. Sehingga calon TKI/TKW percaya kepada calo tenaga kerja yang membantunya.
- b) Dampak positif maupun negatif peran calo tenaga kerja bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo, sebagai berikut. Dampak positifnya adalah proses yang dilalui untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri dapat berjalan dengan mudah, lancar, dan cepat dibandingkan jika harus mengurus segala sesuatunya sendiri.

Dampak negatifnya adalah muncul berbagai persoalan sejak perekrutan hingga kepulangan ke tanah air (tindak penipuan, pemerasan, kekerasan fisik, dan eksploitasi). Terlebih lagi bagi TKI/TKW yang dalam prosenya melalui calo tenaga kerja sepenuhnya (illegal), statusnya di negara tujuan adalah tidak diakui dan tidak memiliki hak perlindungan tenaga kerja karena dokumen tidak lengkap sehingga sewaktu-waktu dapat di tangkap oleh pihak yang berwenang di negara tujuan dengan resiko yang dihadapi berupa membayar denda/kurungan hingga pemulangan secara paksa dan calo tenaga kerja tidak ikut bertanggung jawab atas resiko tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada simpulan di atas mengenai peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri. Penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak yang terkait, sebagai berikut:

- a. Bagi mantan TKI/TKW agar memberikan informasi mengenai pengalaman kerja yang pernah didapatkannya selama bekerja di luar negeri kepada calon TKI/TKW, serta saran yang positif tentang tata cara bekerja di luar negeri. Agar dapat menjadi pertimbangan bagi calon TKI/TKW yang lainnya yang hendak bekerja ke luar negeri.
- b. Bagi Calon TKI/TKW dengan berbagai peristiwa yang telah dialami oleh para TKI/TKW di luar negeri sebelumnya, dapat dijadikan pertimbangan untuk bekerja di luar negeri melalui cara legal demi kebaikan diri sendiri. Calon TKI/TKW juga harus waspada dengan adanya praktek calo tenaga

kerja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (penipuan, pemerasan, dan sebagainya).

- c. Bagi Pemerintah Pusat/Daerah (Bidang Pelaksanaan dan Penempatan TKI), untuk lebih perhatian lagi kepada warga yang hendak bekerja di luar negeri dengan memberikan sosialisasi mengenai prosedur yang benar untuk bekerja di luar negeri. Selain itu juga agar pemerintah dapat meminimalkan praktek percaloan tenaga kerja yang ada di lapangan karena dapat merugikan calon tenaga kerja secara langsung dan negara secara tidak langsung.

berangkat-berangkat juga sesuai dengan janji calo yang bersangkutan. Lama-lama warga jengkel, terus mendesak calo untuk mengembalikan uang mereka jika tidak segera diberangkatkan. Bukannya uang dikembalikan ke calon TKI yang sudah membayar, tetapi calo kabur dari rumahnya dan hingga sekarang tidak pernah kembali. Padahal calo adalah warga desa Karangrowo sendiri, perempuan lagi. Banyak yang nggak mengira kalau si calo itu berani melakukan hal tersebut. Kemungkinan takut untuk kembali, karena jika kembali tentunya akan di massa oleh warga yang telah dirugikan jutaan rupiah itu.” (Hasil wawancara dengan Bapak Nor Hadi pada tanggal 15 Agustus 2010).

Dari pengungkapan oleh Bapak Nor Hadi diatas, menunjukkan bahwa posisi buruh migran rawan atas tindak penipuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga TKI/TKW mengalami kerugian materi yang jumlahnya tidak sedikit. Seperti yang dialami oleh beberapa calon buruh migran asal Desa Karangrowo yang pernah menjadi korban penipuan dari calo tenaga kerja yang merekrut. Tindak penipuan yang dialami oleh TKI asal desa Karangrowo sendiri diakibatkan oleh kepercayaan calon buruh migran yang penuh terhadap calo tenaga kerja dan ketidaktahuan akan prosedur untuk menjadi TKI di

luar negeri. Sehingga buruh migran dengan mudahnya di dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti calo.

## 2. Tindak Eksploitasi

Sistem *backing* (mafia percaloan tenaga kerja) yang dilakukan oleh PPTKIS juga ikut berperan penting dalam kasus tindak kejahatan yang dialami buruh migran. Adalah suatu kenyataan bahwa tidak satupun PPTKIS yang terbebas dari sistem *backing* tersebut. Bahkan hampir menjadi tradisi yang tidak dapat dilepaskan dari seluruh prosedur pengiriman jasa tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai dilema yang seringkali rumit untuk dipecahkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berbagai kasus yang terjadi pada buruh migran sesungguhnya sudah berkembang sejak proses tersebut mulai dilakukan, yakni sejak proses perekrutan tenaga kerja.

Munculnya berbagai kejanggalan dalam prosedur pendaftaran hingga proses pengiriman dilaksanakan misalnya, merupakan salah satu persoalan yang buruh migran tidak rasakan. Akan tetapi, hal tersebut akan segera menjadi besar ketika pekerja mengalami masalah serius di negara tujuan. Pada kenyataannya, sistem *backing* ini akan menciptakan peluang-peluang diskriminasi dan eksploitasi buruh migran lebih besar (Haris, 2005:27).

Adanya tindak eksploitasi pekerja migran di atas tersebut, ditunjang dengan hasil wawancara bersama salah seorang informan asal desa Karangrowo yang merupakan calo tenaga kerja, sebagai berikut.

“Kalau saya lebih suka mbantu perempuan yang pengen ke luar negeri daripada laki-laki. Karena perempuan itu lebih mudah penanganannya dibandingkan laki-laki, kalau laki-laki seringnya lebih suka melawan (berontak) kepada majikan jika pekerjaan dan gaji yang didapatkan tidak sesuai dengan

keinginan. Beda dengan perempuan, lebih mudah penanganannya karena perempuan lebih nurut dan tidak berani melawan (berontak) jika terjadi permasalahan atau ketidaksesuaian dalam pekerjaan. Karena jika terjadi permasalahan seperti TKI/TKW yang kabur dari majikan, maka akan menjadi masalah juga bagi PPTKIS yang menyalurkan ke luar negeri. Saya selaku perantara yang membawa dari desa juga ikut terkena dampaknya (di marahi pihak PPTKIS). Selain itu, jumlah perempuan di daerah-daerah kan umumnya lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki dan permintaan akan tenaga kerja perempuan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri juga tinggi. Bahkan terkadang PPTKIS itu sudah mendapatkan permintaan sejumlah tenaga kerja perempuan dari pihak luar negeri seperti Arab Saudi, untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.” (Hasil wawancara dengan Pak Fadlan pada tanggal 27 Agustus 2010).

Dari hasil wawancara bersama dengan Pak Fadlan (calo tenaga kerja yang bekerja sama dengan salah satu Pelaksana Penempatan TKI Swasta di Jakarta) di atas, dapat dikatakan bahwa TKI rawan akan tindak eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu seperti calo. Terlebih lagi bagi tenaga kerja wanita, di mana calo tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan TKW setelah berada di negara tujuan, karena bagi calo yang penting mendapatkan upah yang banyak dari banyaknya jumlah perempuan yang di rekrut menjadi TKW dan nantinya tidak ada masalah yang menyangkut dirinya. Hal ini menjelaskan bahwa pekerja migran terutama pihak perempuan rawan sekali dengan tindak eksploitasi besar-besaran oleh oknum seperti calo tenaga kerja demi keuntungan pribadi semata. Seolah-olah TKW diperlakukan seperti barang dagangan yang diperjual belikan kepada pengguna jasa tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan materi, tanpa memperdulikan nasib TKW nantinya.

### 3. Tindak Pemerasan

Migrasi internasional di Indonesia dapat dibedakan atas dua pola. Pertama, yang terdokumentasikan pada lembaga AKAN yang secara legal tercatat di Departemen Tenaga Kerja, salah satu contohnya adalah pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah. Kedua, tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri tidak terdokumentasikan (secara ilegal) melalui calo, misalnya kebanyakan tenaga kerja Indonesia yang pergi ke Malaysia. Mereka ini tidak tercatat di Departemen Tenaga Kerja maupun di kantor imigrasi Indonesia maupun Malaysia (Mantra, 2003:214).

TKI/TKW asal desa Karangrowo yang memilih ke Malaysia seringkali melalui jalur ilegal dengan bantuan calo tenaga kerja dan tidak tercatat di departemen Tenaga Kerja maupun di kantor imigrasi Indonesia maupun Malaysia. Akibatnya status mereka adalah migran ilegal yang tidak memiliki hak untuk naik banding atas keputusan administratif yang telah dijatuhkan kepadanya. Sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 398) dimana pekerja migran menghadapi resiko terbesar dalam hak asasi manusia dan kebebasan dasar mereka saat direkrut, dipindahkan dan dipekerjakan terlebih lagi bagi pekerja migran yang melalui jalur ilegal dengan keterlibatan calo tenaga kerja. Tanpa status, pendatang ilegal merupakan sasaran eksploitasi secara alami. Pekerja ilegal ini jarang sekali berupaya mencari keadilan karena takut akan statusnya akan terungkap dan diusir.

Seperti apa yang dialami oleh Nor Syafa'at (TKI yang pernah bekerja di Malaysia), berikut ini.

“Saya pernah bekerja di Malaysia, secara illegal melalui bantuan calo soalnya prosesnya cepat trus juga lebih mudah. Paspor yang saya gunakan itu paspor pelancong, tanpa dokumen resmi, kontrak kerja, sertifikat kerja resmi, dan surat ijin kerja (permit). Saya paham kalau status saya di negara Malaysia itu pelancong, kerja secara illegal.

Jadi selama bekerja di luar negeri, saya bekerja secara sembunyi-sembunyi dan tinggal di gubug dekat dengan tempat kerja bersama dengan TKI lainnya yang juga illegal. Setiap harinya saya harus waspada dan berhati-hati jika ada polisi Malaysia yang sedang berpatroli. Terkadang saja, saya harus sembunyi di hutan dekat dengan tempat perkebunan dekat dengan tempat kerja saya, terkadang juga berkejar-kejaran dengan polisi Malaysia agar tidak tertangkap. Kalau ingat ya ngeri juga karena polisi Malaysia juga menggunakan senapan angin. Resiko jika tertangkap itu mendapat kurungan penjara selama kurang lebih 1 bulan atau denda sekitar 50-500 ringgit. Denda yang diberikan itu tergantung pada sering tidaknya tertangkap oleh pihak polisi Malaysia. Kalau sering tertangkap, ya tambah banyak denda yang dibayar.

Ketika menjadi TKI illegal di Malaysia, saya pernah tertangkap sebanyak 2 kali oleh polisi setempat dan mendapat kurungan penjara selama dua minggu untuk penangkapannya yang pertama. Sedangkan untuk penangkapan yang kedua kali oleh polisi Malaysia, lalu saya dipulangkan secara paksa dengan jaminan tanpa dipungut biaya sedikitpun sampai di daerah asal.

Bersama dengan TKI lain yang nasibnya juga sama, saya dipulangkan ke tanah air oleh pihak pemerintah Malaysia di Riau. Bukannya langsung diantarkan pulang oleh pihak yang berwenang setempat, tapi justru mendapat persoalan baru lagi. Saya di peras oleh orang-orang yang tidak saya kenal.

Tidak sesuai pernyataan pemerintah Malaysia, bahwa TKI illegal dipulangkan tanpa dipungut biaya sepeserpun karena kata pemerintah sana biaya sudah ditanggung oleh negara. Saya dan rombongan lainnya diminta membayar dalam jumlah tertentu jika ingin pulang ke daerah asal dan polisi Indonesia tidak peduli dengan nasib saya juga rombongan bahkan terkadang ikut terlibat di dalamnya. Saya yakin itu.

Jika kami tidak memiliki biaya yang diminta tersebut, kami akan di tempatkan di sebuah tempat penampungan terlebih dahulu. Umumnya ciri bangunan dari tempat penampungannya tersebut berlantai 2, bagian bawah adalah tempat usaha seperti restoran dan lantai dua yang digunakan untuk menampung kami. Dalam penempatannya tersebut, kami di kelompokkan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kami baru dipulangkan ketika jumlahnya dirasa cukup (lebih dari satu orang), secara rombongan ke daerah masing-masing. Sesampainya di daerah masing-masing, kami

dipaksa membayar biaya selama di penampungan dan transportasi pulang. Untuk sementara ini, saya mengaku jera kembali ke Malaysia karena sudah dua kali tertangkap oleh pihak polisi Malaysia. Keinginan untuk kembali ke Malaysia lagi tetap ada, tapi ya nanti-nanti saja. Karena, gaji di Malaysia jauh lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri, padahal kerjanya ya hampir sama di ladang.” (Hasil wawancara dengan Nor Syafa’at pada tanggal 2 September 2010).

Tindak pemerasan yang dialami oleh Nor Syafa’at, seperti yang diungkapkannya diatas tersebut, menurutnya merupakan hal yang biasa terjadi dan dialami oleh buruh migran terutama TKI/TKW dengan status illegal. Dari apa yang telah diungkapkan oleh Nor Syafa’at, telah memberikan gambaran akan posisi pekerja migran khususnya yang illegal dengan bantuan calo tenaga kerja, bahwa pekerja migran rawan akan tindak kejahatan. Seperti tindak eskploitasi dan pemerasan oleh oknum-oknum tertentu, yang telah dialami oleh Nor Syafa’at dan TKI lainnya yang bernasib sama.

#### **4. Kekerasan Fisik**

Haris (2005:60-64) menyatakan bahwa Singapura dan negara-negara Arab merupakan dua kawasan yang mengandung resiko sosial paling besar bagi pekerja migran Indonesia, khususnya lagi bagi migran perempuan. Hal ini mengingat bahwa realitas kekerasan yang terjadi di kedua wilayah tersebut terus mengalami peningkatan. Seperti kekerasan fisik, eksploitasi jam kerja dan penahanan gaji. Di Singapura misalnya, antara Januari 1999 hingga Oktober 2001 tercatat 53 kasus kematian TKW Indonesia yang sebagian besar disebabkan oleh tindak penganiayaan pengguna jasa. Di samping itu, ditemukan juga bahwa ancaman kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia khususnya perempuan juga berasal dari pihak-pihak pengerah jasa, calo tenaga kerja maupun oknum-oknum disepanjang jalur migrasi yang dilalui.

Berdasarkan data Kemenakertrans tahun 2009, tingkat permasalahan yang dialami oleh TKI masih relatif tinggi. Seperti PHK sepihak sebanyak 19.429 orang, sakit bawaan sebanyak 9.378 orang, sakit akibat kerja sebanyak 5.510 orang, gaji tidak dibayarkan sebanyak 3.550 orang, dan kasus penganiayaan sebanyak 2.952 orang. Lebih ironisnya lagi, kebanyakan dialami oleh pihak wanita karena sebanyak 80 persen TKI adalah wanita. Sistem ketenagakerjaan yang sekarang dilaksanakan dinilai tidak maksimal sehingga cenderung merugikan TKI. Dimana TKI/TKW di luar negeri rentan terhadap tindak kejahatan karena kurangnya perlindungan dari pemerintah (Jawa Pos, 2010).

Seperti kekerasan fisik yang di alami oleh Ibu Suprihatin (salah seorang mantan TKW asal desa Karangrowo), berikut ini.

*“Aku tau kerjo dadi pembantu neng Arab. Wah kerjone abot, melek esuk turu bengi. Aku yo tau di sikso barang karo majikanku, di kepruk nggowo kayu gede. Rak terimo majikanku lanag tok, anak-anake barang yo kasar karo aku. Terus aku kabur neg kedubes RI di terno sopir taksi kono. Soale aku rak mudeng opo-opo. Kabeh dokumenku seng di simpen majikanku tak jikok, tak gowo kabeh. ”*

Artinya:“Saya pernah bekerja menjadi pembantu di Arab. Wah kerjanya berat. Bangun pagi tidur malam. Aku juga pernah disiksa oleh majikan saya, dipukul dengan kayu besar. Bukan hanya majikan laki saya saja, tetapi ketiga anaknya juga ikut menyiksa. Karena tidak tahan, ya sudah saya kabur pas rumah sepi tanpa sandal. Semua dokumen yang disimpan majikan tak bawa semua. Aku tidak tahu mau kemana dan berbuat apa. Lari ketemu sopir taksi yang baik, terus saya diantar ke Kedubes RI.” (Hasil wawancara dengan Suprihatin pada tanggal 20 Agustus 2010).

Salah satu dokumen yang penting adalah kontrak kerja karena bermanfaat bagi buruh migran selama kerja di luar negeri. Namun fakta yang umumnya diperoleh dari lapangan bahwa sebagian besar buruh migran Indonesia tidak memahami pentingnya kontrak kerja bagi mereka. Kurang/tidak pemahannya terhadap isi kontrak kerja oleh buruh migran dikarenakan rata-rata pendidikan

yang dimiliki oleh buruh migran relatif rendah (SLTP ke bawah). Logika yang digunakan dalam surat perjanjian kontrak kerja merupakan logika hukum yang tidak dipahami oleh sebagian besar buruh migran.

Hal ini seringkali menyebabkan buruh migran tidak terlalu peduli dengan apa yang tertera di dalam surat perjanjian kontrak kerja yang sebenarnya penting sekali untuk dipahami guna menjamin perlindungan bagi buruh migran sendiri. Dimana kontrak kerja berisi tentang hak dan kewajiban dari buruh migran yang sebagai TKI/TKW di luar negeri. Selain itu ketidaktahuan buruh migran mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dan prosedur yang aman/benar untuk menjadi TKI/TKW ke luar negeri, membuat posisi mereka dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu guna kepentingan pribadi seperti calo tenaga kerja (Haris, 2005:30).

Meskipun melalui PPTKIS resmi, dan dilengkapi dengan dokumen termasuk kontrak kerja, namun sayangnya Ibu Suprihatin sendiri mengaku tidak memahami isi daripada kontrak kerja yang bersifat penting. Selain karena pendidikannya rendah yaitu SD, juga karena sejak awal prosedur, calo tenaga kerja yang membantunya memberikan pesan agar selama di PPTKIS taat pada aturan dan dokumen yang diberikan di simpan semua. Oleh karena itu ketika mengalami kekerasan fisik di tempatnya bekerja, dia tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana.

Persoalan yang telah dialami oleh Ibu Suprihatin seperti kekerasan fisik yang menimpanya, sesungguhnya juga menjadi kesalahan dari calo tenaga kerja sejak perekrutan. Seharusnya Ibu Suprihatin tidak layak untuk menjadi TKW di

luar negeri karena tingkat pendidikannya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan pendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat. Persyaratan ini penting untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti perlakuan yang tidak manusiawi seperti penyiksaan yang selama ini sering menimpa TKI di luar negeri termasuk apa yang telah dialami oleh Ibu Suprihatin sendiri.

Kasus diatas adalah sebagian kecil dari banyaknya persoalan-persoalan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia sejak awal perekrutan hingga sesampainya di tanah air. Bukan hanya orang luar negeri saja yang tega melakukan tindak kejahatan kepada migran, bahkan orang dalam negeri yang masih sebangsa dan setanah airpun juga tega.

Berdasarkan hasil penelitian, sesuai dengan hasil wawancara yang ada pada halaman sebelumnya. Bahwa dampak negatif yang dialami oleh TKI/TKW asal desa Karangrowo dengan menggunakan jasa calo tenaga kerja diantaranya adalah: tindak pemerasan dan penipuan; obyek perdagangan manusia; kekerasan fisik, eksploitasi jam kerja dan penahanan gaji sebagai akibat kurang/tidak pahamiya terhadap kontrak kerja yang dimiliki oleh buruh migran khususnya TKW. Bahkan dokumen yang dimiliki oleh buruh migran asal desa Karangrowo yang melalui jalur illegal, tidak lengkap. Akibatnya posisi mereka lemah di mata hukum dan tidak mendapatkan hak perlindungan sebagai pekerja migran di luar negeri.

Atas persoalan yang dialami oleh TKI/TKW asal Desa Karangrowo, seperti yang di cantumkan di atas. Calo tenaga kerja tidak ikut bertanggung jawab karena hal itu dianggap sebagai resiko calon tenaga kerja migran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2003. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi (Skematika Teori dan Terapan)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abdurrahman, Muslan. 2006. *Ketidakpatuhan TKI: Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*. Malang: UMM press.
- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. 2003. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bery, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- FIS UNNES. 2008. *Panduan Bimbingan, Penyusunan, Pelaksanaan Ujian, dan Penilaian Skripsi Mahasiswa*. Semarang: Unnes Press.
- Haris, Abdul. 2003. *Kucuran Keringat dan Derap Pembangunan (Jejak Migran dalam Pembangunan Daerah)*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- , 2005. *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayana, M Irwan. Juli 2004. *Migrasi Lintas Batas dan Sesualitas di Asia Tenggara*. Halaman 95-99. Dalam Jurnal Perempuan. 2004. Vol 36. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Jawa Pos. 2010. *TKI Rentan, Perlindungan Kurang*. 2 Juni. Hal.3.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal 398. Lembar Fakta HAM: *Migrasi Gelap dan Melanggar Hukum*. Edisi II. Jakarta: Depkehhm.
- Kertonegoro, Sentanoe. 1994. *Migrasi Tenaga Kerja*. Jakarta: Agung.
- Lee, Everett S. 2000. *Teori Migrasi*. Translated by Hans Daeng. Ditinjau kembali oleh Ida Bagus Mantra. Edisi VII. Yogyakarta: UGM Press.
- Mantra, Ida Bagoes. 2004. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Masrufah, Izza. 2009. *Multidimensi Kemiskinan*. Surakarta: UNS Press.
- Milles, Mathew B dan A, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moeliono, Antoen dkk. 1981. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir, rozy.1981. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mustofa, Ms. 2005. *Kemiskinan Masyarakat Petani Desa di Jawa*. Semarang: Unnes Press.
- Narwoko, Dwi dkk. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasution, Arif. 1999. *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Bandung: Yayasan Adi Karya Ikapi.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, Hadarari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.

- Polama, M Margaret. 1999. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Tim penyusun UU RI No. 13 tentang ketenagakerjaan. 2003. UU RI No.13 *tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004. *tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar negeri*. 2004. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Wijaksana, MB. 2005. *Perempuan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Perempuan No.42. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

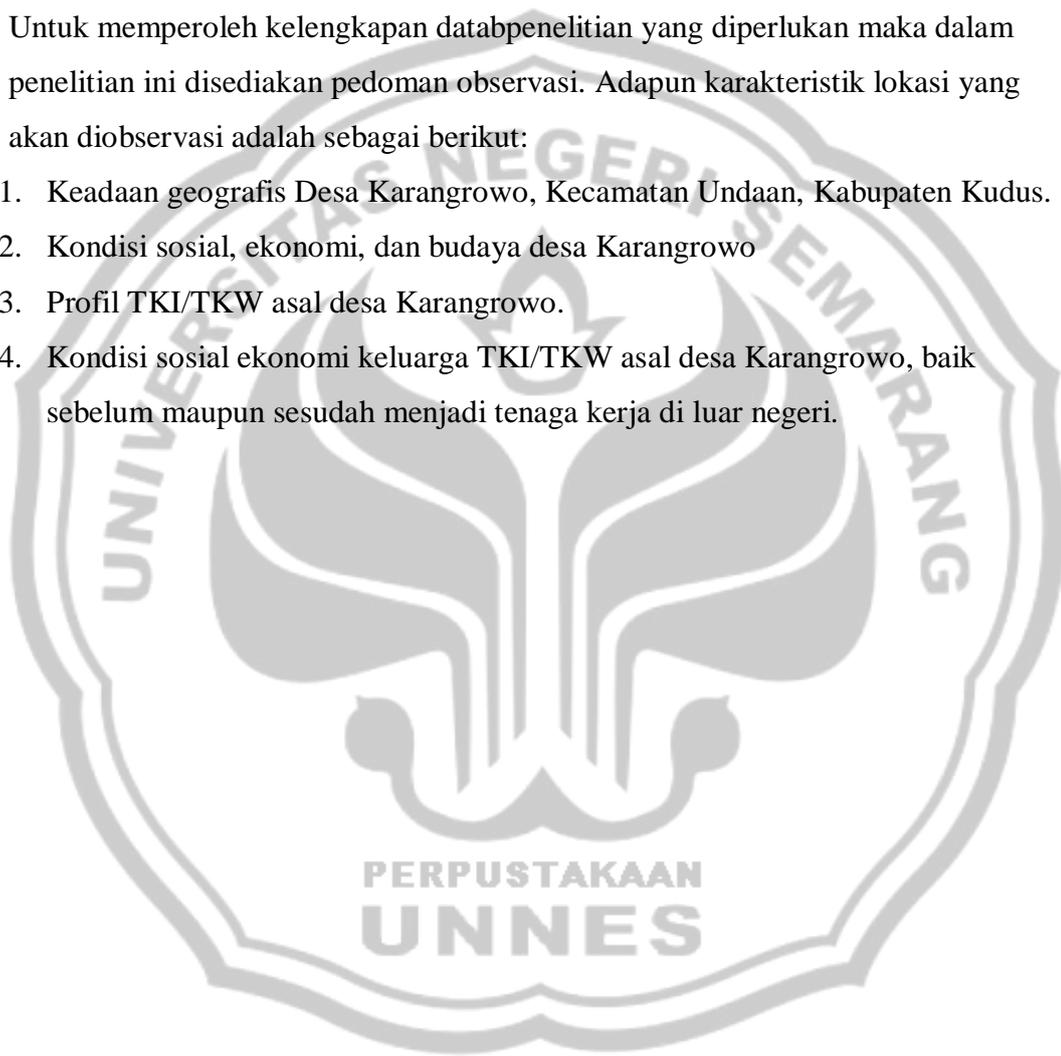


**PEDOMAN OBSERVASI**  
**PERAN CALO TENAGA KERJA DALAM PROSES PENYALURAN**  
**TKI/TKW KE LUAR NEGERI**  
**(STUDI KASUS di DESA KARANGROWO, KECAMATAN UNDAAN,**  
**KABUPATEN KUDUS)**

---

Untuk memperoleh kelengkapan databpenelitian yang diperlukan maka dalam penelitian ini disediakan pedoman observasi. Adapun karakteristik lokasi yang akan diobservasi adalah sebagai berikut:

1. Keadaan geografis Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus.
2. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya desa Karangrowo
3. Profil TKI/TKW asal desa Karangrowo.
4. Kondisi sosial ekonomi keluarga TKI/TKW asal desa Karangrowo, baik sebelum maupun sesudah menjadi tenaga kerja di luar negeri.



**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PERAN CALO TENAGA KERJA DALAM PROSES PENYALURAN**  
**TKI/TKW KE LUAR NEGERI**  
**( STUDI KASUS di DESA KARANGROWO, KECAMATAN UNDAAN,**  
**KABUPATEN KUDUS)**

---

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu untuk memperoleh validitas dan data yang lengkap diperlukan pedoman wawancara yang merupakan himpunan dari pokok-pokok permasalahan penelitian

A. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangrowo Kecamatan jati kabupaten Kudus.

B. Identitas Subyek dan Informan penelitian

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

PERPUSTAKAAN  
**UNNES**

**PEDOMAN WAWANCARA**  
Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW)

**A. Identitas Subyek penelitian**

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

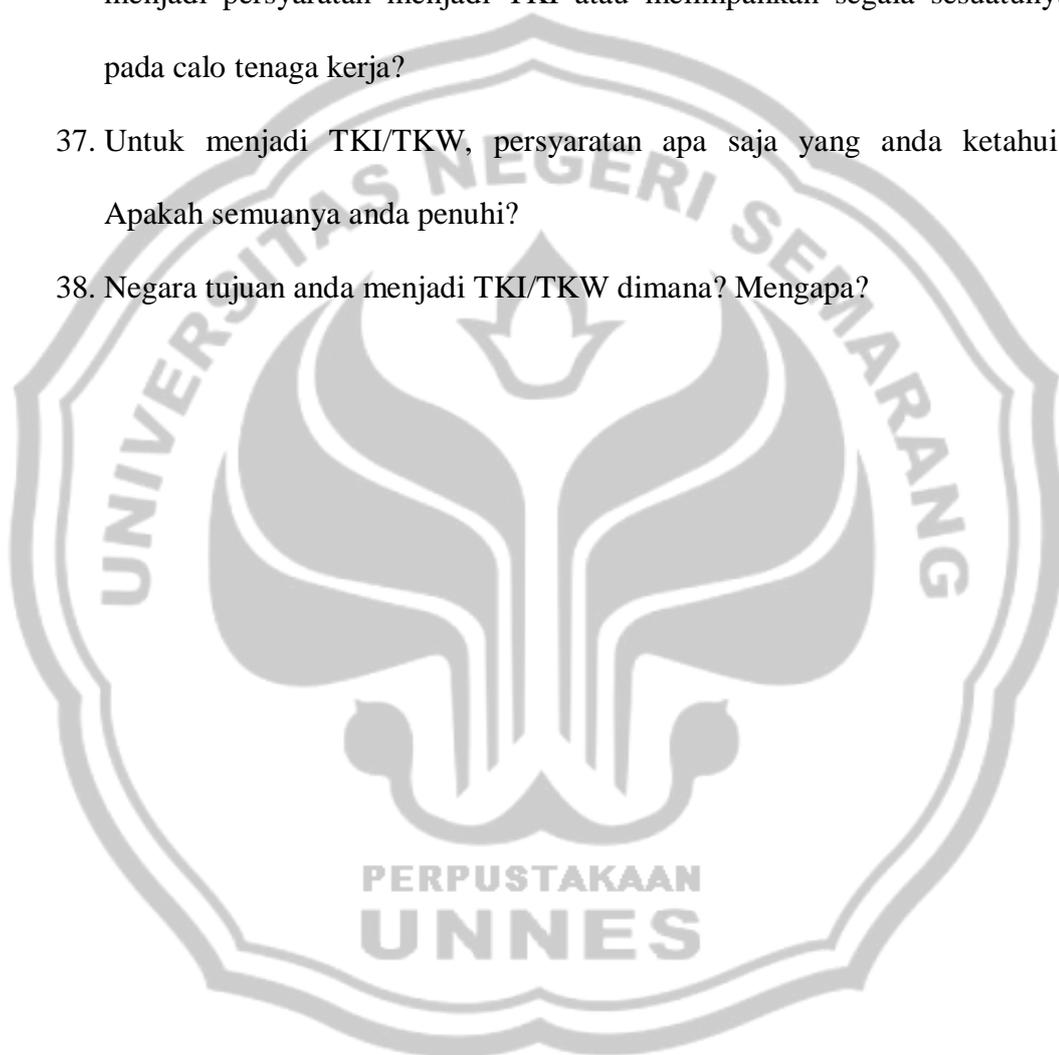
**B. Daftar Pertanyaan**

1. Mengapa anda mengambil keputusan menjadi TKI/TKW di luar negeri?
2. Apa pekerjaan anda sebelum menjadi TKI/TKW? Berapa gajinya?
3. Apa pekerjaan anda ketika menjadi TKI/TKW di luar negeri? Mengapa anda memilih pekerjaan tersebut? Berapa gaji yang didapatkan?
4. Anda menjadi TKI/TKW atas kemauan sendiri, secara paksaan atau ajakan dari pihak lain?
5. Untuk menjadi TKI/TKW di luar negeri, anda melalui jalur legal(Pemerintah atau PPTKIS)/illegal? Mengapa?
6. Berapa besar biaya yang anda keluarkan untuk menjadi TKI/TKW?
7. Biaya yang anda keluarkan guna menjadi TKI/TKW, digunakan untuk membiayai dalam hal apa saja?
8. Biaya tersebut menggunakan dana sendiri atau bantuan dari pihak lain?  
Jika di bantu pihak lain, oleh siapa?
9. Apakah anda mengetahui prosedur menjadi TKI/TKW di luar negeri?
10. Informasi dan prosedur menjadi TKI/TKW, anda dapatkan dari mana?

11. Apa saja informasi dan prosedur menjadi TKI/TKW, yang anda dapatkan?
12. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi TKI/TKW di luar negeri?
13. Kendala apa saja yang anda alami dalam proses menjadi TKI/TKW baik melalui pihak calo tenaga kerja maupun mandiri?
14. Mengapa anda menggunakan jasa calo tenaga kerja?
15. Darimana anda mengenal calo tenaga kerja tersebut?
16. Bagaimana proses perekrutan yang dilakukan oleh calo tenaga kerja yang bersangkutan?
17. Apa keuntungan menggunakan jasa calo tenaga kerja?
18. Apa kerugian menggunakan jasa calo tenaga kerja?
19. Apakah calo tenaga kerja tersebut membantu anda dalam hal pendanaan? Jika iya, dana tersebut untuk apa? Di pinjami atau di berikan secara cuma-cuma? Jika dipinjami bagaimana cara membayarnya kembali?
20. Apakah anda membayar jasa calo tenaga kerja yang membantu anda untuk menjadi TKI/TKW di luar negeri? Jika iya, berapa?
21. Bagaimana interaksi anda dengan calo tenaga kerja yang membantu anda menjadi TKI/TKW? berapa kali dan dalam hal apa saja?
22. Apakah pernah mempunyai masalah dengan calo tenaga kerja yang membantu anda untuk menjadi TKI/TKW di luar negeri? jika ia dalam hal apa saja.

23. Apakah calo tenaga kerja yang membantu anda ikut bertanggung jawab atas hal-hal yang anda alami selama proses hingga kepulangan anda ke tanah air lagi nantinya?
24. Apakah ada perbedaan perlakuan antara TKI dengan TKW oleh calo tenaga kerja? Jika ia jelaskan.
25. Apakah calo tenaga kerja yang membantu anda menjadi TKI/TKW, bersikap baik pada anda? Jelaskan .
26. Calo tenaga kerja membantu anda dalam hal apa saja?
27. Berapa jumlah calo tenaga kerja yang terlibat dalam proses anda menjadi TKI/TKW? Jelaskan ( macam dan tugasnya).
28. Calo tenaga kerja yang membantu anda dalam proses menjadi TKI/TKW, ikut mendampingi dalam hal apa saja dan sejauh mana?
29. Selama anda menjadi TKI/TKW pernahkah mengalami masalah? Jika ya jelaskan.
30. Siapa yang bertanggung jawab atau ikut membantu anda ketika mengalami permasalahan selama menjadi TKI/TKW di luar negeri?
31. Berapa gaji anda selama menjadi TKI/TKW di luar negeri?
32. Apakah gaji tersebut anda peroleh semua secara utuh atau ada pemotongan gaji?
33. Bagaimana kondisi sosial ekonomi baik sebelum maupun sesudah menjadi TKI/TKW?
34. Apakah anda betah menjadi TKI/TKW di luar negeri? Mengapa?

35. Jelaskan secara rinci prosedur apa saja yang harus anda lalui dan jalani dalam proses menjadi TKI/TKW, sejak dari desa hingga pulang kembali ke tanah air.(transportasi,dokumen,langkah-langkah yang dilalui)
36. Apakah anda mengetahui dan ikut terlibat dalam mengurus segala yang menjadi persyaratan menjadi TKI atau melimpahkan segala sesuatunya pada calo tenaga kerja?
37. Untuk menjadi TKI/TKW, persyaratan apa saja yang anda ketahui? Apakah semuanya anda penuhi?
38. Negara tujuan anda menjadi TKI/TKW dimana? Mengapa?



**PEDOMAN WAWANCARA**  
Calo Tenaga Kerja

**A. Identitas Subyek penelitian**

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

**B. Daftar Pertanyaan**

1. Sudah berapa lama anda menjadi calo tenaga kerja?
2. Kriteria calon TKI/TKW yang anda rekrut? Mengapa?
3. Berapa kali anda melakukan perekrutan?
4. Apakah ada target dalam jumlah ketika melakukan perekrutan?
5. Apakah ada perbedaan perlakuan pada TKI dengan TKW? Jika mengapa dan dalam hal apa saja?
6. Apakah anda mengetahui secara baik, mengenai prosedur atau langkah-langkah menjadi TKI/TKW di luar negeri? Anda memperoleh hal tersebut dari mana?
7. Dimana saja negara tujuan pengiriman TKI/TKW? Mengapa?
8. Sebagai calo tenaga kerja, anda lakukan secara mandiri atau masih ada pihak lain yang terlibat? Jika ada pihak lain yang terlibat, siapa?
9. Berapa keuntungan yang anda peroleh? Dari pihak mana saja?
10. Apakah anda membantu pendanaan calon TKI/TKW yang hendak anda salurkan ke luar negeri?

11. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk menjadi TKI/TKW di luar negeri?
12. Informasi apa saja yang anda berikan pada TKI/TKW?
13. Bagaimana cara perekrutan atau pemberangkatan calon TKI/TKW yang anda lakukan?
14. Sejauh mana anda ikut mendampingi dan terlibat dalam membantu TKI/TKW yang menggunakan jasa anda?
15. Kendala atau masalah apa saja yang anda alami, selama melakukan pekerjaan sebagai calo TKI?
16. Sejauh mana dan dalam hal apa saja keterlibatan anda dalam kegiatan ini (proses menjadi TKI/TKW)?
17. Dalam hal ini, apakah anda bekerjasama dengan PJTKI? Jika iya, PJTKI mana?
18. Apakah calon TKI/TKW yang hendak anda salurkan ke luar negeri, anda daftarkan kepada pihak pemerintah setempat (Depnaker)?
19. Jelaskan prosedur atau langkah-langkah yang anda lakukan sejak awal hingga akhir terkait pekerjaan anda sebagai calo TKI.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
Keluarga TKI/TKW

**A. Identitas Informan penelitian**

Nama :

Umur :

Pendidikan :

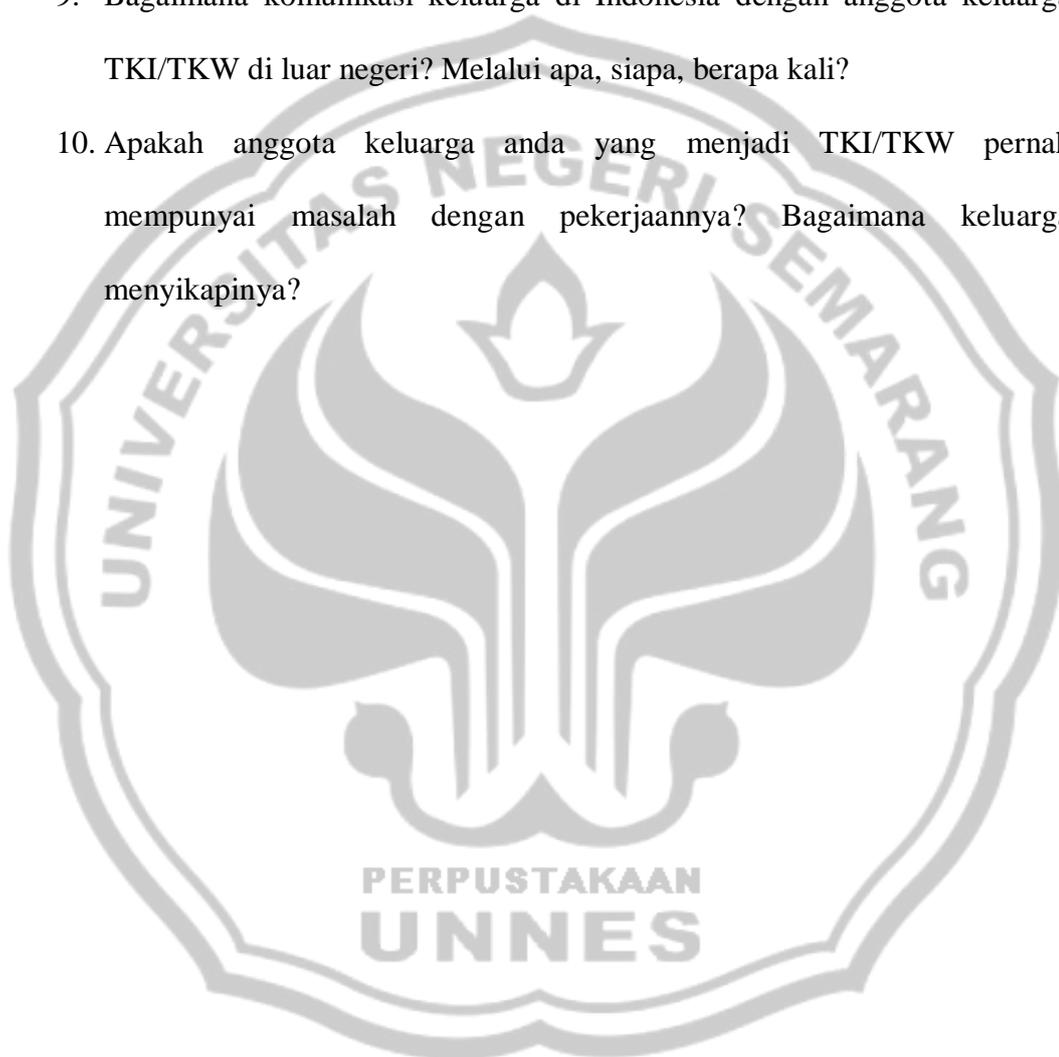
Pekerjaan :

Alamat :

**B. Daftar Pertanyaan**

1. Apakah anda setuju dengan keputusan salah satu anggota keluarga anda untuk menjadi TKI/TKW? Mengapa?
2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi baik sebelum maupun sesudah salah satu anggota keluarga anda menjadi TKI/TKW?
3. Apakah anggota keluarga anda yang menjadi TKI/TKW di luar negeri, menggunakan jasa calo tenaga kerja?
4. Apakah anda mendukung hal tersebut? Mengapa?
5. Apakah anda sebagai keluarga dari TKI/TKW yang menggunakan jasa calo tenaga kerja juga mengenal dan ikut berinteraksi dengan calo tersebut? Jika iya, dalam hal apa dan seberapa jauh anda mengenal?
6. Apakah baik keluarga yang ada di Indonesia maupun anggota keluarga anda yang menjadi TKI/TKW pernah mempunyai masalah dengan calo tenaga kerja? Jika iya, masalah apa?

7. Apakah keluarga di Indonesia pernah mendapat kiriman uang dari anggota keluarga anda yang menjadi TKI/TKW di luar negeri? Seberapa sering, bagaimana proses dan melalui siapa? Berapa jumlahnya?
8. Remitan tersebut dimanfaatkan untuk hal apa saja?
9. Bagaimana komunikasi keluarga di Indonesia dengan anggota keluarga TKI/TKW di luar negeri? Melalui apa, siapa, berapa kali?
10. Apakah anggota keluarga anda yang menjadi TKI/TKW pernah mempunyai masalah dengan pekerjaannya? Bagaimana keluarga menyikapinya?



**PEDOMAN WAWANCARA**  
Tokoh Masyarakat Desa Karangrowo

(Kepala Desa Karangrowo dan Kaur Desa Karangrowo)

**A. Identitas Informan penelitian**

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

**B. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap banyaknya warga di desanya yang menjadi TKI/TKW di luar negeri?
2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat desa baik sebelum ada yang menjadi TKI/TKW di luar negeri maupun sesudah?
3. Bagaimana kondisi fisik desa bapak ?
4. Bagaimana tanggapan bapak dengan adanya calo tenaga kerja Indonesia, sementara cukup banyak warga bapak yang menjadi TKI/TKW?
5. Apakah warga desa bapakyang menjadi TKI/TKW di luar negeri sudah memenuhi kriteria? Kalau belum bagaimana bapak menyikapi hal ini?
6. Apakah ada sosialisasi dan informasi dari depnaker kepada warga desa bapak yang hendak menjadi TKI/TKW di luar negeri? Bagaimana tanggapan bapak dengan hal ini?
7. Apakah di desa bapak, juga terdapat calo tenaga kerja (TKI/TKW)?

8. Calo tenaga kerja tersebut apakah penduduk bapak anda atau penduduk desa lain?
9. Apakah bapak selaku kepala desa mengetahui proses perekrutan yang dilakukan oleh calo tenaga kerja terhadap warga desa bapak?
10. Apakah calo tenaga kerja tersebut meminta ijin kepada bapak selaku kepala desa setempat, ketika melakukan perekrutan?
11. Apakah warga desa bapak yang menjadi TKI/TKW di luar negeri ada yang menggunakan jasa calo tenaga kerja tersebut? Bagaimana tanggapan bapak terhadap hal tersebut ?
12. Apakah selama ini ada masalah yang dialami warga bapak yang menjadi TKI/TKW dengan calo tenaga kerja yang bersangkutan? Jelaskan.
13. Dokumen apa saja yang biasanya menjadi persyaratan bagi TKI/TKW, yang diurus ke balai desa?
14. Apakah semua warga desa bapak yang menjadi TKI/TKW di luar negeri terdaftar di kantor balai desa? Adakah yang secara illegal?
15. Bagaimana tanggapan bapak, terhadap warga desanya yang menjadi TKI/TKW secara illegal?
16. Apakah selama ini ada warga desa bapak yang memiliki masalah ketika bekerja menjadi TKI/TKW di luar negeri? Jika iya, bagaimana sikap pemerintah desa setempat?
17. Apakah selama mengurus persyaratan berupa dokumen yang dibutuhkan di kantor balai desa, dilakukan oleh warga bapak sebagai calon TKI/TKW secara mandiri atau di temnai oleh calo tenaga kerja yang bersangkutan?

**DAFTAR SUBYEK PENELITIAN**

(TKW)

1. Nama : Suprihatin  
Umur : 45 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga (mantan TKW) dan pengepul TKW  
Alamat : Desa Karangrowo RT3/4
  
2. Nama : Rita Sugiharti  
Umur : 20 Tahun  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : TKW  
Alamat : Desa Karangrowo RT 3/4
  
3. Nama : Suratmi  
Umur : 30 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : TKW  
Alamat : Desa karangrowo RT3/3
  
4. Nama : Warsiti  
Umur : 40 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga (mantan TKW)  
Alamat : Desa Karangrowo RT 6/4
  
5. Nama : Sri Atun  
Umur : 30 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : TKW

Alamat : Desa Karangrowo RT 5/5

6. Nama : Kurniati

Umur : 37 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani (Mantan TKW)

Alamat : Desa Karangrowo RT 6/4



**DAFTAR SUBYEK PENELITIAN**

(TKI)

1. Nama : Kahono  
Umur : 47 Tahun  
Pendidikan : Tidak Sekolah  
Pekerjaan : Buruh bangunan (mantan TKI)  
Alamat : Desa Karangrowo RT 3/4
2. Nama : Subandi  
Umur : 40 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : TKI  
Alamat : Desa Karangrowo RT 4/4
3. Nama : Slamet Riyadi  
Umur : 33 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : TKI  
Alamat : Desa Karangrowo RT 5/3
4. Nama : Nor Syafaat  
Umur : 31 Tahun  
Pendidikan : tidak sekolah  
Pekerjaan : TKI  
Alamat : Desa Karangrowo RT 5/3
5. Nama : Supriyanto  
Umur : 27 Tahun  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : TKI  
Alamat : Desa Karangrowo RT 3/4

**DAFTAR SUBYEK PENELITIAN**

(Calo Tenaga Kerja)

1. Nama : Fadlan  
Umur : 42 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Perantara tenaga kerja  
Alamat : Desa Karangrowo RT 5/3

2. Nama : Supalal  
Umur : 45 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Perantara tenaga kerja  
Alamat : Desa Kutuk RT 4/2



**DAFTAR INFORMAN PENELITIAN**

(Tokoh Masyarakat)

1. Nama : Rumadi, S.Pd  
Umur : 47 Tahun  
Pendidikan : Perguruan Tinggi  
Pekerjaan : Kepala Desa Karangrowo  
Alamat : Desa Karangrowo RT 4/4
  
2. Nama : Nor Hadi  
Umur : 45 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Kaur Kesra Desa Karangrowo  
Alamat : Desa Karangrowo RT3/5
  
3. Nama : Heny Setyowaty  
Umur : 44 Tahun  
Pendidikan : Perguruan Tinggi  
Pekerjaan : Staf Ketenagakerjaan Depnaker Kab.Kudus  
Alamat : Desa Mlati Norowito, Kec.Kota, Kab.Kudus



**DAFTAR INFORMAN PENELITIAN**  
(Keluarga TKI/TKW asal Desa Karangowo)

1. Nama : Suyadi  
Umur : 43 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Karangowo RT 6/4

2. Nama : Kusno  
Umur : 35 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Karangowo RT 2/3

3. Nama : Narlin  
Umur : 27 Tahun  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Buruh Pabrik  
Alamat : Desa Karangowo RT 4/4

Nama : Sutar  
Umur : 40 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Karangowo RT 6/4

4. Nama : Surinah  
Umur : 27 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Karangowo RT 3/3

Filename: 7029  
Directory: D:\AJIEK Digilib  
Template: Normal.dotm  
Title: PERLENGKAPAN  
Subject:  
Author: Asteric  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 16/03/2011 8:27:00  
Change Number: 4  
Last Saved On: 18/03/2011 12:05:00  
Last Saved By: Pak DEDE  
Total Editing Time: 30 Minutes  
Last Printed On: 18/03/2011 12:06:00  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 148  
Number of Words: 30.215 (approx.)  
Number of Characters: 172.227 (approx.)